



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2012**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
TAHUN 2005-2025**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 150 ayat (3) huruf e Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 juncto Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2005-2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
dan
BUPATI PENAJAM PASER UTARA**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2005-2025.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara;
4. Kepala Daerah adalah Kepala Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional selanjutnya disebut RPJP Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang selanjutnya disebut RPJP Daerah Provinsi Kalimantan Timur atau RPJPD Provinsi Kalimantan Timur adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Timur untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJM Daerah atau RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah (RPJPD) serta memperhatikan RPJM Nasional.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara yang selanjutnya disebut RPJP Daerah atau RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Penajam Paser Utara untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.

10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
12. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
13. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan misi.

BAB II

MATERI MUATAN DAN FUNGSI

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

Pasal 2

- (1) Penyusunan RPJPD dibentuk dalam rumusan visi, misi dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- (2) Rincian RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi Pedoman pelaksanaan Program Pembangunan Daerah periode Tahun 2005-2025.
- (4) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang memuat visi, misi dan program Bupati.

BAB III

SISTEMATIKA

Pasal 3

Sistematika RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri dari:

- a. Bab I : PENDAHULUAN;
- b. BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH;
- c. BAB III : ISU-ISU ANALISIS STRATEGIS;
- d. BAB IV : VISI DAN MISI DAERAH;
- e. BAB V : ARAH KEBIJAKAN;
- f. BAB VI : KAIDAH PELAKSANAAN;
- g. BAB VII : PENUTUP.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD.
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD diatur berdasarkan Peraturan Bupati.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 19 April 2012

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. ANDI HARAHAHAP

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 19 April 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. SUTIMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2012 NOMOR 1.

Lampiran: PERATURAN DAERAH KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA
NOMOR : 1 TAHUN 2012
TANGGAL : 19 April 2012



RPJPD

**(RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH)
KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA
TAHUN 2005-2025**

**PEMERINTAH KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

DAFTAR ISI

Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	vii
Bab I Pendahuluan.....	1
1.1 Pengantar	1
1.2 Maksud dan Tujuan.....	6
1.3 Landasan Hukum	7
1.4 Hubungan RPJP dan Dokumen Perencanaan Lainnya	8
1.5 Tata Urut	10
BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah	12
2.1 Gambaram Umum.....	12
2.1.1 Kondisi Fisik Dasar.....	13
2.1.2 Luas Wilayah dan Tata Guna Tanah	15
2.1.3 Topografi dan Iklim	16
2.2 Kependudukan dan Kesejahteraan Masyarakat	17
2.2.1 Kependudukan	18
2.2.2 Indeks Pembangunan Manusia	23
2.2.3 Kemiskinan	25
2.3 Proyeksi Penduduk	27
2.4 Kondisi Infrastruktur di Kabupaten Penajam Paser Utara	29
2.4.1 Transportasi.....	29
2.4.1.1 Modal Transportasi Darat	29
2.4.1.2 Modal Transportasi Laut	33
2.4.2 Jaringan Air Bersih	35
2.4.3 Jaringan Listrik	36
2.4.4 Jaringan Telepon	38
2.4.5 Fasilitas Pendidikan	41
2.4.6 Fasilitas Kesehatan	45
2.4.7 Fasilitas Perdagangan dan Jasa	48
2.5 Sistem Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten PPU Berdasarkan RTRK Kabupaten PPU Tahun 2002-2012	50
2.5.1 Rencana Struktur Tata Ruang	50
2.5.1.1 Pendekatan Nodalitas	50
2.5.1.2 Pendekatan Homogenitas	55
2.5.2 Rencana Pola Pemanfaatan Ruang	59
2.6 Tinjauan Ekonomi Kabupaten Penajam Paser Utara 2000-2009	62
2.6.1 Kondisi Ekonomi Daerah	62
2.6.2 Perkembangan PDRB	64
2.6.3 Pertumbuhan Ekonomi	65
2.6.4 Pertumbuhan Ekonomi Sektorial	68
2.6.5 Struktur Perekonomian Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2009	71
2.6.6 PDRB Perkapita Dan Pendapatan Regional Perkapita ..	72
2.7 Potensi Sektorial Kabupaten Penajam Paser Utara	75
2.7.1 Pertanian	75
2.7.1.1 Pertanian Tanaman Pangan	75
2.7.1.2 Pertanian Tanaman Perkebunan.....	78

2.7.2	Peternakan	80
2.7.3	Perikanan	81
2.7.4	Pertambangan	82
2.7.5	Perdagangan dan Industri	85
2.7.6	Pariwisata	86
2.8	Arahan Pengembangan Infrastruktur di Kabupaten Penajam Paser Utara	88
2.8.1	Transportasi	88
2.8.1.1	Jaringan Jalan dan Perangkutan Umum	88
2.8.1.2	Terminal	88
2.8.1.3	Modal Transportasi Laut	89
2.8.2	Air Bersih	90
2.8.3	Listrik	91
2.8.4	Jaringan Telematika	92
2.8.5	Sarana Pendidikan	93
2.8.6	Sarana Kesehatan	93
2.8.7	Sarana Perdagangan dan Jasa	94
BAB III	Isu-Isu Analisis Strategis	95
3.1	Potensi Daerah	95
3.2	Politik, Keamanan dan Pemerintahan	95
3.2.1	Politik	97
3.2.2	Keamanan.....	102
3.2.3	Pemerintahan.....	107
3.3	Kondisi Sosiokultural dan Kualitas Hidup	114
3.4	Sumber Daya Alam.....	123
3.4.1	Sumber Daya Iklim	125
3.4.2	Sektor Pertanian.....	130
3.4.3	Sektor Perikanan	137
3.4.4	Sektor Perkebunan	144
3.4.5	Sektor Peternakan	151
3.4.6	Sektor Pertambangan dan Penggalan	157
3.4.7	Sektor Pariwisata.....	164
3.4.8	Sektor Industri Dan Perdagangan	168
BAB IV	Visi dan Misi Daerah	176
4.1	Visi Pembangunan Daerah	176
4.2	Misi Pembangunan Daerah.....	179
BAB V	Arah Kebijakan.....	183
5.1	Arah Kebijakan Pembangunan	183
5.2	Pentahapan RPJPD	188
5.2.1	RPJMD KE-1 (2005-2010)	188
5.2.2	RPJMD KE-2 (2010-1015)	190
5.2.3	RPJMD KE-3 (2015-1020)	191
5.2.4	RPJMD KE-4 (2020-1025)	192
BAB VI	KAIDAH PELAKSANAAN.....	195
BAB VII	PENUTUP	197

DAFTAR TABEL

TABEL 2.1	Jumlah Desa, Kelurahan dan Kecamatan di Kabupaten Penajam Paser Utara	13
TABEL 2.2	Penggunaan Lahan Kabupaten Penajam Paser Utara 2007-2009	15
TABEL 2.3	Banyaknya Curah Hujan Menurut Pos Pengamatan per Bulan	17
TABEL 2.4	Banyaknya Penduduk Kabupaten PPU Menurut Jenis Kelamin Tahun 2002-2010	18
TABEL 2.5	Banyaknya Penduduk Kabupaten PPU Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Tahun 2010	20
TABEL 2.6	Kepadatan Penduduk PPU per Kecamatan Th. 2010	21
TABEL 2.7	Struktur Penduduk Kabupaten PPU Berdasarkan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Pada Tahun 2009	21
TABEL 2.8	Jumlah, Sex Ratio dan Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara.....	22
TABEL 2.9	Pencari Kerja Menurut Kelompok Umur yang Belum Ditempatkan pada Akhir Tahun 2009	23
TABEL 2.10	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2008-2009	23
TABEL 2.11	Perbandingan IPM Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2009 ...	24
TABEL 2.12	Jumlah dan Prosentase Penduduk Miskin Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2005-2006	26
TABEL 2.13	Jumlah Kepala Keluarga Miskin Penerima BLT Kabupaten PPU Tahun 2006	26
TABEL 2.14	Tabel Uji Metode Trend Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2002-2007	28
TABEL 2.15	Proyeksi Penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2009-2029	29
TABEL 2.16	Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan, Kondisi, Kelas dan Status Jalan di Kabupaten Penajam Paser Utara	30
TABEL 2.17	Standar Pelayanan Minimal Jalan	31
TABEL 2.18	Jumlah Barang/Penumpang yang Diangkut oleh Angkutan Penyeberangan dan Rata-rata Tarif Angkut Tahun 2007.....	34
TABEL 2.19	Perhitungan Kebutuhan Air Bersih di Kabupaten Penajam Paser Utara Sampai dengan tahun 2029	36
TABEL 2.20	Perhitungan Kebutuhan Listrik Kabupaten Penajam Paser Utara	38
TABEL 2.21	Kapasitas Telekomunikasi di Kabupaten Penajam Paser Utara.....	39
TABEL 2.22	Ketentuan Pembangunan Tower Telekomunikasi Kabupaten PPU ...	40

TABEL 2.23	Data Perkembangan Pendidikan Kabupaten PPU tahun 2009	41
TABEL 2.24	Rasio Kecukupan Sarana dan Prasarana Pendidikan SD	42
TABEL 2.25	Rasio Kecukupan Sarana dan Prasarana Pendidikan SLTP/MTs	43
TABEL 2.26	Rasio Kecukupan Sarana dan Prasarana Pendidikan SMU/SMK/MA	44
TABEL 2.27	Perhitungan Kebutuhan Sarana Pendidikan di Kabupaten Penajam Paser Utara	45
TABEL 2.28	Banyaknya Fasilitas Puskesmas Menurut Jenis dan Kecamatan	46
TABEL 2.29	Tenaga, Sarana, dan Prasarana Kesehatan di Kabupaten PPU Tahun 2003-2007	46
TABEL 2.30	Derajat Kesehatan Penduduk Kabupaten PPU Tahun 2003-2007 ...	47
TABEL 2.31	Perhitungan Kebutuhan Sarana Kesehatan	48
TABEL 2.32	Banyaknya Pasar dan Pedagang Menurut Kecamatan	48
TABEL 2.33	Banyaknya Koperasi dan Jumlah anggota per Kecamatan	49
TABEL 2.34	Banyaknya Koperasi Menurut Jenisnya Tahun 2009	49
TABEL 2.35	Kawasan Pusat-Pusat Pertumbuhan di Kabupaten Penajam Paser Utara	52
TABEL 2.36	Arahan Fungsi Kawasan Pusat-Pusat Pertumbuhan Di Kabupaten Penajam Paser Utara	53
TABEL 2.37	Rencana Kebutuhan Sarana dan Prasarana di Pusat-pusat Pertumbuhan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2012	54
TABEL 2.38	Rencana Penetapan Wilayah Pembangunan (WP) Di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2003-2012	58
TABEL 2.39	Rencana pola pemanfaatan ruang wilayah Kab. Penajam Paser Utara	60
TABEL 2.40	Perkembangan dan Laju Pertumbuhan PDRB DENGAN MIGAS Tahun 2000 – 2009 (Juta Rupiah)	66
TABEL 2.41	Perkembangan Dan Laju Pertumbuhan PDRB TANPA MIGAS Tahun 2000 – 2009 (Juta Rupiah)	67
TABEL 2.42	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten PPU Tahun 2004-2009	68
TABEL 2.43	Struktur Ekonomi Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2002 - 2009 (%) (Kontribusi NTB Sektoral Terhadap PDRB ADHB)	72
TABEL 2.44	PDRB Perkapita Dan Pendapatan Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Dan Konstan, Dengan Migas Tahun 2000 – 2009 (Juta Rupiah)	74
TABEL 2.45	PDRB Perkapita Dan Pendapatan Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Dan Konstan, Tanpa Migas Tahun 2000 – 2009 (Juta Rupiah)	74
TABEL 2.46	Luas Panen Dan Produksi Padi Menurut Kecamatan Tahun 2005-2009	76

TABEL 2.47	Luas Panen Dan Produksi Palawija Menurut Kecamatan Tahun 2009 (ton)	76
TABEL 2.48	Luas Panen, Produksi Dan Produktivitas Sayuran Semusim Tahun 2009	77
TABEL 2.49	Banyaknya Petani, Produksi Dan Produktivitas Tanaman Perkebunan Tahun 2009	78
TABEL 2.50	Luas Areal dan Produksi Tanaman Perkebunan Rakyat Per-Kecamatan di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2009-2009..	79
TABEL 2.51	Populasi Ternak Per-kecamatan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2009	80
TABEL 2.52	Produksi Perikanan Menurut Kecamatan (Ton) Tahun 2006-2009 ..	82
TABEL 2.53	Banyaknya Perusahaan Menurut Kecamatan Tahun 2007	85
TABEL 2.54	Banyaknya Tenaga Kerja Perusahaan Menurut Kecamatan Tahun 2009	86
TABEL 2.55	Perhitungan Kebutuhan Listrik Kabupaten Penajam Paser Utara	91
TABEL 2.56	Rencana Ketentuan Pembangunan Tower Telekomunikasi Kabupaten Penajam Paser Utara	92
TABEL 3.1	PDRB Penajam Paser Utara Atas Dasar Harga Berlaku.....	173

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1.1	Alur Perencanaan dan Penganggaran	8
GAMBAR 2.1	Peta Wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara	14
GAMBAR 2.2	Perkembangan Jumlah Penduduk.....	19
GAMBAR 2.3	Piramida Penduduk Kabupaten Penajam Utara	19
GAMBAR 2.4	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan	20
GAMBAR 2.5	Grafik Perbandingan IPM PPU Dengan Kaltim dan Nasional	25
GAMBAR 2.6	Kondisi Jalan Beraspal.....	30
GAMBAR 2.7	Terminal Penajam.....	33
GAMBAR 2.8	Pelabuhan Feri di Penajam	34
GAMBAR 2.9	Diagram Rencana Pola Pemanfaatan Ruang Kab.Penajam Paser Utara	60
GAMBAR 2.10	Peta Penggunaan Lahan di Kabupaten Penajam Paser Utara	61
GAMBAR 2.11	Grafik PDRB Kab. Penajam Paser Utara Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan 2000, Dengan Migas Tahun 2000-2009...	66
GAMBAR 2.12	Grafik PDRB Kab. Penajam Paser Utara Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan 2000, Tanpa Migas Tahun 2000-2009.....	67
GAMBAR 2.13	Grafik Laju Pertumbuhan PDRB Kab. Penajam Paser Utara Atas Dasar Harga Konstan 2000, Tahun 2001-2009	68
GAMBAR 2.14	Grafik Kontribusi NTB Sektor Terhadap PDRB Kab. Penajam Paser Utara Tahun 2009.....	72
GAMBAR 2.15	Grafik PDRB Perkapita da Pendapatan Perkapita Kabupaten PPU ADHB Dengan Migas Tahun 2000-2009	74
GAMBAR 2.16	Grafik PDRB Perkapita da Pendapatan Perkapita Kabupaten PPU ADHB Tanpa Migas Tahun 2000-2009.....	75

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur patut kita panjatkan ke Hadirat Allah SWT, karena atas Limpahan Rahmat dan HidayahNya Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2005 – 2025 dapat selesai.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2005 – 2025 disusun mengacu pada RPJP Nasional 2005-2025 yang telah ditetapkan sebagai Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 serta RPJPD Provinsi Kalimantan Timur 2005 – 2025.

RPJP Daerah merupakan dokumen perencanaan untuk periode 20 tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang daerah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, selanjutnya diterjemahkan ke dalam Rencana Strategis setiap Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Renstra SKPD) dan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Penyusunan RPJP Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara 2005-2025 dilakukan secara komprehensif, terpadu dan menyeluruh, serta mengedepankan keterlibatan masyarakat secara partisipatif dengan mempertimbangkan dan menampung aspirasi pemangku kepentingan.

Kami sadari bahwa penyusunan RPJPD ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu diharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna penyempurnaan penyusunan buku ini ucapan terima kasih dan penghargaan

kepada semua pihak terkait yang telah banyak membantu dalam penyusunan RPJPD ini.

Besar harapan kami bahwa Dokumen RPJPD Kabupaten Penajam Paser Utara ini dapat dilaksanakan secara konsisten, terintegrasi, terpadu dan transparan melalui koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan pembangunan guna mencapai visi, misi pemerintah daerah dan pada akhirnya mewujudkan kesejahteraan rakyat Penajam Paser Utara.

Penajam, 19 April 2012

Bupati Penajam Paser Utara

Ttd

H. Andi Harahap, S.Sos.

BAB I

PENDAHULUAN



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Pengantar

Dalam era globalisasi, akses informasi yang semakin luas dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi menjadikan daerah-daerah dimanapun di belahan dunia dalam posisi saling berhubungan dan bersaing dalam merebutkan ruang dan kesempatan yang lebih menguntungkan untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya di masa mendatang. Ini berarti bahwa setiap daerah harus berjuang untuk mendapatkan posisi yang lebih kondusif dalam hubungan interaksi dan persaingan antar daerah dan antar negara di dunia agar mendapatkan posisi yang relatif lebih unggul dalam percaturan hubungan antar daerah maupun antar negara baik di bidang ekonomi, politik maupun sosial budaya dalam menunjang usaha memakmurkan kehidupan rakyatnya.

Dalam rangka memperjuangkan posisi yang relatif menguntungkan atau memiliki nilai *Competitive advantage* itulah mutlak diperlukan adanya strategi yang direncanakan dengan baik. Sebab dalam era globalisasi dimana akan ditandai dengan aspirasi masyarakat yang semakin tinggi terhadap harga diri, kesejahteraan, kemakmuran, dan kebahagiaan, tingkat mobilitas masyarakat antar daerah dan antar negara yang semakin tinggi, dan serta semakin meluasnya fenomena budaya (media) massa, apabila daerah dan pemerintahnya kehilangan nilai *competitive advantage* dapat mendorong warganya dari kalangan kelompok strategis (misalnya, kelompok usia muda, kelompok berpenghasilan lebih baik, kelompok wirausaha, kelompok berpendidikan lebih tinggi dan kelompok strategis yang lain) bermigrasi meninggalkan daerah yang lebih memiliki nilai kompetitif, apalagi bila didukung dengan infrastruktur komunikasi dan transportasi yang memudahkan. Jika kelompok warga yang bermigrasi tersebut mencapai jumlah yang signifikan akan dapat menjadi ancaman terhadap keberlangsungan pembangunan daerah itu sendiri.

Perubahan pada arah dan kebijakan pembangunan telah berlangsung sejak era reformasi sebelas tahun terakhir, yaitu berupa pengurangan peran Pemerintah Pusat dan peningkatan peran Pemerintah Daerah dalam perencanaan, pembiayaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Perubahan tersebut tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 22 tahun 1999 yang kemudian disempurnakan dengan UU Nomor 32 tahun 2004 dan diperbaharui melalui UU Nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah dan dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Seiring berlakunya Undang-undang tersebut, maka setiap Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota) dituntut untuk mampu mengidentifikasi keunggulan komparatif (*comparative advantages*) wilayahnya. Keunggulan komparatif wilayah tersebut untuk selanjutnya harus dapat diarahkan dan dipadukan, serta dikembangkan secara terencana, sehingga tercapai pengembangan wilayah yang optimal, yang tercermin dari luasnya kesempatan kerja dan berusaha, serta adanya insentif ekonomi yang menguntungkan bagi berbagai pelaku ekonomi.

Daerah memiliki kewenangan dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki. Pendekatan yang digunakan dalam merencanakan pembangunan adalah melalui perencanaan partisipatif dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat sebagai *stakeholders*. Dengan demikian, wujud perencanaan pembangunan daerah merupakan perpaduan antara perencanaan yang bersifat *top-down* dan *bottom-up*. Perencanaan disusun berdasarkan kajian teknokratis yaitu secara akademis berdasarkan dengan mempertimbangkan kebijakan politik pembangunan yang mengarahkan pada pembangunan yang mensejahterakan masyarakat umum.

Dalam undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dalam pasal 3 ayat 1,2 dan 3 menyatakan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang

meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga dan perencanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Sedangkan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana dimaksud di atas menghasilkan:

- a. Rencana pembangunan jangka panjang;
- b. Rencana pembangunan jangka menengah; dan
- c. Rencana pembangunan tahunan.

Dalam Pengertian umum dijelaskan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Selanjutnya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. Sedangkan Rencana Pembangunan Tahunan Nasional, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah (RKP), adalah dokumen perencanaan Nasional untuk periode 1 (satu) tahun dan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

RPJP Nasional merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan Nasional. RPJP Daerah memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional. (UU 25: 4-5). Selanjutnya dinyatakan bahwa Rancangan RPJP Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan rancangan RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan utama bagi Musrenbang. (UU 25:10(2)) Musrenbang diselenggarakan dalam rangka menyusun RPJP dan diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara Negara dengan mengikutsertakan masyarakat. (UU

25:11(1). Landasan hukum utama lainnya dalam membuat tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah di atur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Sebagai amanat UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka setiap Pemerintah Daerah diharuskan menyusun rencana pembangunan yang sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan keunggulan komparatif wilayah dan kemampuan sumberdaya keuangan daerah. Berbagai dokumen perencanaan yang diamanatkan Undang-undang tersebut untuk segera disusun adalah: Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD), Rencana Pembangunan Tahunan Daerah atau disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah atau disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD). Berdasarkan UU No. 25 Tahun 2004 Pasal 33 ayat (1) Bahwa Kepala Daerah menyelenggarakan dan bertanggungjawab atas pembangunan Daerah di daerahnya. RPJP Daerah merupakan dokumen perencanaan untuk periode 20 tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang daerah yang mengacu kepada RPJP Nasional. Sementara, RPJM Daerah merupakan dokumen perencanaan untuk periode lima tahun yang memuat penjabaran visi, misi dan program kerja Kepala Daerah terpilih (Bupati dan Wakil Bupati) selama lima tahun masa jabatannya.

Apabila diperhatikan uraian yang terkait dengan perencanaan jangka panjang tersebut di atas menyiratkan bahwa dalam penyusunan RPJPD Daerah, keterlibatan masyarakat dalam musrenbang daerah bukan ditujukan untuk mengubah tujuan rencana dalam RPJPD daerah yang telah merujuk RPJP nasional yang merupakan penjabaran logis dari maksud tujuan pendirian negara Republik Indonesia yang telah termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang bersifat relatif baku, akan tetapi lebih diarahkan pada penyesuaian

sasaran-sasaran RPJP daerah dengan kondisi dan aspirasi masyarakat daerah. Ini Berarti bahwa partisipasi masyarakat dalam musrenbangda untuk menyusun RPJP yang berisikan visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang telah disusun rancangannya mengacu RPJP nasional hanya dapat mempengaruhi konteks lokalitas, relevansinya dengan kondisi, kapasitas dan aspirasi masyarakat daerah serta penyusunan alternatif-alternatif skenario strategi di dalamnya. Dengan kata lain, partisipasi masyarakat dalam penyusunan RPJP daerah hanya dapat berperan untuk membentuk “wajah daerah” pada RPJP Nasional yang terkait pola pikir, kondisi sosial ekonomi dan budaya, serta karakter lingkungan alamiahnya. Dengan demikian, RPJP daerah disusun kearah penguatan peran daerah dalam menunjang pencapaian tujuan RPJP nasional.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Penajam Paser Utara merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang yang memuat visi, misi dan arah pembangunan di daerah untuk 20 tahun ke depan. Dalam penyusunannya, RPJPD mengacu pada RPJP Nasional 2005-2025 yang telah ditetapkan sebagai Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 serta RPJPD Provinsi Kalimantan Timur 2005 – 2025.

RPJPD Kabupaten Penajam Paser Utara ini menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah yang berdimensi waktu lima tahunan untuk selanjutnya diterjemahkan ke dalam Rencana Strategis setiap Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Renstra SKPD) dan kemudian dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berdimensi tahunan. Dalam penyusunannya, RPJP Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara 2005-2025 dilakukan secara komprehensif, terpadu dan menyeluruh, serta mengedepankan keterlibatan masyarakat secara partisipatif dengan mempertimbangkan dan menampung aspirasi pemangku kepentingan.

Penetapan visi dan misi pembangunan selain mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh norma dan nilai yang diusulkan bersama oleh seluruh pemangku kepentingan juga memperhitungkan kondisi saat ini, potensi, isu strategis yang perlu diatasi, serta perkiraan masa depan dalam dua puluh tahun mendatang.

Strategi, arah kebijakan, skenario dan tahapan pembangunan selanjutnya dirumuskan secara komprehensif, efektif dan efisien guna menjamin kesinambungan dan keberlangsungan pembangunan jangka panjang (20 tahunan/RPJP), jangka menengah (5 tahunan/RPJM-Renstra) dan jangka pendek (1 tahunan/RKPD). Dengan demikian penyusunan RPJPD Kabupaten Penajam Paser Utara sangat penting dalam menentukan arah pembangunan di Kabupaten Penajam Paser Utara.

1.2 Maksud dan Tujuan

RPJP Daerah ini disusun dengan maksud untuk memberikan acuan dan dasar hukum bagi pembangunan jangka panjang daerah dalam 20 tahun mendatang. Selain itu, penyusunan RPJP Daerah juga dimaksudkan untuk menjamin terjadinya keterpaduan dan kesinambungan pembangunan yang berkelanjutan dalam jangka panjang sesuai dengan kondisi dan karakteristik daerah dalam mewujudkan visi, misi, dan arah pembangunan yang disepakati bersama.

RPJP Daerah disusun dengan tujuan untuk memberikan arah dan acuan bagi para calon Kepala Daerah dalam menyusun program kerja yang akan disampaikan pada masa pemilihan Kepala Daerah. Selain itu, RPJP Daerah disusun dengan tujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan daerah; menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar waktu, antar fungsi pemerintah daerah dan pusat; mengoptimalkan partisipasi masyarakat; menjamin tercapainya penggunaan sumber daya yang efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan; serta menjaga kesinambungan pembangunan daerah yang dilaksanakan dalam waktu lima tahunan.

Pembangunan Kabupaten Penajam Paser Utara yang menjadi bagian tak terpisahkan dari pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan serta kesatuan daerah dan menunjang kemajuan serta kesatuan nasional.

Rencana yang termuat di dalam RPJPD Kabupaten Penajam Paser Utara merupakan rencana jangka panjang daerah dari semua aspek pembangunan yang akan dilaksanakan dengan memperhatikan kemungkinan adanya penyempurnaan sesuai perkembangan dan perubahan yang terjadi di Kabupaten Penajam Paser Utara.

1.3 Landasan Hukum

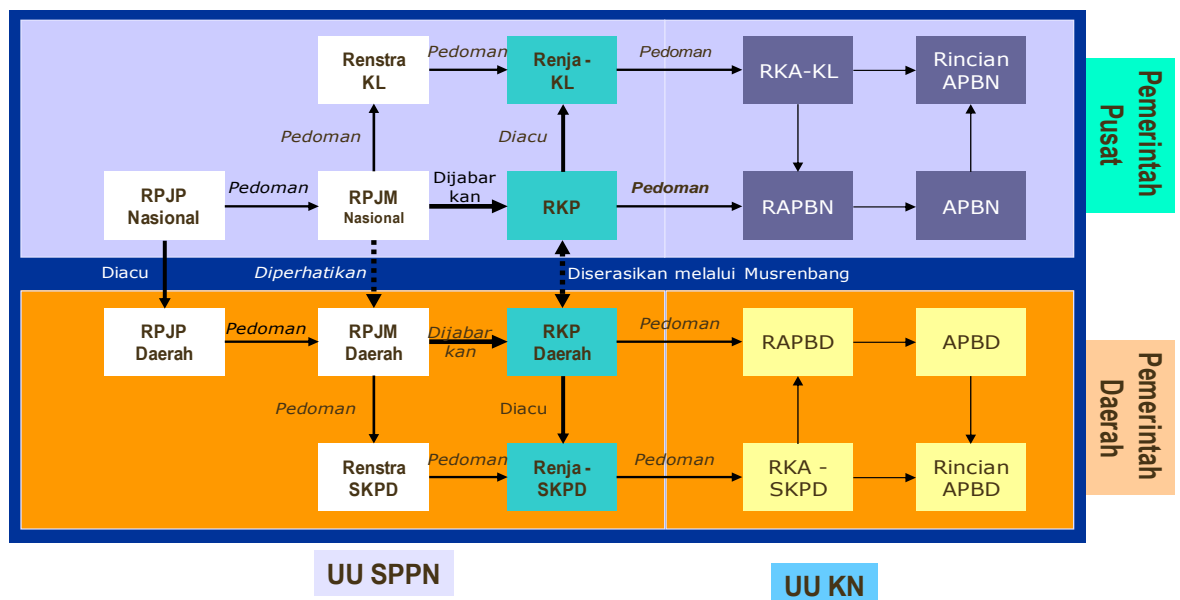
Penyusunan RPJP Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2005-2025 didasarkan pada Pancasila sebagai Landasan Idiil, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Landasan Konstitusional dan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan perencanaan sebagai landasan operasional, yaitu:

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2004. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2007);

8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010;
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan timur Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008);
11. Undang-undang Nomor 7 tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2002)

1.4 Hubungan RPJPD dan Dokumen Perencanaan Lainnya

Hubungan RPJPD dengan dokumen perencanaan lainnya tergambarkan dalam gambar 1 Alur Perencanaan dan Penganggaran.



Gambar 1.1 Alur Perencanaan dan Penganggaran

Alur perencanaan dan penganggaran tersebut dapat dijabarkan dalam hubungan-hubungan dengan dokumen perencanaan lainnya seperti dengan RPJP Nasional, RPJP Provinsi Kalimantan Timur dan perencanaan lainnya seperti di bawah ini:

1. Hubungan RPJPD Kabupaten Penajam Paser Utara dengan RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi Kalimantan Timur

Penyusunan RPJPD Kabupaten Penajam Paser Utara mengacu kepada visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan yang tercantum dalam RPJP Nasional dan RPJPD Kalimantan Timur termasuk penetapan jangka waktu dan tahapan pembangunan lima tahunan.

2. Hubungan RPJPD Kabupaten Penajam Paser Utara dan RPJMD

RPJPD Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai pedoman dalam penyusunan visi, misi dan program calon Kepala Daerah, serta menjadi acuan bagi Kepala Daerah terpilih dalam menyusun strategi dan arah kebijakan, program dan kegiatan RPJMD. RPJPD Kabupaten Penajam Paser Utara juga menjadi pedoman penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah, swasta, dan segenap warga masyarakat menuju pada pelaksanaan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggungjawab.

3. Hubungan RPJPD Kabupaten Penajam Paser Utara dengan RTRW Provinsi Kalimantan Timur dan RTRW Kabupaten Penajam Paser Utara

RPJP Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara memuat arah kebijakan pembangunan yang akan dilaksanakan dalam wilayah administrasi Kabupaten Penajam Paser Utara dengan memanfaatkan seluruh ruang daratan, lautan dan udara. Dalam kebijakan rencana penataan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang wilayah tetap mengacu pada RTRW Provinsi Kalimantan Timur dan RTRW Kabupaten Penajam Paser Utara. Dengan demikian RPJPD Kabupaten Penajam Paser Utara tidak dapat dipisahkan dari Rencana Tata Ruang Wilayah provinsi Kalimantan Timur dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara.

1.5 Tata Urut

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2005 -2025 disusun dalam sistematika sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan

Memuat pengertian RPJPD Kabupaten Penajam Paser Utara, proses penyusunan, maksud dan tujuan serta sasaran penyusunan RPJPD Kabupaten Penajam Paser Utara, landasan hukum, hubungan RPJPD Kabupaten Penajam Paser Utara dengan Dokumen Perencanaan Lainnya, dan sistematika penulisan.

2. Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah

Gambaran umum kondisi daerah menjelaskan gambaran umum dan kondisi saat ini, perkiraan masa depan dalam berbagai aspek pembangunan

3. Bab III Analisis Isu – isu Strategis

Menjelaskan beberapa isu-isu strategis yang menjadi prioritas pembangunan jangka panjang daerah.

4. Bab IV Visi dan Misi dan Arah Kebijakan Pembangunan daerah

Menjelaskan visi pembangunan daerah atau keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan jangka panjang daerah, dan misi pembangunan daerah atau upaya-upaya yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi. Dalam bab ini dijelaskan pula arah kebijakan pembangunan daerah serta pentahapan pembangunan pada jangka menengah yang berisi fokus dan prioritas pembangunan.

5. Bab V Arah Kebijakan

Menjelaskan arah kebijakan daerah yang menguraikan kebijakan pencapaian visi dan misi disertai dengan pentahapan RPJPD Penajam Paser Utara hingga 25 tahun mendatang

6. Bab VI Kaidah Pelaksanaan

Menjelaskan kaidah pelaksanaan RPJPD Penajam Paser Utara agar pada pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan arahan pembangunan dalam jangka panjang dan didukung oleh seluruh stakeholder pembangunan

7. Bab VII Penutup

Menguraikan RPJPD Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta menjadi koridor dalam penyusunan visi, misi dan program calon Kepala Daerah dan pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (rencana pembangunan lima tahunan) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (rencana pembangunan tahunan).

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH



BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. GAMBARAN UMUM

Kabupaten Penajam Paser Utara merupakan salah satu kabupaten yang masuk dalam wilayah Propinsi Kalimantan Timur. Usia kabupaten ini tergolong masih sangat muda. Kabupaten ini terbentuk pada tahun 2002. Pembentukan Kabupaten ini sebagai pemekaran dari wilayah Kabupaten Pasir. Luas wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara adalah sebesar 333.306 Ha. Wilayahnya mencakup 4 (empat) kecamatan terdiri atas 30 desa dan 24 kelurahan. Selama periode tahun 2003-2009, penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara meningkat dari 118.965 jiwa pada akhir tahun 2003 menjadi 137.165 jiwa pada akhir tahun 2009.

Sebagai Kabupaten baru yang usianya masih sangat muda, Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki banyak agenda yang perlu segera dilakukan. Beberapa agenda tersebut diantaranya adalah kegiatan dalam menata administrasi pemerintahan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara efektif, efisien dan berkeadilan. Selain itu, agenda yang lain yaitu pengadaan infrastruktur pemerintahan. Hal tersebut mengingat bahwa infrastruktur pemerintahan masih sangat terbatas, baik dilihat dari kelengkapan lembaga, jumlah personil, gedung perkantoran maupun sarana administrasi. Beberapa hal tersebut sudah sepatutnya menjadi agenda utama yang perlu segera dipenuhi dalam menjalankan kegiatan pelayanan masyarakat yang berkualitas.

Meskipun usia Kabupaten Penajam Paser Utara masih tergolong sangat muda akan tetapi potensi-potensi yang dimiliki tidak bisa hanya dipandang sebelah mata. Potensi-potensi tersebut meliputi potensi Sumber Daya Alam (SDA) dan potensi Sumber Daya Manusia (SDM). Potensi SDA tersebut mencakup dari berbagai bidang baik bidang pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, penggalian dan pertambangan. Kemudian untuk potensi SDM diketahui bahwa lebih dari

50 % dari total jumlah penduduk di Kabupaten Penajam Paser Utara merupakan penduduk di usia produktif. Selain itu potensi di sektor pariwisata, industri dan perdagangan juga tidak bisa dikesampingkan begitu saja. Beberapa hal yang dimiliki oleh Kabupaten tersebut menjadi modal yang besar dalam menyelenggarakan pembangunan dengan berbagai tantangan yang akan dihadapi. Meskipun tantangan menjadi semakin berat untuk ke depannya, tidak menjadi mimpi bagi Kabupaten Penajam Paser Utara untuk mewujudkan visinya yaitu **“Terwujudnya Kabupaten Penajam Paser Utara yang Berakhlak Baik, Mandiri, Sehat dan Sejahtera Berbasis Pada Ekonomi Kerakyatan”**

2.1.1. Kondisi Fisik Dasar Wilayah

Kabupaten Penajam Paser Utara merupakan bagian integral dari wilayah Propinsi Kalimantan Timur yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur. Secara administratif pemerintahan terbagi dalam 4 kecamatan, 24 kelurahan dan 30 desa sebagaimana dapat dilihat dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1
Jumlah Desa, Kelurahan dan Kecamatan
di Kabupaten Penajam Paser Utara

No	Kecamatan	Kelurahan	Desa	Luas Wilayah (Km ²)
1	Babulu	0	12	399,45
2	Waru	1	3	553,88
3	Penajam	19	4	1.207,37
4	Sepaku	4	11	1.172,36
Jumlah		24	30	3.333,06

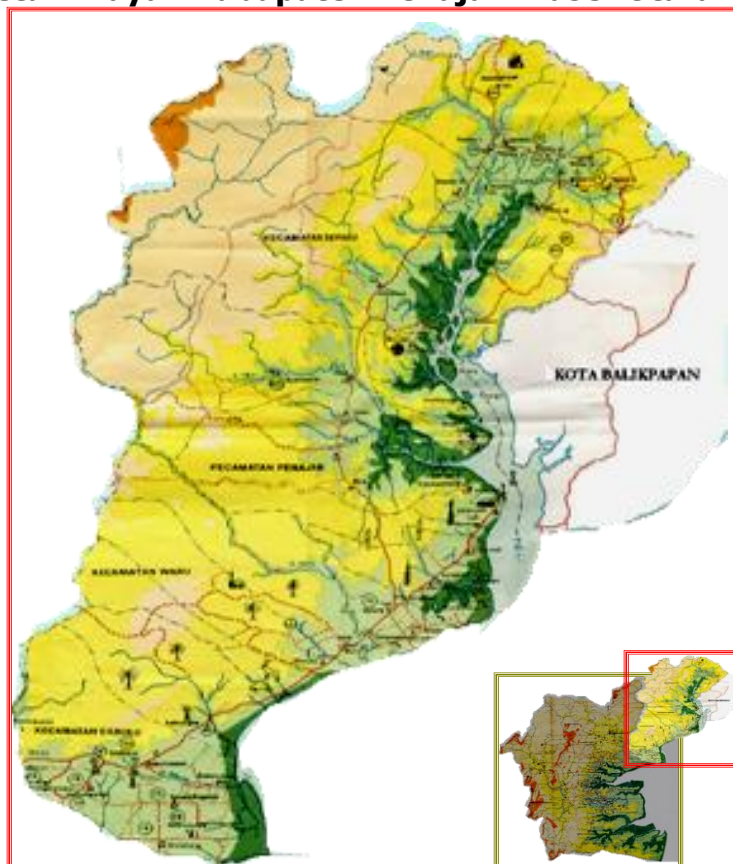
Sumber Data: BPMD Kabupaten Penajam Paser Utara

Wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara terletak antara 00°48'29" – 01°36'37" Lintang Selatan dan 116°19'30 - 116°56'35" Bujur Timur. Mencakup 4 (empat) Wilayah Kecamatan, yaitu Kecamatan Babulu, Kecamatan Waru, Kecamatan Penajam, dan Kecamatan Sepaku.

Sedangkan batas-batas wilayah administrasi Kabupaten Penajam Paser Utara adalah sebagai berikut.

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Kecamatan Loa Kulu dan Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kertanegara
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Kecamatan Samboja Kota Balikpapan dan Selat Makasar
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Kecamatan Bongan Kabupaten Kutai Barat dan Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser

Gambar 2.1
Peta Wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara



Sumber Data : BAPPEDA Kabupaten Penajam Paser Utara

2.1.2. Luas Wilayah dan Tata Guna Tanah

Luas wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara adalah sebesar 333.306 Ha. Luas wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara terbagi ke dalam empat kecamatan dengan rincian sebagai berikut:

- a) Kecamatan Babulu, seluas 399,45 Ha (11,98 %)
- b) Kecamatan Waru, seluas 553,88 Ha (16,62 %)
- c) Kecamatan Penajam, seluas 1207,37 Ha (36,22 %)
- d) Kecamatan Sepaku, seluas 1172,36 Ha (35,17 %)

Dilihat dari tata guna tanah menunjukkan bahwa lahan yang diusahakan untuk kegiatan pertanian mencakup areal seluas 19.302 Ha dari total luas wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara. Areal pertanian meliputi: lahan sawah seluas 8.038 Ha (2,41%), pertanian lahan kering 9.657 Ha (2,90%), kolam/tambak 2.196 Ha (0,66%), pertambangan 242 Ha (0,07%) sedangkan untuk perkebunan 29.130 Ha (8,74%). Hutan Lebat 1.106 Ha (0,33%), hutan belukar 163.131 Ha (48,94%), hutan sejenis 27.960 Ha (8,39%), hutan rawa 2.744 Ha (0,82%) dan semak belukar 63.428 Ha (19,03%). Kawasan terbangun meliputi permukiman 3.547 Ha (1,06%) dan Industri 90 Ha (0,09%)

Tabel 2.2
Penggunaan Lahan
Kabupaten Penajam Paser Utara 2007-2009

Jenis Penggunaan Tanah	Luas (Ha)		
	2007	2008x)	2009x)
1. Pemukiman	2.808	2.808	2.808
2. Sawah	4.715	4.715	4.715
3. Pertanian Tanah Kering	10.740	10.740	10.740
4. Perkebunan	12.217	12.217	12.217
5. Kolam/Tambak	709	709	709
6. Industri	290	290	290
7. Pertambangan	48	48	48
8. Hutan Lebat	188.175	188.175	188.175
9. Hutan Belukar	50.075	50.075	50.075
10. Hutan Sejenis	15.253	15.253	15.253
11. Hutan Rawa	2.400	2.400	2.400
12. Semak Belukar	18.320	18.320	18.320
13. Lain-lain	7.556	7.556	7.556
Jumlah/Total	313.560	313.560	313.560

Sumber Data: Kabupaten Penajam Paser Utara Dalam Angka Tahun 2010

2.1.3. Topografi dan Iklim

Wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara terdiri dari wilayah daratan dan perairan laut. Wilayah perairan laut terbesar di tiga kecamatan yaitu kecamatan Babulu, Waru dan Penajam dimana ketiga kecamatan tersebut berbatasan langsung dengan Selat Makassar. Tinjauan dari aspek hidrologi terhadap Kabupaten Penajam Paser Utara menunjukkan bahwa keberadaan sistem drainase yang belum memadai menyebabkan banyaknya daerah genangan berupa rawa-rawa. Sementara itu, di beberapa wilayah pesisir terjadi kecenderungan meningkatnya abrasi pantai oleh air laut. Karena itu untuk menjaga kelestarian ekosistem wilayah pesisir, maka pengelolaan hutan bakau (*mangrove*) perlu mendapat perhatian yang serius dari pemerintah daerah dan masyarakat setempat.

Berdasarkan kajian data iklim pada masing-masing kecamatan dapat diketahui bahwa rata-rata hari hujan di Kabupaten Penajam Paser Utara adalah sebanyak 10 hari perbulan dengan curah hujan rata-rata sebesar 230 mm per bulan. Sedangkan curah hujan di atas 300 mm perbulan terjadi antara bulan Desember sampai dengan Februari. Curah hujan sebesar 100 – 300 mm per bulan pada umumnya terjadi pada bulan Maret sampai bulan juni, dan pada bulan Juli sampai bulan Oktober.

Kondisi iklim di wilayah Propinsi Kalimantan Timur menunjukkan bahwa karakteristik iklim di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara termasuk wilayah iklim *tropika humida*. Temperatur udara rata-rata sebesar 26⁰C dengan perbedaan temperatur pada waktu siang dan malam berkisar antara 5⁰-7⁰C. Temperatur minimum terjadi antara bulan Oktober sampai bulan Agustus, Berdasarkan pembagian iklim di wilayah Kalimantan Timur, iklim Kabupaten Penajam Paser Utara termasuk zone 1 dengan rata-rata curah hujan berkisar antara 1800 sampai 2000 mm/tahun dengan rata-rata tahunan 1963 mm/tahun. Berdasarkan kriteria Oldeman Kabupaten ini termasuk dalam zone iklim E1 dan E2 seperti dalam tabel berikut :

Tabel 2.3
Banyaknya Curah Hujan Menurut Pos Pengamatan per Bulan

Bulan	Babulu	Waru	Penajam	Sepaku
Januari	131.6	84	83	220
Februari	279.0	193	213	350
Maret	229.8	221	250	237
April	374.0	125	164	262
Mei	29.4	53	124	105
Juni	188.2	211	354	100
Juli	227.6	401	353	219
Agustus	182.4	454	343	127
September	135.4	142	195	136
Oktober	255.0	263	306	395
Nopember	552.6	296	204	189
Desember	131.6	312	254	234
Total	236.7	229.6	236.9	214.5

Sumber Data: Kabupaten Penajam Paser Utara Dalam Angka Tahun 2010

2.2. KEPENDUDUKAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) merupakan seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar. Hambatan kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, keterbelakangan atau keterasingan, kekumuhan, korban tindak kekerasan, kerentanan sosial dan kondisi atau perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung atau menguntungkan seperti kejadian bencana alam.

2.2.3. Kependudukan

Selama periode tahun 2002-2010, penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara meningkat dari 111.420 jiwa pada akhir tahun 2002 menjadi 142.922 jiwa pada akhir tahun 2010. Sedangkan angka-angka statistik secara terperinci tentang penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara dapat dilihat pada tabel berikut.

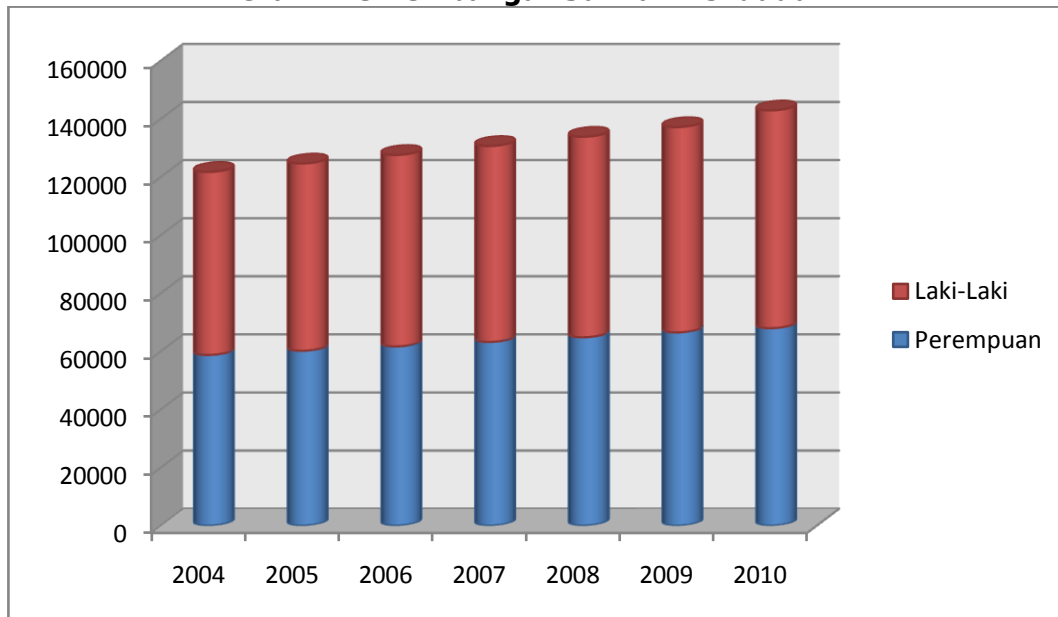
Tabel 2.4
Banyaknya Penduduk Kabupaten PPU Menurut Jenis Kelamin Tahun 2002-2010

No	Tahun	Laki-laki		Perempuan		Jumlah
		Jiwa	%	Jiwa	%	
1	2003	61.600	51,78	57.365	48,22	118.965
2	2004	62.981	51,73	58.757	48,27	121.738
3	2005	64.441	51,69	60.200	48,31	124.611
4	2006	65.892	51,65	61.694	48,35	127.586
5	2007	67.426	51,53	63.242	48,47	130.668
6	2008	69.013	51,56	64.846	48,44	133.859
7	2009	70.657	51,51	66.508	48,49	137.165
8	2010	74.951	52,44	67.971	47,56	142.922

Sumber: BPS Kabupaten Penajam Paser Utara

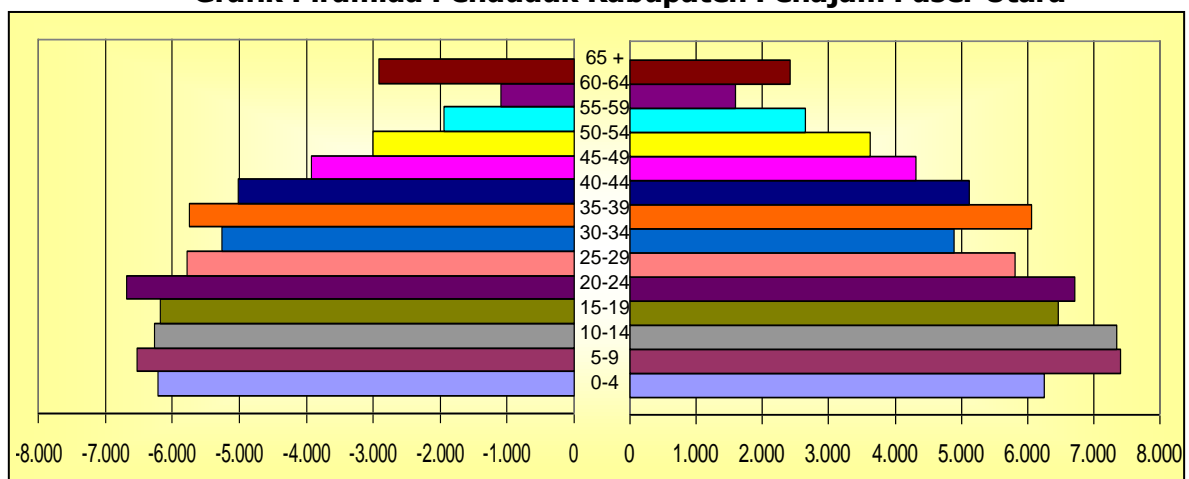
Penduduk pada akhir tahun 2010 sebesar 142.165 jiwa terdiri dari 74.951 penduduk laki-laki dan 67.971 penduduk perempuan dengan persentase pertumbuhan 2,68 %. Rasio jenis kelamin penduduk pada tahun 2010 di Kabupaten Penajam Paser Utara tercatat lebih besar dari angka 100 yaitu 110,27 yang artinya penduduk perempuan lebih sedikit dibanding penduduk laki-laki. Proporsi penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara dapat dilihat pada diagram berikut.

Gambar 2.2
Grafik Perkembangan Jumlah Penduduk



Sumber Data BPS Kabupaten Penajam Paser Utara

Gambar 2.3
Grafik Piramida Penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara



Sumber Data Kabupaten Penajam Paser Utara Dalam Angka 2010.

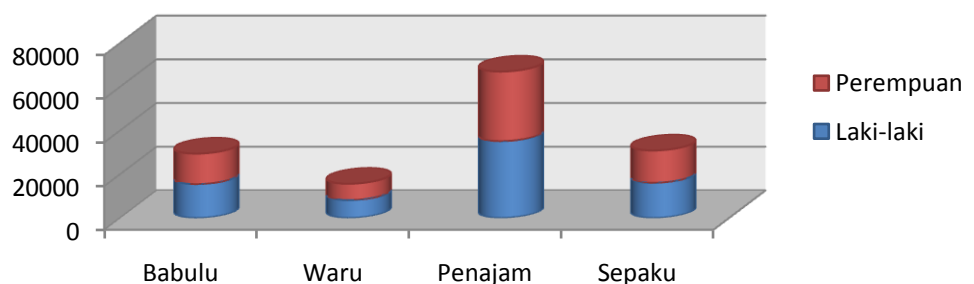
Tabel 2.5
Banyaknya Penduduk Kabupaten PPU
Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Tahun 2010

Usia (tahun)	Laki-laki (jiwa)	Perempuan (jiwa)	Jumlah Penduduk (jiwa)
0 – 4	8.342	7.661	16.003
5 – 9	7.916	7.458	15.374
10 – 14	7.351	6.783	14.134
15 – 19	6.225	5.573	11.798
20 – 24	5.757	5.451	11.208
25 – 29	7.107	6.650	13.757
30 – 34	6.638	6.156	12.794
35 – 39	5.966	5.548	11.514
40 – 44	5.414	5.057	10.471
45 – 49	4.576	3.766	8.342
50 – 54	3.423	2.705	6.128
55 – 59	2.530	1.829	4.359
60 - 64	1.411	1.217	2.628
65 - 69	974	864	1.838
70 - 74	624	627	1.251
75 +	697	626	1.323
Jumlah	74.951	67.971	142.922

Sumber: BPS Kabupaten Penajam Paser Utara

Dilihat dari aspek distribusi penduduk, sebaran penduduk di Kabupaten Penajam Paser Utara di Kecamatan Penajam sebanyak 66.983 jiwa, di Kecamatan Babulu 29.434 di Kecamatan Sepaku 30.863 jiwa, dan di Kecamatan Waru sebanyak 15.642 jiwa. Kepadatan penduduk di Kabupaten Penajam Paser Utara yang paling tinggi terdapat di Kecamatan Babulu sebesar 73,69 jiwa/km², dan terendah terdapat di Kecamatan Sepaku dengan kepadatan penduduknya 26,33 jiwa/km².

Gambar 2.4
Grafik Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan



Sumber Data : BPS Kabupaten Penajam Paser Utara

Selanjutnya dilihat dari persebaran penduduk perkecamatan maka terdapat jumlah penduduk terbesar di Kecamatan Penajam yang pada tahun 2010 mencapai 66.983 jiwa atau hampir separo dari jumlah penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara. Sedangkan wilayah dengan penduduk terpadat terdapat di Kecamatan Babulu dengan rata-rata populasi sebesar 73,69 jiwa/km²

Tabel 2.6
Kepadatan Penduduk PPU per Kecamatan Th. 2009

No.	Kecamatan	Luas areal (Ha)	Jumlah Penduduk	Rata-rata penduduk (jiwa/Km2)
1	Babulu	399,45	29.434	73,69
2	Waru	533,88	15.642	28,24
3	Penajam	1.207,37	66.983	55,48
4	Sepaku	1.172,36	30.863	26,33
Jumlah rata-rata		3.333,06	142.922	42,88

Sumber Data: BPS Kabupaten Penajam Paser Utara

Adapun struktur penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara berdasarkan tingkat pendidikan tertinggi yang bisa ditamatkan adalah seperti yang tertera pada tabel berikut ini :

Tabel 2.7
Struktur Penduduk Kabupaten PPU
Berdasarkan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan
Pada Tahun 2009

No.	Tingkat Pendidikan	Terdaftar	Ditempatkan	Belum ditempatkan	Dihapuskan
1.	Tidak Tamat SD/ Sederajat	19	3	16	-
2.	Tamat SD/ Sederajat	27	8	19	-
3.	SLTP/ Sederajat	38	16	22	-
4.	SLTA/ Sederajat	1.174	158	1.016	-
5.	Diploma I/ II, Akta I,II/Under	8	4	4	-
6.	Akademi/ Diploma III/ S. Muda	378	277	101	-
7.	Sarjana/Master Degree	201	100	100	-
	Jumlah	1.845	566	1.278	-

Sumber: Kabupaten Penajam Paser Utara Dalam Angka Tahun 2010

Jumlah penduduk, pertumbuhan penduduk, distribusi penduduk menurut umur dan jenis kelamin serta pengelompokan umur berdasarkan usia sekolah merupakan beberapa statistik penting yang diperlukan dalam

perencanaan pembangunan. Secara umum hal ini berkaitan dengan kepentingan penyusunan perencanaan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat serta rencana intervensi program dalam berbagai sektor seperti perencanaan tingkat kebutuhan pangan, kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur wilayah.

Penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara rata-rata mengalami peningkatan sebesar 0,03 persen per tahun, dari 118.965 jiwa pada tahun 2003 menjadi 142.922 jiwa pada tahun 2010. Sedangkan jika dilihat dari sisi jenis kelamin maka terdapat keseimbangan jumlah laki-laki dan perempuan.

Sejalan dengan derap langkah pembangunan sebuah daerah pemekaran maka diperkirakan pertumbuhan penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara akan lebih meningkat lebih cepat, sehubungan dengan pertumbuhan kawasan perkotaan yang menjadi daya tarik terjadinya urbanisasi. Selengkapnya jumlah penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara menurut jenis kelamin disajikan pada Tabel 2.8 berikut ini :

Tabel 2.8
Jumlah, Sex Ratio dan Pertumbuhan Penduduk
Kabupaten Penajam Paser Utara

No	Tahun	Jenis Kelamin		Jumlah	Rasio Jenis Kelamin	Pertumbuhan (%)
		Laki-Laki	Jiwa			
1	2003	61.600	57.365	118.965	107,38	2,30
2	2004	62.981	58.757	121.738	107,19	2,33
3	2005	64.441	60.200	124.611	107,00	2,36
4	2006	65.892	61.694	127.586	106,80	2,39
5	2007	67.426	63.242	130.668	106,62	2,42
6	2008	69.013	64.846	133.859	106,43	2,44
7	2009	70.657	66.508	137.165	106,24	2,47
8	2010	74.951	67.971	142.922	110,27	2,68

Sumber Data: BPS Kabupaten Penajam Paser Utara

Gambaran mengenai komposisi penduduk berdasarkan kelompok umur akan mengindikasikan produktivitas yang dihasilkan oleh suatu daerah. Produktivitas daerah yang tinggi akan ditandai dengan

keberadaan penduduk usia produktif yang cukup tinggi seimbang dengan lapangan pekerjaan yang tersedia.

Jumlah pencari kerja yang belum ditempatkan sampai dengan akhir bulan Desember 2009 sebesar 1.278 jiwa, selengkapnya jumlah pencari kerja menurut golongan umur disajikan menurut tabel berikut :

Tabel 2.9
Banyaknya Pencari Kerja
Menurut Kelompok Umur Pada Tahun 2009

No	Kelompok Umur	Terdaftar	Ditempatkan	Belum Ditempatkan	Dihapuskan
1	15 - 19	21	-	21	-
2	20 - 29	1.047	276	770	-
3	30 - 44	749	283	466	-
4	45 - 54	26	7	19	-
5	55 +	2	-	2	-
	Jumlah	1.845	566	1.278	-

Sumber: Kabupaten Penajam Paser Utara Dalam Angka Tahun 2010

2.2.4. Indeks Pembangunan Manusia

Manusia adalah subjek dan sekaligus sebagai objek pembangunan. Kapabilitasnya akan sangat menentukan keberlanjutan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator yang paling sering digunakan untuk menilai keragaan pembangunan manusia di sebuah daerah/negara.

Perkembangan angka Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Penajam Paser Utara adalah seperti yang ditunjukkan pada Tabel 2.10 di bawah ini. Dari tabel tersebut terlihat bahwa semenjak kabupaten ini dibentuk terdapat kenaikan indeks pembangunan manusia yang cukup signifikan. Di tahun 2008, angka IPM masih sebesar 72,69 kemudian meningkat menjadi 73,11 pada tahun 2009.

Tabel 2.10
Indeks Pembangunan Manusia
Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2008-2009

Uraian	2008	2009
Angka Harapan Hidup (tahun)	71.18	71.32
Angka Melek Huruf Penduduk Dewasa (Persen)	94.46	94.93
Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	7.57	7.58
Rata-rata Pengeluaran riil per kapita disesuaikan (000 Rp)	625.27	628.25
IPM	72.69	73.11
Tingkatan IPM	Menengah Atas	Menengah Atas

Sumber Data: IPM Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2010

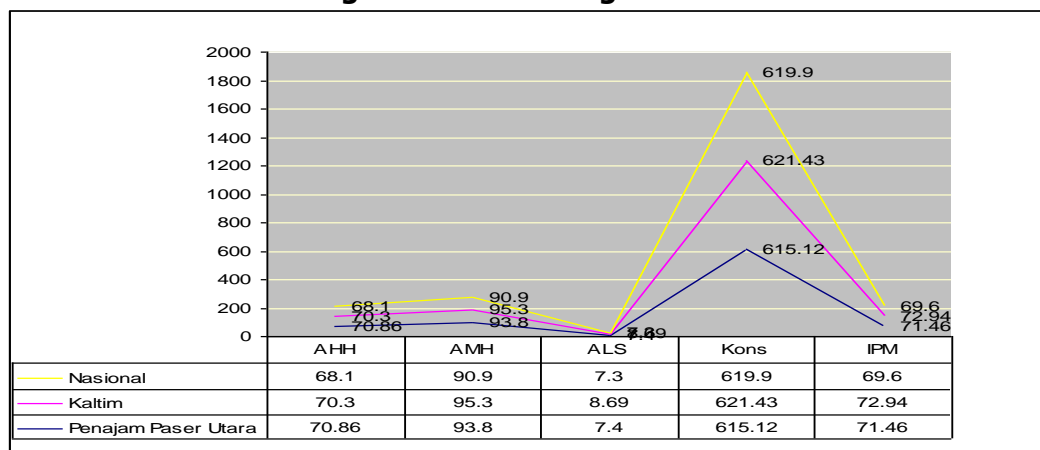
Pada Tabel 2.10 juga menunjukkan bahwa selama periode tahun 2008-2009 keempat indikator indeks pembangunan manusia mengalami peningkatan yang cukup berarti. Angka harapan hidup yang pada tahun 2008 mencapai rata-rata 71.18 tahun meningkat menjadi selama 71.32 tahun pada tahun 2009, angka melek huruf yang pada tahun 2008 mencapai angka 94.46 persen meningkat menjadi 94.93 persen pada tahun 2009, kemudian rata-rata lama sekolah yang pada tahun 2008 mencapai angka rata-rata 7,57 tahun meningkat menjadi rata-rata 7,58 tahun pada tahun 2009. Sedangkan rata-rata pengeluaran riil perkapita pada tahun 2008 mencapai angka Rp.625.27 meningkat menjadi sebesar Rp.628.25 pada tahun 2009.

Tabel 2.11
Perbandingan IPM Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2009

No	Peringkat IPM Kabupaten/Kota (Propinsi Kaltim)	Angka Harapan Hidup (Tahun)	Angka Melek Huruf (%)	Rata ² Lama Sekolah (Tahun)	Rata ² Pengeluaran riil perkapita disesuaikan (Rp. 000)	IPM	Peringkat IPM Nasional
1	Balikpapan	71.95	98.37	10.05	651.65	77.86	12
2	Samarinda	71.01	97.91	9.77	647.22	76.68	33
3	Bontang	72.26	99.08	10.01	630.41	76.52	35
4	Tarakan	71.55	97.92	9.33	643.45	76.37	38
5	Bulungan	72.23	95.55	7.88	633.85	74.68	82
6	Pasir	72.74	95.41	7.75	626.47	73.99	96
7	Nunukan	71.30	93.94	7.42	637.56	73.48	120
8	Berau	69.66	96.30	7.91	634.47	73.22	130
9	Penajam Paser Utara	71.32	94.93	7.58	628.25	73.11	136
10	Kutai Barat	70.08	95.97	7.79	625.57	72.60	154
11	Kutai Kartanegara	67.85	96.87	8.33	632.64	72.50	160
12	Malinau	68.22	92.65	7.67	645.91	72.30	178
13	Kutai Timur	68.43	95.89	7.65	621.34	71.32	223
14	Tana Tidung	72.61	88.49	7.05	616.13	71.07	230

Sumber Data: Profil Daerah Kalimantan Timur Tahun 2010.

Gambar 2.5
Grafik Perbandingan IPM PPU Dengan Kaltim dan Nasional



Sumber Data: Tim Kordinasi Penanggulangan Kemiskinan Nasional

Keterangan

- AHH : Angka Harapan Hidup
- AMH : Angka Melek Huruf
- ALS : Angka Lama Sekolah
- Kons : Pengeluaran Konsumsi Perkapita

Selanjutnya dalam perspektif perbandingan indeks pembangunan manusia yang dicapai oleh Kabupaten Penajam Paser Utara sudah berada diatas capaian IPM nasional namun masih berada di bawah capaian IPM Propinsi Kalimantan Timur. Tabel 2.11 menunjukkan bahwa pada tahun 2009 IPM Kabupaten Penajam Paser Utara mencapai angka 73,11 di bawah capaian Propinsi Kalimantan Timur yang mencapai angka indeks 75,11. Selanjutnya dari sisi peringkat, Kabupaten Penajam Paser Utara berada pada urutan 9 dari 14 kabupaten/kota yang ada di Propinsi Kalimantan Timur serta urutan 136 dari 497 kabupaten/kota di Indonesia.

2.2.5.Kemiskinan

Secara Absolut tingkat kemiskinan yang terdapat di Penajam Paser Utara masih cukup signifikan, data terakhir tahun 2006 menunjukkan bahwa sebanyak 19.000 orang atau sebesar 16.09 persen penduduk masih hidup dalam kemiskinan. Namun demikian jika dilihat dari pola perkembangan data dari tahun 2005-2006 maka terdapat penurunan angka kemiskinan yang cukup signifikan. Pada tahun 2005, dengan garis kemiskinan sebesar Rp.134.256 perkapita perbulan maka didapatkan

sebanyak 20.200 orang penduduk miskin atau sebesar 17.26 persen dari jumlah penduduk. Sedangkan pada tahun 2006 dengan garis kemiskinan sebesar Rp.171.476 perkapita perbulan ditemukan sebesar 19.000 orang atau sebesar 16.09 persen penduduk miskin. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.12
Jumlah dan Prosentase Penduduk Miskin
Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2005-2006

Uraian	2005	2006
Jumlah Penduduk Miskin	20.200	19.000
Prosentase Penduduk Miskin	17,26 %	16,09 %
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	2,85	3,73
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,88	1,14
Garis Kemiskinan	134.256	171.476

Sumber Data: Tim Kordinasi Penanggulangan Kemiskinan Nasional

Selanjutnya pada table di atas jika dilihat indeks kedalaman (P1) dan keparahan kemiskinan (P2) terlihat adanya gejala kemerosotan. Pada tahun 2005 indeks kedalaman kemiskinan mencapai angka 2,85 yang kemudian meningkat menjadi 3,73 pada tahun 2006. Hal ini juga berlaku pada indeks keparahan kemiskinan, pada tahun 2005 indeks ini menunjukkan angka 0,88 yang kemudian meningkat menjadi sebesar 1,14 pada tahun 2006.

Tabel 2.13
Jumlah Kepala Keluarga Miskin
Penerima BLT Kabupaten PPU Tahun 2006

No	Kecamatan	Tahap I	Tahap II	Jumlah
1	Babulu	3.615	1.308	4.923
2	Waru	772	414	1.186
3	Penajam	3.306	1.851	5.157
4	Sepaku	3.024	676	3.700
Jumlah		10.717	4.249	14.966

Sumber: BPS Kab. Penajam Paser Utara Dalam Angka 2006

Penelusuran data penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) tahun 2006 juga menjelaskan angka kemiskinan yang tidak jauh berbeda. Tabel 2.13 menunjukkan bahwa jumlah penerima BLT pada tahun 2006 mencapai angka 14.996 orang yang tersebar di 4 kecamatan di Kabupaten Penajam Paser Utara.

2.3. PROYEKSI PENDUDUK

Pertumbuhan penduduk merupakan salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan dalam merencanakan suatu wilayah. Semakin meningkatnya laju pertumbuhan penduduk suatu wilayah maka perlu direncanakan penambahan sarana prasarana penunjang kebutuhan penduduk. Di sisi lain, juga diperlukan penanganan untuk mengatasi pertumbuhan penduduk yang sudah tidak terkendali agar jumlah penduduk yang ada lebih stabil sesuai dengan kemampuan wilayah yang bersangkutan. Rata-rata pertumbuhan penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2002-2007 adalah 0,047.

Adapun, berdasarkan laju pertumbuhan dari tahun 2002 hingga tahun 2007 tersebut juga dapat ditarik suatu trend pertumbuhan penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara dari tahun 2010 hingga tahun 2029. Proyeksi berdasarkan trend pertumbuhan penduduk ini dihitung dengan pendekatan dari tiga metode proyeksi penduduk yaitu linier, eksponensial, dan regresi linier. Rumus dari tiap metode proyeksi penduduk yaitu:

- Linear

$$P_t = P_o + a.t$$

Dengan :

P_t : jumlah penduduk pada tahun t

P_o : jumlah penduduk pada tahun awal

a : rata-rata pertambahan penduduk

t : selisih tahun

- Eksponensial

$$P_t = P_o (1+r)^t$$

Dengan :

P_t : jumlah penduduk pada tahun t

P_o : jumlah penduduk pada tahun awal

r : rata-rata pertumbuhan penduduk

t : selisih tahun

- Regresi Linear

Rumus matematis dari linear regression model ini.

$$P = a + bX$$

Dengan

P = Jumlah penduduk pada tahun x

X = tahun pengamatan

a,b = Konstanta

Nilai a dan b dapat dicari dengan metode selisih kuadrat minimum, yaitu:

$$a = \text{konstanta empirik} = \frac{\sum P \sum x^2 - \sum x \sum Px}{N \sum x^2 - (\sum x)^2}$$

$$b = \text{konstanta empirik} = \frac{N \sum Px - \sum x \sum P}{N \sum x^2 - (\sum x)^2}$$

Berdasarkan ketiga rumus tersebut, perlu dilakukan uji metode yang digunakan terhadap perkembangan penduduk pada tahun 2002 hingga 2007. Uji yang dilakukan adalah dengan menggunakan simpangan kuadrat terkecil. Simpangan yang dihasilkan merupakan indikator kesesuaian metode terhadap data yang ada, semakin kecil simpangannya maka semakin sesuai metode tersebut digunakan. Hasil perhitungan simpangan kuadrat terkecil dari proyeksi jumlah penduduk di Kabupaten Penajam Paser Utara dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.14.
Tabel Uji Metode Trend Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2002-2007

No	Tahun	Penduduk Aktual	Trend Pertumbuhan Penduduk						
			Pertumbuhan	Linier	Simpangan	Eksponensial	Simpangan	Regresi Linier	Simpangan
1	2002	111420	0,047	111420	0	111420	0	111159	-261
2	2003	118466		117194	-1272	116657	-1809	116169	-2297
3	2004	120240		122968	2728	122140	1900	121178	938
4	2005	124209		128742	4533	127880	3671	126188	1979
5	2006	127477		134516	7039	133891	6414	131198	3721
6.	2007	140288		140290	2	140183	-105	136208	-4080
Jumlah simpangan kuadrat					169780900		101414147		0

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2009

Berdasarkan uji metode proyeksi penduduk pada tabel diatas, dapat diketahui bahwa simpangan kuadrat terkecil dimiliki oleh metode regresi linier. Sehingga metode yang digunakan dalam memproyeksikan penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara adalah metode proyeksi regresi linier. Hasil perhitungan proyeksi penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2009-2029 ini berdasarkan trend pertumbuhan penduduk yang terjadi di Kabupaten Penajam Paser Utara. Adapun rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.15.
Proyeksi Penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2009-2029

No	Tahun	Jumlah Penduduk
1	2009	146.227
2	2014	171.276
3	2019	196.325
4	2024	221.374
5	2029	246.423

Sumber: Hasil Analisis, 2009

Dari tabel Proyeksi Penduduk dapat dilihat bahwa jumlah penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun 2029 sebesar 246.423 jiwa.

2.4. KONDISI INFRASTRUKTUR DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

2.4.1. Transportasi

2.4.1.1 Modal Transportasi Darat

a. Jaringan Jalan dan Perangkutan Umum

Sesuai dengan fungsinya, kondisi jalan sangat mempengaruhi kelancaran hubungan dari satu wilayah ke wilayah lain. Kondisi jalan yang kurang baik/rusak dapat mengakibatkan suatu wilayah menjadi terisolir dan perkembangannya tertinggal dari daerah lain. Dilihat dari statusnya, jalan dibedakan menjadi 3, yaitu: Jalan Nasional, Jalan Propinsi, dan Jalan Kabupaten. Panjang jalan di Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun 2009 adalah 908,01 KM dimana 760,51 KM diantaranya adalah jalan

kabupaten. Jika dirinci menurut jenis permukaannya, sebagian besar jalan kabupaten tersebut telah berupa kerikil yaitu sepanjang 522,20 KM. Kendaraan angkutan umum yang beroperasi di Kabupaten Penajam Paser Utara terdiri dari bus, mobil penumpang umum, dan mobil barang. Dibanding tahun 2008, pada tahun 2009 terdapat penambahan armada mobil barang menjadi 1.908 buah, armada bus tetap berjumlah 6 buah, sedang jumlah mobil penumpang umum tetap berjumlah 197 buah.



Gambar 2.6. Kondisi Jalan Beraspal

Tabel 2.16
Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan, Kondisi, Kelas dan Status
Jalan di Kabupaten Penajam Paser Utara

No	Uraian	Satus Jalan			Total
		Kabupaten	Propinsi	Nasional	
Jenis Permukaan					
1	Diaspal	138,83	89,00	58,40	286,23
2	Kerikil	522,20	-	-	522,60
3	Tanah	96,85	-	-	96,85
4	Lainnya	2,63	-	0,10	2,73
Kondisi Jalan					
1	Baik	382,78	81,02	50,50	514,30
2	Sedang	259,56	3,81	5,00	268,37
3	Rusak	76,26	3,17	3,00	82,43
4	Rusak Berat	41,91	1,00	-	42,91
Total		760,51	89,00	58,50	908,01

Sumber : Kabupaten PPU Dalam Angka Tahun 2010

Untuk menjamin tersedianya pelayanan publik bagi masyarakat, maka dalam PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, pada pasal 8 ayat (1) Penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat

(2) berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan Pemerintah dan dilaksanakan secara bertahap. Dengan demikian bahwa "Daerah wajib melaksanakan pelayanan minimal". Dalam hal ini standar pelayanan minimal merupakan kewenangan dari pemerintah pusat. Untuk bidang jalan, Depkimpraswil telah mengeluarkan draft Standar Pelayanan Minimum bidang Jalan seperti yang disampaikan pada Tabel 2.15.

Tabel 2.17
Standar Pelayanan Minimal Jalan

No.	Bidang Pelayanan	Standar Pelayanan			Keterangan
		Kuantitas		Kualitas	
		Cakupan	Konsumsi/Produksi		
1.	Jaringan Jalan				
	A. Aspek Aksesibilitas	seluruh jaringan	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)	Indeks Aksesibilitas	Panjang jalan/luas (km/km ²)
			sangat tinggi >5000	>5	
			tinggi > 1000	>1.5	
			sedang > 500	>0.5	
			rendah > 100	>0.15	
			sangat rendah < 100	>0.05	
	B. Aspek Mobilitas	seluruh jaringan	PDRB per kapita (juta rp/kap/th)	Indeks Mobilitas	panjang jalan/1000 penduduk
			sangat tinggi >10	>5	
			tinggi > 5	>2	
			sedang > 2	>1	
			rendah > 1	>0.5	
			sangat rendah < 1	>0.2	
	C. Aspek Kecelakaan	seluruh jaringan	pemakai jalan	Indeks Kecelakaan 1	Kecelakaan/100.000 km. kend.
			Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)	Indeks Kecelakaan 2	
			sangat tinggi >5000		
			tinggi > 1000		
			sedang > 500		
			rendah > 100		
			sangat rendah < 100		
2.	Ruas Jalan				
A. Kondisi Jalan	Lebar Jalan Min.	Volume Lalulintas (kend/hari)	Kondisi Jalan		
	2x7m	lhr > 20000	sedang; iri < 6; rci > 6.5		
	7m	8000 > lhr > 20000	sedang; iri < 6; rci > 6.5		
	6m	3000 >l hr > 8000	sedang; iri < 8; rci > 5.5		
	4.5m	lhr < 3000	sedang; iri < 8; rci > 5.5		
B. Kondisi Pelayanan	Fungsi Jalan	Pengguna Jalan	Kecepatan Tempuh Min		
	arteri primer	lalu lintas regional jarak jauh	25 km/jam		
	kolektor primer	lalu lintas regional jarak sedang	20 km/jam		
	lokal primer	lalu lintas lokal	20 km/jam		
	arteri sekunder	lalu lintas kota jarak jauh	25 km/jam		
	kolektor sekunder	lalu lintas kota jarak sedang	25 km/jam		
	Lokal sekunder	lalu lintas lokal kota	20 km/jam		

SPM di bidang jalan ini dikembangkan dalam sudut pandang publik sebagai pengguna jalan, dimana ukurannya merupakan common indicator yang diinginkan oleh pengguna. Basis SPM dikembangkan dari 3 keinginan dasar para pengguna jalan, yakni:

- a. Kondisi jalan yang baik (tidak ada lubang)
- b. Tidak macet (lancar sepanjang waktu), dan
- c. Dapat digunakan sepanjang tahun (tidak banjir waktu musim hujan)

Dalam kaitan ini penyelenggara jalan harus mengakomodir tuntutan publik terhadap SPM dengan mengikuti norma/kaidah/aspek di bidang investasi jalan, yang meliputi aspek: efisiensi, efektifitas, ekonomi investasi, dan aspek kesinambungan. Pada dasarnya item dalam SPM jalan hampir sama dengan kriteria kemantapan jalan di mana tujuannya adalah memelihara jalan minimal dalam kondisi fisik yang sedang (indikator IRI), tidak macet ($VCR < 0,8$), lebar cukup, dan jumlah panjang jaringan jalan yang mencukupi (aspek aksesibilitas dan mobilitas).

Perhitungan indeks aksesibilitas di Kab. PPU yaitu :

$$\begin{aligned}\text{Indeks Aksesibilitas} &= \text{panjang total jalan (Km)}/\text{luas wilayah (Km}^2\text{)} \\ &= 908,01 \text{ Km}/3333,06 \text{ Km}^2 \\ &= 0,27\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Indeks Mobilitas} &= \text{panjang jalan per seribu penduduk} \\ &= 908,01 / 131 \\ &= 6,93\end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan diatas diketahui bahwa indeks aksesibilitas di Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar 0,27 telah memenuhi standar pelayanan minimal (standar minimalnya adalah 0,05). Begitu juga dengan indeks mobilitas di Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar 6,93 telah memenuhi standar pelayanan minimal (standar minimalnya adalah 5)

b. Terminal

Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki sebuah terminal angkutan umum di Penajam dengan klasifikasi tipe C. Terminal ini

melayani angkutan antar kecamatan di wilayah kabupaten dan antar kota dalam propinsi (Penajam-Tanah Grogot) dan dilayani dengan kendaraan micro bus (10-12 seat) dan bus (24 seat).



Gambar 2.7. Terminal Penajam

Adapun armada angkutan jalan (penumpang umum) yang beroperasi di Kabupaten Penajam Paser Utara secara keseluruhan berjumlah sebanyak 2.111 unit. Kendaraan angkutan penumpang umum (MPU) sejumlah 197 unit, bus sejumlah 6 unit, mobil dan mobil barang sejumlah 1.908 unit.

2.4.1.2 Modal Transportasi Laut

a. Pelabuhan Feri dan Speed Boat

Pintu gerbang masuk ke Kabupaten PPU dari arah utara dapat dilalui dengan jalan darat – melalui jalan km 38 Balikpapan (wilayah kab. Kutai Kartanegara) ke arah kecamatan Sepaku, atau dengan kapal Feri melalui pelabuhan Penajam ke pelabuhan Kariangau (Balikpapan). Hingga sampai saat ini peranan kapal Feri untuk mengangkut penumpang, kendaraan dan barang dari dan ke arah Penajam-Balikpapan sangat vital. Arus transportasi sangat padat, dan bahkan antrian kendaraan sering panjang dan memerlukan waktu lama untuk diangkut oleh Feri. Tidak kurang sekitar 3 – 5 kapal Feri tiap hari beroperasi selama 24 jam, yang dikelola oleh BUMN di bawah ASDP, Departemen Perhubungan. Selain itu juga terdapat prasarana angkutan dengan speed-boat sejumlah 44 unit dan kelotok sejumlah 31 unit yang dikelola oleh individu-individu masyarakat.

Berdasarkan data Dinas Perhubungan Kabupaten Penajam Paser Utara, pada tahun 2009 bongkar muat di dermaga LLASDP Penajam terdapat 13.953 kapal fery tiba dan 10.936 kapal fery berangkat, 63.813 orang datang diwilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan 58.396 orang berangkat atau meninggalkan wilayah ini, serta 321.133 kendaraan tiba dan 315.440 berangkat.



Gambar 2.8. Pelabuhan Feri di Penajam

Tabel 2.18
Jumlah Barang/ Penumpang yang Diangkut oleh Angkutan
Penyeberangan dan Rata-rata Tarif Angkut Tahun 2007

No.	Rincian	Satuan	Banyaknya	Rata-rata Tarif (Rp)
1.	Barang	Ton	-	-
2.	Penumpang	orang	49.454	3.500
3.	Kendaraan bermotor roda dua	unit	87.917	15.067
4.	Jeep dan sedan	unit	68.897	103.000
5.	Mikrolet/ Pick Up	unit	28.043	92.500
6.	Truk < 25 ton / Bus < 30 orang	unit	33.615	175.900
7.	Truk > 25 ton / Bus > 30 orang	unit	16.072	239.250
8.	Sepeda	unit	1	-

Sumber: PT. ASDP Indonesia Ferri (Persero) 2008

Untuk Jumlah barang/penumpang yang diangkut oleh Angkutan Penyeberangan didominasi oleh Kendaraan roda dua sebanyak 87.917 kendaraan diikuti oleh Jeep dan Sedan sebanyak 68.897 Kendaraan diikuti oleh penumpang sebanyak 49.454 Orang, Truk/Bus sebanyak 49.687 unit.

2.4.2. Jaringan Air Bersih

Pada umumnya masyarakat mendapatkan air dari sumur (air tanah), sungai, air hujan dan PDAM. Hingga saat ini PDAM mensuplai air bersih di sebagian wilayah kecamatan Penajam. Pada tahun 2009 jumlah produksi air bersih PDAM Kabupaten Penajam Paser Utara adalah sebesar 1.134.958,4 liter, sedangkan kapasitas air bersih yang mampu disalurkan oleh PDAM Kabupaten Penajam Paser Utara adalah sebesar 50 liter/detik. Jumlah pelanggan air bersih berdasarkan klasifikasi konsumen yang disediakan oleh PDAM Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun 2009 didominasi oleh rumah tangga yang berjumlah 3.095 sambungan, hotel/fasilitas wisata/instansi pemerintah sebanyak 127 sambungan. Jumlah konsumen jaringan air bersih berupa badan sosial, fasilitas kesehatan dan tempat ibadah di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) sebanyak 46 sambungan, jumlah sambungan untuk fasilitas perdagangan, jasa dan industri adalah sebanyak 3 buah sambungan sedangkan sarana umum dan lainnya yang menerima layanan air bersih adalah sebanyak 32 unit.

Jumlah pelanggan PDAM di Kabupaten Penajam Paser Utara keseluruhan pada tahun 2008 sebanyak 3.016 pelanggan. Tahun berikutnya, jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar 79 pelanggan. Kalau dilihat dari kategori pelanggan maka pelanggan terbesar adalah pelanggan rumah tempat tinggal sebesar 93,27 % atau 3.095 pelanggan.

Seiring dengan kenaikan jumlah pelanggan, PDAM terus berupaya menaikkan produksi air minum. Dibanding tahun sebelumnya, produksi air minum PDAM pada tahun 2009 mengalami kenaikan sebesar 1,23 persen yaitu dari 1.121.147,2 m³ pada tahun 2008 menjadi 1.134.958,4 m³ pada 2009.

Rencana kebutuhan air bersih dialokasikan untuk unit konsumsi sejumlah 100 liter/orang/hari, dimana alokasi ini berdasarkan standar kebutuhan air bersih dari PPPKT. Dari asumsi tersebut diketahui bahwa kebutuhan air bersih masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara dengan

dihitung berdasarkan standar dan prediksi jumlah penduduk pada tahun 2029 sebesar 246.423 jiwa maka kebutuhan air bersih di Kabupaten Penajam Paser Utara yaitu :

Keb. Domestik : Σ Penduduk X Keb rata-rata rumah tangga (100 tr/hari).

Keb. Non Domestik : 20%-30% Kebutuhan Domestik

Sarana Perkotaan : 10%-20% X (Keb. Domestik + Keb Non Domestik)

Hidran : 20%-30% X (Keb. Domestik + Keb Non Domestik)

Tabel 2.19
Perhitungan Kebutuhan Air Bersih di Kabupaten Penajam Paser Utara Sampai dengan tahun 2029

Tahun	Jumlah penduduk	Kebutuhan (liter/hari)				Total (lt/hari)
		Domestik	Non Domestik	Hidran	Kehilangan Air	
2010	140.228	14.022.800	8.413.680	2.243.648	2.243.648	26.923.776
2029	246.423	24.642.300	14.785.380	3.942.768	3.942.768	47.313.216

Sumber : Hasil Perhitungan 2009

Berdasarkan perhitungan diatas diketahui bahwa kebutuhan air bersih di Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun 2029 sebesar 47.313.216 liter per hari atau 47.313,216 m³ per hari. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut perlu untuk pengembangan sumber air baku baik kualitas maupun kuantitasnya sehingga bertambahnya jumlah penduduk dan kebutuhan air bersih dapat dilayani PDAM Kabupaten Penajam Paser Utara.

2.4.3. Jaringan Listrik

Wilayah Kalimantan Timur umumnya – termasuk Kabupaten PPU – masih meng-hadapi masalah penyediaan listrik, baik untuk rumah tangga maupun industri. Di Kabupaten PPU terdapat PLTD dengan kapasitas yang terbatas sehingga sebagian masyarakat mendapatkan listrik dari sumber lain seperti diesel sendiri atau sharing (milik perorangan) ataupun diesel yang dikelola desa.

Pelayanan listrik di Kabupaten Penajam Paser Utara menggunakan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) yang dikelola oleh PLN Wilayah VI cabang Balikpapan yang terdiri dari 3 Ranting. Ranting Petung melayani Penajam, Long Ikis, Long Kali, dan Maridan. Ranting Sepaku yang meliputi Sepaku dan Semoi, serta ranting Jenebora yang meliputi Jenebora, Pantai Lango dan Gersik.

Jumlah pelanggan listrik PLN di Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2009 sebanyak 14.809 pelanggan dengan produksi listrik sebanyak 45.039.929 Kwh dan kapasitas tersambung sebanyak 12.504.750 VA. Saat ini energi listrik merupakan kebutuhan vital bagi kehidupan manusia, baik untuk aktifitas rumah tangga sehari-hari maupun aktifitas perekonomian masyarakat dan dunia usaha (perusahaan). Keterbatasan pasokan energi listrik suatu daerah tak jarang membuat para investor yang ingin menanamkan modal mengurungkan niatnya untuk berinvestasi khususnya kegiatan usaha yang membutuhkan pasokan energi listrik yang cukup besar.

Untuk rencana yang akan datang, pemenuhan listrik ini dialokasikan untuk dapat menjangkau setiap rumah. Sebagai acuan untuk pengembangan jaringan, maka terlebih dahulu diperlukan perkiraan energi listrik yang dibutuhkan. Pada umumnya, kebutuhan kelistrikan di Kabupaten Penajam Paser Utara, baik di daerah perkotaan maupun daerah pedesaan dilayani oleh jaringan listrik PLN. Untuk tahun-tahun mendatang dengan perkembangan penduduk dan perkembangan kegiatan ekonomi, maka kebutuhan energi listrik akan terus bertambah.

Pelayanan sistem jaringan listrik merupakan salah satu program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, sehingga rencana penyediaan energi listrik, selain untuk meningkatkan kebutuhan energi/kapita/bulan, juga untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, dapat membantu kegiatan sosial dan pertumbuhan ekonomi kabupaten Penajam Paser Utara.

Pada masa-masa yang akan datang perlu adanya pendistribusian listrik keseluruh bagian Kabupaten Penajam Paser Utara secara merata. Kebutuhan listrik akan terus meningkat sesuai dengan perkembangan penduduk beserta kegiatannya pada tahun-tahun mendatang, karena itu selain diharapkan adanya penghematan terhadap pemakaian listrik juga adanya peningkatan pelayanan dari PLN. Besarnya kebutuhan listrik dihitung dari ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Rumah tangga : 90 watt/jiwa
2. Industri dan Perdagangan : 70% dari kebutuhan rumah tangga
3. Fasilitas Sosial dan Ekonomi : 15% dari kebutuhan rumah tangga
4. Fasilitas Perkantoran : 10% dari kebutuhan rumah tangga
5. Penerangan jalan : 1% dari kebutuhan rumah tangga
6. Cadangan : 5% dari kebutuhan rumah tangga

Berdasarkan hal tersebut diatas maka proyeksi penggunaan serta pemanfaatan listrik oleh warga Kabupaten Penajam Paser Utara hingga tahun 2029 dapat dilihat pada Tabel 2.20.

Tabel 2.20.

Perhitungan Kebutuhan Listrik Kabupaten Penajam Paser Utara

Tahun	Rumah Tangga	Industri & Perdgn	Fas Sos-Ek	Fasilitas Perkantoran	PJU	Cadangan	Total
2007	126.259.200	88.381.440	18.938.880	12.625.920	1.262.592	6.312.960	253.780.992
2029	221.780.700	155.246.490	33.267.105	22.178.070	2.217.807	11.089.035	445.779.207

Sumber : Hasil Perhitungan, 2009

Berdasarkan perhitungan diatas diketahui bahwa kebutuhan listrik di Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun 2029 sebesar 445.779.207 watt atau 445.779,2 Kilowatt.

2.4.4. Jaringan Telepon

Pelayanan jasa telekomunikasi di Kabupaten Penajam Paser Utara, khususnya telepon belum begitu merata. Dalam rangka meningkatkan pembangunan telekomunikasi, sasaran yang akan dicapai adalah memperluas jaringan serta pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Dengan semakin berkembangnya penduduk dan kegiatan

ekonomi, maka kebutuhan akan fasilitas telekomunikasi akan semakin meningkat pula dari tahun ke tahun. Terlebih lagi pada kota-kota kecamatan dengan tingkat kotaan yang tinggi. Untuk maksud tersebut maka perlu dikembangkan sistem jaringan telepon terutama pemasangan telepon umum pada pusat-pusat perkotaan dan kecamatan, dengan tujuan agar penduduk yang belum memiliki fasilitas jaringan telepon dapat terlayani kebutuhannya. Pada prinsipnya pemasangan jaringan telekomunikasi ditujukan untuk meningkatkan arus informasi yang bersifat timbal balik dan peningkatan perluasan jangkauan penerangan dalam upaya mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Tabel 2.21.
Kapasitas Telekomunikasi di Kabupaten Penajam Paser Utara

No	Uraian	Satuan	Jumlah (unit)
1	Sentral	SST	4.530
2	Terpasang	SST	2.279
3	Jaringan Primer	SST	1
4	Jaringan Sekunder	SST	800

Sumber : Kabupaten PPU Dalam Angka Tahun 2010

Pengembangan jaringan telekomunikasi diarahkan pada pengembangan menara telekomunikasi yang melayani jaringan telepon nir kabel. Pengembangannya diarahkan untuk menjangkau seluruh wilayah di Kabupaten Penajam Paser Utara karena semakin tingginya tuntutan kebutuhan masyarakat.

Sebagai konsekuensi dari semakin pesatnya pembangunan telekomunikasi, khususnya telekomunikasi nirkabel, semakin meningkat pula pembangunan infrastruktur prasarana pendukung seperti menara telekomunikasi. Berkembangnya menara telekomunikasi dianggap kurang memenuhi jaminan keamanan lingkungan dan kurang proporsional penempatannya bagi estetika. Kondisi ini menjadi lebih kompliked karena sebagian masyarakat semakin kritis, sehingga sering mudah eksplosif sikapnya terhadap menara telekomunikasi yang dianggapnya berpotensi mudah membahayakan lingkungan sekitar tempat tinggalnya. Bahkan secara ekonomi, persaingan pendirian menara telekomunikasi ini

justeru cenderung kurang efisien, karena beban biaya menjadi berlebih dibanding dengan kemungkinan single tower. Arahkan ketentuan pembangunan tower ini dilakukan untuk menetapkan standar menara telekomunikasi yang paling tidak memenuhi sejumlah faktor persyaratan yang terkait dengan masalah keamanan lingkungan masyarakat, kesehatan, kekuatan konstruksi dan estetika.

Hal-hal penting yang harus diperhatikan dalam pembangunan tower standar radio sistem antena dan standard konstruksi sistem menaranya. Sedangkan hal-hal lain yang bersifat non teknis juga sempat diperhatikan seperti misalnya masalah perijinan, kebijakan penggunaan menara bersama, mekanisme pengawasan dan lain sebagainya. Ketentuan pembangunan tower di Kabupaten Penajam Paser Utara dapat dilihat pada Tabel 2.22.

Tabel 2.22.
Ketentuan Pembangunan Tower Telekomunikasi Kabupaten PPU

Jenis Bangunan	Jarak Tower dari Bangunan (meter)	
	Ketinggian Tower sampai dengan 45 meter	Ketinggian Tower di atas 45 meter
Perumahan	20	30
Komersial	10	15
Industri	5	10

Sumber : Keputusan Menteri Bersama Menteri Komunikasi dan Informasi

Berdasarkan tabel di atas maka rencana pembangunan tower di Kabupaten Penajam Paser Utara adalah sebagai berikut :

1. Untuk ketinggian tower di atas 45 meter, jarak tower dari bangunan perumahan terdekat adalah 30 meter.
2. Untuk ketinggian tower di bawah 45 meter, jarak tower dari bangunan perumahan terdekat adalah 20 meter

Tentang radiasi komunikasi radio mengatur ketentuan batasan maksimum radiasi yang diizinkan. Selanjutnya pada bagian tentang sarana pendukung menara komunikasi mengatur tentang komponen fisik dan non fisik yang terdapat pada menara tersebut, yang terdiri dari grounding dan penangkal petir, catu daya listrik beserta catu daya back up -nya, aviation

light, identitas kepemilikan dan dibangunnya menara, luas minimal lahan serta kemudahan akses dan ketersediaan catu daya yang terpisah dari gedung induknya (seandainya menempel pada suatu gedung tertentu). Tentang pengoperasian dan pemeliharaan yang mengatur kewajiban adanya laporan rutin keadaan setiap menara telekomunikasi.

2.4.5. Fasilitas Pendidikan

Kemajuan pendidikan suatu daerah tidak lepas dari usaha pemerintah melengkapi dan memperluas sarana prasarana pendidikan yang ada seperti jumlah sekolah dan rasio guru per murid. Secara umum, keberadaan sarana dan prasana pendidikan SD, SLTP dan SLTA terbilang sudah cukup memadai dipandang dari jumlah penduduk usia sekolah di Kabupaten Penajam Paser Utara. Namun demikian seiring dengan derap langkah pembangunan daerah maka penguatan terhadap kualitas penyelenggaraan pendidikan niscaya untuk diberlakukan.

Sampai dengan akhir bulan April 2009, jumlah TK di Kabupaten Penajam Paser Utara sebanyak 54 buah dengan jumlah murid 2.441 siswa dan jumlah guru 220 orang. Selain itu tercatat jumlah SD/MI sebanyak 82 buah, SMP/MTs sebanyak 35 buah, SMA sebanyak 15 buah dan SMK sebanyak 4 buah. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel: 2.23
Data Perkembangan Pendidikan Kabupaten PPU Tahun 2009

Banyaknya Sekolah (Unit)	Negeri	Swasta	Jumlah
▪ TK	2	52	54
▪ SD/MI	73	9	82
▪ SMP/MTs	24	11	35
▪ SMA	9	6	15
▪ SMK	3	1	4
Banyaknya Tenaga Pendidik (Orang)	Negeri	Swasta	Jumlah
▪ TK	5	215	220
▪ SD/MI	941	53	994
▪ SMP/MTs	505	124	629
▪ SMU	185	82	267
▪ SMK	68	36	104
Banyaknya Murid (Siswa)	Negeri	Swasta	2009
▪ TK	509	1.932	2.441

▪ SD/MI	18.655	556	19.211
▪ SMP/MTs	5.349	1.349	6.698
▪ SMU	2.238	670	2.908
▪ SMK	936	460	1.396

Sumber: Kabupaten Penajam Paser Utara Dalam Angka Tahun 2010

Selama periode 2005-2009, jumlah sekolah TK sebanyak 54 unit, SD/MI 82 unit, SMP/MTs sejumlah 35 unit dan SMU/MA sebanyak 15 unit dan SMK sebanyak 4 unit. Dilihat pada Tabel 2.23 menunjukkan jumlah sekolah, murid, rata-rata murid dan guru persekolah serta rasio guru murid SD di masing-masing kecamatan Kabupaten Penajam Paser Utara. Selanjutnya jumlah murid mengalami peningkatan yaitu dari sejumlah 17.999 siswa pada tahun 2005 meningkat menjadi sejumlah 18.655 siswa pada tahun 2009. Rata-rata jumlah siswa persekolah pada tahun 2005 mencapai 182 siswa turun menjadi rata-rata sebanyak 160 siswa pada tahun 2009. Sedangkan rasio guru/murid yang pada tahun 2005 mencapai 1:20 mengalami perbaikan menjadi 1:19 pada tahun 2009.

Tabel 2.24
Rasio Kecukupan Sarana dan Prasarana Pendidikan SD

No	Kecamatan	Jumlah Sekolah	Jumlah Murid	Jumlah Guru	Rata-rata Persekolah		Rasio Guru dan murid
					Murid	Guru	
1	Babulu	26	4.158	268	160	10	16
2	Waru	12	2.119	143	177	12	15
3	Penajam	41	8.761	365	214	9	24
4	Sepaku	3	4.173	189	1391	63	22
	Jumlah 2009	82	19.211	965	234	12	19
	2008	104	18.809	1.159	181	11	16
	2007	105	17.819	686	170	6	28
	2006	99	18.257	1.077	184	11	17
	2005	99	17.999	937	182	9	20

Sumber: Kabupaten Penajam Paser Utara Dalam Angka Tahun 2010

Dalam tabel di atas, jika ditelusuri dari data per kecamatan tahun 2006 dapat kita temukan bahwa dari 99 unit sekolah dasar yang ada di Penajam Paser Utara sebanyak 40 unit diantaranya berada di Kecamatan Penajam, dengan jumlah siswa sebanyak 8.761 siswa dan 365 orang guru, rasio guru per-murid mencapai 1:24. Kemudian di Kecamatan Sepaku terdapat 3 unit SD dengan jumlah siswa sebanyak 4.173 siswa

dan 189 orang guru, rasio guru per-murid mencapai 1:22. Di Kecamatan Babulu terdapat 26 unit SD dengan jumlah siswa sebanyak 4.158 siswa dan 268 orang guru, rasio guru per-murid mencapai 1:16. sedangkan di Kecamatan Waru terdapat sejumlah 12 unit SD dengan jumlah murid sebanyak 2.119 dan guru sebanyak 143, rasio guru per-murid mencapai 1:15.

Tabel 2.25 menunjukkan jumlah sekolah, murid, rata-rata murid dan guru per sekolah serta rasio guru murid SLTP/MTs di masing-masing kecamatan. Selama periode 2005-2009, jumlah sekolah meningkat dari 18 unit sekolah pada tahun 2005 menjadi 33 unit pada tahun 2009. Selanjutnya jumlah murid juga mengalami perubahan dari sejumlah 4.748 siswa pada tahun 2005 naik menjadi sejumlah 6.698 siswa pada tahun 2009. Rata-rata jumlah siswa per sekolah pada tahun 2005 mencapai 264 siswa turun menjadi 203 siswa pada tahun 2009. Sedangkan rasio guru/murid yang pada tahun 2005 mencapai 1: 7 mengalami kenaikan menjadi 1:17 pada tahun 2009.

Tabel 2.25
Rasio Kecukupan Sarana dan Prasarana Pendidikan SLTP/MTs

No	Kecamatan	Jml Sekolah	Jml Murid	Jml Guru	Rata-rata Persekolah		Rasio Guru dan murid
					Murid	Guru	
1	Babulu	8	1371	81	171	10	17
2	Waru	3	789	45	263	15	18
3	Penajam	15	3035	176	202	12	17
4	Sepaku	7	1503	90	215	13	17
	Jumlah 2009	33	6698	392	203	12	17
	2008	26	5376	367	207	14	15
	2007	25	5064	0	203	0	0
	2006	19	3335	211	175	11	16
	2005	18	4748	325	264	36	7

Sumber: Kabupaten Penajam Paser Utara Dalam Angka Tahun 2010

Pada tabel di atas, penelusuran data per kecamatan tahun 2009 dapat kita temukan bahwa dari 33 unit sekolah SLTP/MTs yang ada di Penajam Paser Utara sebanyak 15 diantaranya berada di Kecamatan Penajam, dengan jumlah siswa sebanyak 3.035 siswa dan 176 orang guru,

rasio guru per murid mencapai 1:17. Kemudian di Kecamatan Sepaku terdapat 8 unit SLTP/MTs dengan jumlah siswa sebanyak 1.503 siswa dan 45 orang guru, rasio guru per murid mencapai 1:17. Di Kecamatan Babulu terdapat 8 unit dengan jumlah siswa sebanyak 1.371 siswa, 81 orang guru, dan rasio guru per murid mencapai 1:17.

Tabel 2.26 menunjukkan jumlah sekolah, murid, rata-rata murid dan guru per-sekolah serta rasio guru murid SMU/SMK/MA masing-masing kecamatan di Kabupaten Penajam Paser Utara. Selama periode 2005-2009, jumlah sekolah meningkat dari 11 unit sekolah pada tahun 2005 menjadi 19 sekolah pada tahun 2009. Selanjutnya jumlah murid juga meningkat dari sejumlah 2.162 siswa pada tahun 2005 meningkat menjadi sejumlah 4.304 siswa pada tahun 2009. Rata-rata jumlah siswa per sekolah pada tahun 2005 mencapai 197 siswa menjadi 227 siswa pada tahun 2009. Sedangkan rasio guru/murid yang pada tahun 2005 mencapai 1:12 mengalami kenaikan menjadi 1:14 pada tahun 2009.

Tabel 2.26
Rasio Kecukupan Sarana dan Prasarana Pendidikan SMU/SMK/MA

No	Kecamatan	Jml Sekolah	Jml Murid	Jml Guru	Rata-rata Persekolah		Rasio Guru dan murid
					Murid	Guru	
1	Babulu	5	786	61	157	12	14
2	Waru	1	456	36	456	36	7
3	Penajam	9	2152	123	239	14	15
4	Sepaku	4	910	47	228	12	18
	Jumlah 2009	19	4304	267	227	14	14
	Jumlah 2008	19	4648	257	245	14	15
	Jumlah 2007	13	3475	318	267	24	8
	Jumlah 2006	17	3456	209	203	12	14
	Jumlah 2005	11	2162	235	197	21	12

Sumber: Kab. Penajam Paser Utara Dalam Angka 2010

Eksplorasi data per kecamatan tahun 2005 dapat kita temukan bahwa dari 19 sekolah yang ada di Penajam Paser Utara sebanyak 9 diantaranya berada di Kecamatan Penajam, dengan jumlah siswa sebanyak 2.152 siswa dan 123 orang guru, rasio guru per murid mencapai 1:18. Yang menjadi perhatian adalah di Kecamatan Waru yang hanya memiliki 1 unit sekolah menengah atas sehingga dengan makin

bertambahnya jumlah murid maka perbandingan guru per murid mencapai rasio 1:7. (Tabel 2.26)

Dengan proyeksi jumlah penduduk di Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2029 sebesar 246.423 jiwa, maka kebutuhan terhadap fasilitas pendidikan adalah sebagai berikut :

1. TK = 750 jiwa pendukung, kebutuhan luas kapling 500 m²
2. SD = 1500 jiwa pendukung, kebutuhan luas kapling 3000 m²
3. SLTP = 15000 jiwa pendukung, kebutuhan luas kapling 4000 m²
4. SMU = 30000 jiwa pendukung, kebutuhan luas kapling 4800 m²

Tabel 2.27
Perhitungan Kebutuhan Sarana Pendidikan di Kabupaten Penajam Paser Utara

Jumlah Penduduk	Kondisi	Sarana Pendidikan (Unit)			
		TK	SD	SLTP	SMU
140.228	Eksisting	57	105	34	19
	Standar (Jiwa)	750	1.500	15.000	30.000
	Kebutuhan 2007	187	105	34	19
246.423	Kebutuhan tahun 2029	328	164	34	19

Sumber : Hasil Perhitungan 2009

Berdasarkan perhitungan diatas diketahui bahwa kebutuhan SLTP dan SMU yang ada saat ini telah memenuhi kebutuhan sampai dengan tahun 2029, sedangkan fasilitas TK dan SD masih memerlukan penambahan sejumlah 271 unit TK dan 59 unit SD.

2.4.6. Fasilitas Kesehatan

Upaya pemerintah untuk meningkatkan derajat dan status kesehatan masyarakat dilakukan antara lain dengan meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan fasilitas dan sarana kesehatan. Pada tahun 2009, di Kabupaten Penajam Paser Utara, terdapat sekitar 547 tenaga kesehatan, untuk fasilitas kesehatan seperti Puskesmas sebanyak 11 buah dengan puskesmas pembantu sebanyak 44 buah, dengan perawatan sejumlah 7 unit dan puskesmas induk non perawatan sejumlah 4 unit. Untuk puskesmas pembantu terdapat 30 unit sedangkan untuk Puskesmas Keliling 11 buah. Selain sarana kesehatan berupa Puskesmas

juga terdapat posyandu sebanyak 266 buah dengan kader aktif sebanyak 1.140 kader, rasio kader terhadap posyandu adalah 4 kader tiap-tiap posyandu. Sebagai pertolongan pertama di tingkat desa, maka terdapat poliklinik desa (Polindes) sejumlah 38 unit. Jumlah sarana kesehatan rujukan terdapat 1 unit RSUD di Kabupaten Penajam Paser Utara.

Tabel 2.28.
Banyaknya Fasilitas Puskesmas Menurut Jenis dan Kecamatan

No	Kecamatan	Puskesmas	Puskesmas Pembantu	Puskesmas Keliling
1	Babulu	3	8	3
2	Waru	1	4	1
3	Penajam	3	21	3
4	Sepaku	4	11	4
Jumlah		11	44	11

Sumber : Kabupaten Penajam Paser Utara Dalam Angka Tahun 2010

Tenaga, sarana, dan prasarana kesehatan di Kabupaten Penajam Paser Utara meliputi rumah sakit, TT rumah sakit, dokter rumah sakit, perawat rumah sakit, bidan rumah sakit, dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi, perawat, bidan, puskesmas, dan puskesmas pembantu.

Tabel 2.29
Tenaga, Sarana, dan Prasarana Kesehatan di Kabupaten PPU Tahun 2003-2007

No	Uraian	2003	2004	2005	2006	2007
1	Rumah Sakit	-	-	-	-	1
2	TT Rumah Sakit	-	-	-	-	60
3	Dokter Rumah Sakit	-	-	-	-	11
4	Perawat Rumah Sakit	-	-	-	-	46
5	Bidan Rumah Sakit	-	-	-	-	23
6	Dokter Spesialis	-	-	-	-	4
7	Dokter Umum	9	9	11	20	21
8	Dokter Gigi	3	7	8	9	11
9	Perawat	-	80	89	182	170
10	Bidan	36	50	54	93	94
11	Puskesmas	8	9	10	10	11
12	Puskesmas Pembantu	8	40	42	38	44

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. PPU.

Derajat kesehatan di Kabupaten PPU dapat dilihat dari indikator-indikator antara lain: rata-rata usia harapan hidup penduduk,

angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup, dan angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup pada Tabel 2.30.

Tabel 2.30
Derajat Kesehatan Penduduk Kabupaten PPU Tahun 2003-2007

No	Indikator	Satuan	2003	2004	2005	2006	2007
1	Usia Harapan Hidup	Tahun	60	65,36	65,7	66,70	68
2	Angka Kematian Bayi (AKB)	Per 1.000	15/1000	46	31	37	35
3	Angka Kematian Ibu (AKI)	Per 100.000	248/1000	194/1000	3	2	2

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. PPU

Dengan proyeksi jumlah penduduk di Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2029 sebesar 246.423 jiwa, maka kebutuhan terhadap fasilitas kesehatan adalah sebagai berikut :

1. Rumah sakit yang didukung oleh penduduk sebesar 480.000 jiwa dengan luas lahan 10.000 m².
2. Puskesmas yang didukung oleh penduduk sebesar 200.000 jiwa dengan luas lahan 2.400 m².
3. Puskesmas pembantu (PUSTU) yang didukung oleh penduduk sebesar 30.000 jiwa dengan luas lahan 500 m².
4. BKIA klinik KB yang didukung oleh penduduk pendukung sebesar 10.000 jiwa dengan luas lahan 1.000 m².
5. Apotik, penduduk pendukung sebesar 30.000 jiwa dengan luas lahan 400 m².
6. Praktek dokter, dengan penduduk pendukung sebanyak 5.000 jiwa dan luas lahan yang dapat bersatu dengan rumah tinggal.

Tabel 2.31
Perhitungan Kebutuhan Sarana Kesehatan

Penduduk	Kondisi	Sarana Kesehatan (unit)			
		RS	Puskesmas	PUSTU	B.K.I.A
140.228	Eksisting	1	11	44	38
	Standar (Jiwa)	480.000	200.000	30.000	10.000
	Keb. thn 2007	1	11	44	38
246.423	Keb. thn 2029	1	11	44	38

Sumber : Hasil Perhitungan, 2009

Kebutuhan Puskesmas dan PUSTU telah memenuhi sehingga dalam pengembangannya perlu peningkatan kualitas pelayanan dan perbaikan kondisi bangunan fasilitas kesehatan agar tidak mengganggu pelayanan.

2.4.7. Fasilitas Perdagangan dan Jasa

Sarana perdagangan yang berupa pasar di Kabupaten Penajam Paser Utara sampai dengan akhir tahun 2009 adalah sebanyak 10 buah pasar yang ditempati oleh 1.370 pedagang. Adapun sebaran pada setiap kecamatannya meliputi Kecamatan Penajam dengan 5 buah pasar dan 600 pedagang, Kecamatan Waru dengan 1 buah pasar dan 320 pedagang, Kecamatan Babulu dengan 2 buah pasar dan 300 pedagang, dan Kecamatan Sepaku dengan 2 buah pasar dan 150 pedagang.

Tabel 2.32
Banyaknya Pasar dan Pedagang Menurut Kecamatan

Kecamatan	Pasar	Pedagang
Babulu	2	300
Waru	1	320
Penajam	5	600
Sepaku	2	150
Jumlah	10	1.370

Sumber Data. Kabupaten Penajam Paser Utara Dalam Angka Tahun 2010

Sampai dengan akhir tahun 2009, koperasi yang ada di Kabupaten Penajam Paser Utara berjumlah 174 koperasi yang tersebar di 4 kecamatan dengan banyaknya simpanan anggota koperasi sebesar Rp.342.130.672,- dan modal luar koperasi sebesar Rp.4.628.201.163,-.

Tabel 2.33
Banyaknya Koperasi dan Jumlah anggota per Kecamatan

Kecamatan	KUD	Non KUD	Jumlah	Jumlah Anggota
Babulu	4	20	24	502
Waru	1	11	12	317
Penajam	12	76	88	1.692
Sepaku	5	45	50	819
Jumlah	22	152	174	3.330

Sumber Data. Kabupaten Penajam Paser Utara Dalam Angka Tahun 2010

Tabel 2.34
Banyaknya Koperasi Menurut Jenisnya Tahun 2009

No	Jenis	Banyaknya
1	Koperasi Unit Desa	22
2	Koperasi Pegawai Negeri	6
3	Koperasi Karyawan	11
4	Koperasi Pertanian	20
5	Koperasi Perkebunan	3
6	Koperasi Kehutanan	0
7	Koperasi Perikanan/ Nelayan	6
8	Koperasi Peternakan	1
9	Kioperasi Serba Usaha	88
10	Koperasi Perdagangan	1
11	Koperasi Perindustrian	1
12	Koperasi Pertambangan	1
13	Koperasi Kelompok Masyarakat	0
14	Koperasi Simpan Pinjam	7
15	Koperasi Lainnya	
	a. Koperasi Pondok Pesantren	2
	b. Koperasi Masjid	0
	c. Koperasi Pemuda	0
	d. Koperasi Pramuka	0
	e. Koperasi Pasar	0
	f. Koperasi Wisata	0
	g. Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat	0
	h. Koperasi Angkotan	1
	i. Koperasi TNI/ Polri	1
	j. Koperasi Wanita	3

Sumber: Kantor Perindagkop Kab. PPU

Lembaga perbankan yang ada di Kabupaten Penajam Paser Utara meliputi 1 unit kantor cabang BPD, 1 unit kantor cabang BRI, 1 unit kantor cabang BNI dan 1 unit BMT.

2.5 SISTEM RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN PPU BERDASARKAN RTRK KABUPATEN PPU TAHUN 2002-2012

2.5.1 Rencana Struktur Tata Ruang

2.5.1.1 Pendekatan Nodalitas

a. Hirarki Kota-Kota

Sistem permukiman merupakan arahan untuk menetapkan sistem perwilayahan dengan hirarki pusat-pusat pelayanan jasa dan produksi sesuai potensi, kecenderungan perkembangan dan orientasi perkembangannya. Sistem permukiman dilakukan melalui pengembangan pusat-pusat permukiman sebagai pusat pelayanan jasa ekonomi, jasa pemerintahan dan jasa-jasa pelayanan sosial lainnya, baik bagi kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan, maupun dalam hubungan interaksi antar pusat-pusat permukiman secara hirarkis. Dengan demikian pusat-pusat permukiman sebagaimana dimaksud di atas meliputi pusat-pusat permukiman perkotaan dan pusat-pusat permukiman perdesaan.

Sistem permukiman merupakan kesatuan sistem kota-kota di Kabupaten Penajam Paser Utara untuk dikembangkan saling terkait dengan tingkatan fungsi kota (hirarki kota) sebagai pusat jasa pelayanan, untuk melayani perkembangan berbagai usaha jasa dan kegiatan produksi baik untuk permukiman dalam wilayahnya maupun terhadap wilayah sekitarnya. Pusat-pusat permukiman yang dimaksud dipilih dari wilayah desa atau kelurahan yang memiliki potensi besar dan cenderung cepat berkembang dan dapat mendorong perkembangan desa atau kelurahan sekitarnya.

Pusat-pusat permukiman dalam sistem perwilayahan dimaksud diatas, antara lain dapat memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Mempunyai potensi dan cenderung berkembang pesat dan dapat menarik minat investasi;

2. Berfungsi sebagai pusat pelayanan jasa dan produksi yang didukung oleh tingkat ketersediaan prasarana dan sarana lingkungan permukiman yang memadai serta memberikan manfaat:
 - Meningkatkan ketersediaan untuk pengembangan permukiman;
 - Meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor, terutama sektor ekonomi;
 - Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat;
 - Menyediakan kesempatan kerja;
 - Tidak mengganggu upaya pelestarian SDA dan fungsi lindung;
3. Secara teknis aman dari bahaya bencana alam, memiliki lingkungan yang sehat serta mempunyai akses yang berorientasi dalam skala pelayanan regional dan lokal.

Berdasarkan volume, intensitas dan frekuensi kegiatan, serta ketersediaan fasilitas dan utilitas permukiman, maka klasifikasi tingkat pusat-pusat pelayanan (orde) dari sistem pusat-pusat permukiman di Kabupaten Penajam Paser Utara dikelompokkan dalam 3 (tiga) tingkatan sebagai berikut :

1. Hirarki I : Kota Petung dan Kota Penajam
2. Hirarki II : Kota Babulu dan Kota Maridan
3. Hirarki III : Kota Waru, Kota Sepaku dan Kota Semoi

Dalam pemilihan pusat pertumbuhan Petung dan Penajam di Kabupaten Penajam Paser Utara didasarkan oleh kegiatan sosial ekonomi di lokasi Petung dan Penajam tersebut berada di sepanjang jalan, baik jalan arteri primer (jalan propinsi) maupun jaringan jalan lainnya, sehingga lokasi Petung dan Penajam sangat strategis dan dapat menjadi stimulan perkembangan wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Tabel 2.35.
Kawasan Pusat-Pusat Pertumbuhan di Kabupaten Penajam Paser Utara

No	Pusat	Luas Wilayah Administrasi (Ha)	Luas Kawasan Potensial Perkotaan (Ha)
1	Maridan	42.660	14.220
2	Sepaku	30.619	10.208
3	Semoi II	11.799	3.933
4	Waru	30.884	10.295
5	Babulu	19.997	6.666
6	Penajam	16.405	5.468
7	Petung	12.435	4.145

Sumber : RTRW Kabupaten Penajam Paser Utara

Ciri-ciri pusat pertumbuhan Petung dan Penajam ditandai oleh antara lain:

1. Pola penggunaan lahan yang didominasi oleh kegiatan non pertanian (perdagangan dan jasa)
2. Tempat pemusatan kegiatan sosial ekonomi yang mencirikan kegiatan perkotaan
3. Ketersediaan fasilitas sosial ekonomi yang cukup lengkap
4. Lokasi berada di persimpangan jalur jalan yang dapat memudahkan aksesibilitas ke segala penjuru wilayah di Kabupaten Penajam Paser Utara.

b. Fungsi Kota-Kota

Untuk mewujudkan struktur ruang dan arah pengembangan setiap perkotaan maka perlu adanya fungsi yang harus ditetapkan untuk setiap perkotaan sehingga ada ketegasan dalam kebijakan pengembangan perkotaan dimasa datang. Penetapan fungsi didasarkan pada pertimbangan :

1. Jenjang perkotaan tersebut
2. Jangkauan pelayanan perkotaan tersebut terhadap wilayah belakangnya
3. Karakteristik sosial ekonomi dan potensi sumber daya alam wilayah belakangnya yang memiliki keterkaitan yang kuat dengan perkotaan tersebut
4. Kedudukan perkotaan tersebut dalam skala regional

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka fungsi dari masing-masing kota di Kabupaten Penajam Paser Utara adalah sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.36.

Tabel 2.36
Arahan Fungsi Kawasan Pusat-Pusat Pertumbuhan Di Kabupaten Penajam Paser Utara

No	Hirarki	Lokasi	Luas Wilayah Perkotaan (Ha)	Desa/ Kelurahan yang termasuk Perkotaan	Fungsi Pusat Pertumbuhan
1	Hirarki I	Kota Penajam	2.000-3.000	Penajam, Nipah-nipah, Gunung Seteling dan Nenang	Fungsi sebagai pusat kegiatan ekonomi skala regional dan skala lokal, pelabuhan, pergudangan, terminal Tipe A, terminal agribisnis, industri, pemukiman, dan fasilitas sosial ekonomi yang berorientasi pelayanan antar kabupaten/ kota
2	Hirarki I	Kota Petung	1.000-2.000	Petung, Girimukti, Lawe-Lawe, Tanjung Tengah dan Saloloang	Fungsi sebagai pusat kegiatan ekonomi, pertambangan, militer, pariwisata, industri, pemukiman dan fasilitas sosial ekonomi yang berorientasi pelayanan intra kabupaten
3	Hirarki II	Kota Babulu	500-1.000	Babulu Darat, Labangka dan Gunung Makmur	Fungsi sebagai pusat pemerintahan skala lokal, kegiatan ekonomi, pertambangan, pemukiman, dan fasilitas sosial ekonomi
4	Hirarki II	Kota Maridan	500-1.000	Maridan dan Pamaluan	Fungsi sebagai kegiatan ekonomi, industri, pariwisata, pemukiman, dan fasilitas sosial ekonomi
5	Hirarki III	Kota Waru	500-1.000	Waru dan Sesulu	Fungsi sebagai pusat pemerintahan skala lokal, kegiatan ekonomi, pemukiman, dan fasilitas sosial ekonomi
6		Kota Sepaku	500-1.000	Sepaku, Sukaraja, dan Tengin Baru	Fungsi sebagai pusat pemerintahan skala lokal, kegiatan ekonomi, pemukiman, dan fasilitas sosial ekonomi
7		Kota Semoi II	500-1.000	Semoi II, Sukomulyo dan Argomulyo	Fungsi sebagai pusat kegiatan ekonomi, pemukiman, dan fasilitas sosial ekonomi

Sumber : RTRW Kabupaten Penajam Paser Utara

Untuk mewujudkan fungsi perkotaan di atas, maka selain mengandalkan sarana dan prasarana yang ada saat ini, maka perlu pula didukung oleh sarana dan prasarana baru sesuai dengan jangkauan/skala pelayanan setiap simpul pelayanan tersebut. Rinciannya dapat dilihat pada Tabel 2.37.

Tabel 2.37
Rencana Kebutuhan Sarana dan Prasarana di Pusat-pusat
Pertumbuhan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2012

No	Pusat	Perkiraan Jumlah Penduduk Tahun 2012	Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Tahun 2012
1	Penajam	13.396	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Sekolah kejuruan ✓ Pasar Grosir ✓ Pasar Ikan ✓ Pasar Ternak ✓ Terminal Tipe A ✓ Pergudangan ✓ Pelabuhan Penyeberangan ✓ Pelabuhan Samudera ✓ Pendaratan Ikan ✓ Taman Kota ✓ Rumah Sakit Umum Daerah ✓ Stadion/Kompleks Olah Raga
2	Petung	11.020	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Radio Daerah ✓ Pasar ✓ Terminal ✓ Pendidikan Tinggi/Akademi ✓ Taman Kota ✓ Sekolah Kejuruan
3	Babulu	10.241	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Sekolah kejuruan ✓ Terminal ✓ Taman ✓ Lapangan Olah Raga
4	Maridan	10.771	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Puskesmas ✓ Sekolah Kejuruan ✓ Lapangan Olah Raga ✓ Taman
5	Waru	9.046	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Sekolah Kejuruan ✓ Pasar Ikan ✓ Taman ✓ Lapangan Olah Raga
6	Sepaku	6.610	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Sekolah kejuruan ✓ Pasar Umum ✓ Terminal ✓ Taman ✓ Lapangan Olah Raga
7	Semoi II	6.920	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Puskesmas ✓ Sekolah kejuruan ✓ Taman ✓ Lapangan Olah Raga

Sumber : RTRW Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2002-2012

Mengacu pada sistem pusat pelayanan, maka pola perwilayahan Kabupaten Penajam Paser Utara dapat di bagi menjadi 3 (tiga) Wilayah Pembangunan (WP).

2.5.1.2 Pendekatan Homogenitas

Wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki potensi, permasalahan dan karakteristik yang cukup beragam demikian pula dengan perkotaannya atau simpul pelayanan yang ada. Melihat kondisi tersebut, maka diperlukan adanya spesifikasi pengembangan untuk setiap wilayah yang mencerminkan kesamaan atau dominasi fungsi yang ada sehingga dapat ditetapkan suatu wilayah pembangunan yang merupakan perwujudan dari kesamaan karakteristik wilayah, potensi dan permasalahan, kecenderungan perkembangan dan jangkauan simpul pelayanan yang ada. Masih banyaknya daerah yang belum berkembang dan adanya ketidakmampuan seluruh daerah yang ada untuk berkembang secara bersamaan maka dibutuhkan adanya simpul pelayanan yang diharapkan dapat memberikan pelayanan dan mendekatkan pelayanan terhadap masyarakat di daerah yang selama ini kurang berkembang.

Mengacu pada dasar pemikiran di atas, maka ditetapkan suatu konsep pembangunan yang berupa pembentukan wilayah pembangunan atau WP yang nantinya akan menjadi rujukan dan pedoman pembangunan di setiap WP tersebut.

Ada beberapa dasar pertimbangan yang dijadikan rujukan dalam penentuan setiap wilayah pembangunan tersebut, yaitu:

- Dominasi pemanfaatan ruang
- Kesamaan potensi dan permasalahan
- Jangkauan simpul pelayanan yang ada
- Kondisi geografis wilayah
- Aksesibilitas dan keterkaitan antar simpul pelayanan serta antara simpul pelayanan dengan wilayah pelayanannya.
- Jumlah penduduk di setiap wilayah

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dibagi dalam 3 (tiga) Wilayah Pembangunan (WP), yaitu :

- Wilayah Pembangunan (WP) Pedalaman
- Wilayah Pembangunan (WP) Utara
- Wilayah Pembangunan (WP) Selatan

WP Pedalaman dicirikan oleh morfologi bergelombang sampai berbukit, tidak atau kurang dipengaruhi oleh ekosistem pesisir dengan basis ekonominya sub sektor kehutanan dan perkebunan yang ditengarai oleh pengembangan kawasan khusus kehutanan dan perkebunan. Dalam WP Pedalaman terbagi dalam 2 (dua) kawasan, yaitu kawasan pedalaman dan kawasan pengembangan khusus. Fungsi Kawasan Pedalaman adalah sebagai pusat pemerintahan skala lokal, kegiatan ekonomi, industri agro forestry, pertambangan, pertanian tanaman pangan lahan kering, perkebunan, peternakan, kehutanan, pemukiman, dan fasilitas sosial ekonomi. Jangkauan pelayanan Kawasan Pedalaman meliputi Kelurahan Maridan, Kelurahan Pamaluan, Desa Bumi Harapan, Desa Bukit Raya, Desa Sukaraja, Kelurahan Tengin Baru, Kelurahan Sepaku, Desa Argomulyo, Desa Sukomulyo, Desa Semoi II, Desa Wonosari, Kelurahan Mentawir, Karang Jinawi, Telemow, dan Desa Binuang.

Fungsi dari Kawasan Pengembangan Khusus adalah sebagai pusat industri agroforestry, pertambangan, pertanian tanaman pangan lahan kering, perkebunan, kehutanan, pemukiman, dan fasilitas sosial ekonomi. Jangkauan pelayanan Kawasan Pengembangan Khusus meliputi Desa Labangka, Kelurahan Babulu Darat, Desa Api-api, Desa Sesulu, Kelurahan Waru, Kelurahan Nenang, Kelurahan Sepan, Kelurahan Sotek, Desa Bukit Subur, dan Desa Bangun Mulya.

Sedangkan WP Utara dan WP Selatan dicirikan oleh morfologi pedataran sampai bergelombang, banyak dipengaruhi oleh ekosistem pesisir dengan basis ekonominya sektor perkotaan, pertanian tanaman pangan dan perikanan. WP Utara mempunyai fungsi sebagai pusat

pemerintahan skala regional dan skala lokal, kegiatan ekonomi skala regional dan skala lokal, pertambangan, zona industri, pariwisata, pertanian tanaman pangan lahan basah, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan, pemukiman dan fasilitas sosial ekonomi. Jangkauan pelayanan WP Utara meliputi Kelurahan Penajam, Kelurahan Gunung Seteling, Kelurahan Nenang, Kelurahan Petung, Desa Girimukti, Kelurahan Lawe-lawe, Kelurahan Buluminung, Kelurahan Sepan, Kelurahan Pantailango, Kelurahan Gresik, Kelurahan Riko, Kelurahan Jenebora, Desa Bukit Subur, Kelurahan Sungai Parit, Kelurahan Sesumpu, Kelurahan Kampung Baru, Kelurahan Pejala, Kelurahan Saloloang, Kelurahan Tanjung Tengah, Kelurahan Pejala, Kelurahan Waru, Desa Sesulu, Desa Api-api dan Desa Bangun Mulya.

Fungsi WP Selatan adalah sebagai pusat pemerintahan skala lokal, kegiatan ekonomi, pertanian tanaman pangan lahan basah, pertambangan, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan, pemukiman, dan fasilitas sosial ekonomi. Jangkauan WP Selatan meliputi Desa Babulu Darat, Desa Labangka, Desa Gunung Makmur, Desa Sriraharja, Desa Rawa Mulya, Desa Gunung Intan, Desa Sumber Sari, Desa Babulu Laut, Desa Sebakung Jaya, Desa Gunung Mulya, dan Desa Labangka Barat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.19.

Melihat perkembangan wilayah kecamatan yang terjadi saat ini, maka ada potensi atau indikasi pemekaran wilayah kecamatan menjadi beberapa kecamatan baru, antara lain:

- Pembentukan Kecamatan Petung sebagai pemekaran dari Kecamatan Penajam
- Pembentukan Kecamatan Maridan sebagai pemekaran dari Kecamatan Sepaku

Tabel 2.38
Rencana Penetapan Wilayah Pembangunan (WP) Di Kabupaten
Penajam Paser Utara Tahun 2003-2012

No	WP	Pusat Pertumbuhan	Perkiraan Jumlah Penduduk Th 2012	Fungsi Wilayah
1	WP Pedalaman : A. WP Pedalaman : ✓ Kelurahan Maridan ✓ Kelurahan Pamaluan ✓ Desa Bumi Harapan ✓ Desa Bukit Raya ✓ Desa Sukaraja ✓ Desa Tengin Baru ✓ Kelurahan Sepaku ✓ Desa Argomulyo ✓ Desa Sukomulyo ✓ Desa Semoi II ✓ Desa Wonosari ✓ Kelurahan Mentawir ✓ Desa Karang Jinawi ✓ Desa Telemow ✓ Desa Binuang	Perkotaan Maridan	34.440	Fungsi sebagai pusat pemerintahan skala lokal, kegiatan ekonomi, industri agro foresty, pertambangan, pertanian tanaman pangan lahan kering, perkebunan, peternakan, kehutanan, pemukiman, dan fasilitas sosial ekonomi
	B. Kawasan Pengembangan Khusus : ✓ Desa Labangka ✓ Desa Babulu Darat ✓ Desa Api-api ✓ Desa Sesulu ✓ Kelurahan Waru ✓ Kelurahan Nenang ✓ Kelurahan Sepan ✓ Kelurahan Sotek ✓ Desa Bukit Subur ✓ Desa Bangun Mulya		2.346	Fungsi sebagai pusat industri agro foresty, pertambangan, pertanian tanaman pangan lahan kering, perkebunan, kehutanan, pemukiman, dan fasilitas sosial ekonomi
2	WP Utara : ✓ Kelurahan Penajam ✓ Kelurahan Gunung Seteleng ✓ Kelurahan Nenang ✓ Kelurahan Petung ✓ Desa Girimukti ✓ Kelurahan Lawe-lawe ✓ Kelurahan Buluminung, ✓ Kelurahan Sepan ✓ Kelurahan Pantailango ✓ Kelurahan Gresik ✓ Kelurahan Riko ✓ Kelurahan Jenebora ✓ Desa Bukit Subur ✓ Kelurahan Sungai Parit ✓ Kelurahan Sesumpu ✓ Kelurahan Kampung Baru	Perkotaan Penajam Petung	77.282	Fungsi sebagai pusat pemerintahan skala regional dan skala lokal, kegiatan ekonomi skala regional dan skala lokal, pertambangan, zona industri, pariwisata, pertanian tanaman pangan lahan basah, perkebunan, perikanan, peternakan kehutanan, pemukiman dan

No	WP	Pusat Pertumbuhan	Perkiraan Jumlah Penduduk Th 2012	Fungsi Wilayah
	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Kelurahan Pejala ✓ Kelurahan Saloloang ✓ Kelurahan Tanjung Tengah ✓ Kelurahan Pejala ✓ Kelurahan Waru ✓ Desa Sesulu ✓ Desa Api-api ✓ Kelurahan Nipah-nipah ✓ Desa Giri Purwa ✓ Desa Sidorejo 			fasilitas sosial ekonomi
3	WP Selatan : <ul style="list-style-type: none"> ✓ Desa Babulu Darat ✓ Desa Labangka ✓ Desa Gunung Makmur ✓ Desa Sriraharja ✓ Desa Rawa Mulya ✓ Desa Gunung Intan ✓ Desa Sumber Sari ✓ Desa Babulu Laut ✓ Desa Sebakung Jaya ✓ Desa Rintik ✓ Desa Gunung Mulya ✓ Desa Labangka Barat 	Perkotaan Babulu	28.326	Fungsi sebagai pusat pemerintahan skala lokal, kegiatan ekonomi, pertanian tanaman pangan lahan basah, pertambangan, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan, pemukiman, dan fasilitas sosial ekonomi

Sumber : RTRW Kabupaten Penajam Paser Utara

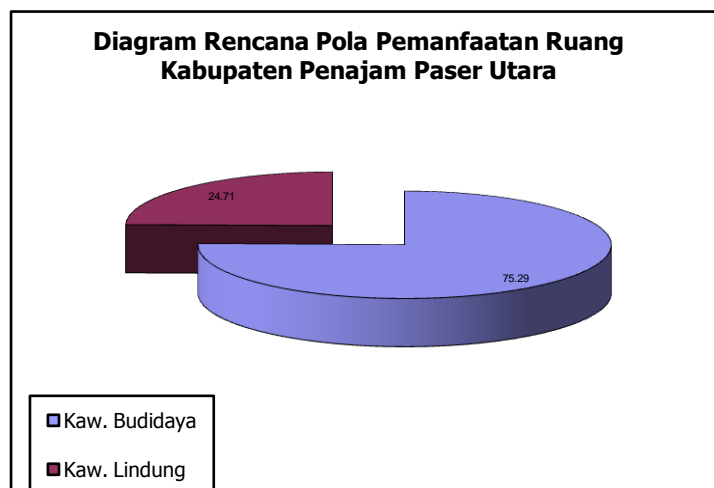
2.5.2 Rencana Pola Pemanfaatan Ruang

Rencana pola pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara merupakan arahan yang menggambarkan kriteria, fungsi, sebaran, dan luas dari masing-masing kawasan yang diarahkan untuk pengembangan sepuluh tahun mendatang. Rencana pola pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara secara umum terdiri dari kawasan lindung dan kawasan budi daya.

Kawasan adalah ruang yang merupakan satu kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional (fungsi utama lindung atau budi daya). Berdasarkan RTRW Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2002-2012, rencana pola pemanfaatan ruang untuk kawasan lindung seluas 82.349,00

ha atau 24,71%, untuk kawasan budi daya seluas ha 250.957,00 atau 75,29%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.37 dan Gambar 2.9.

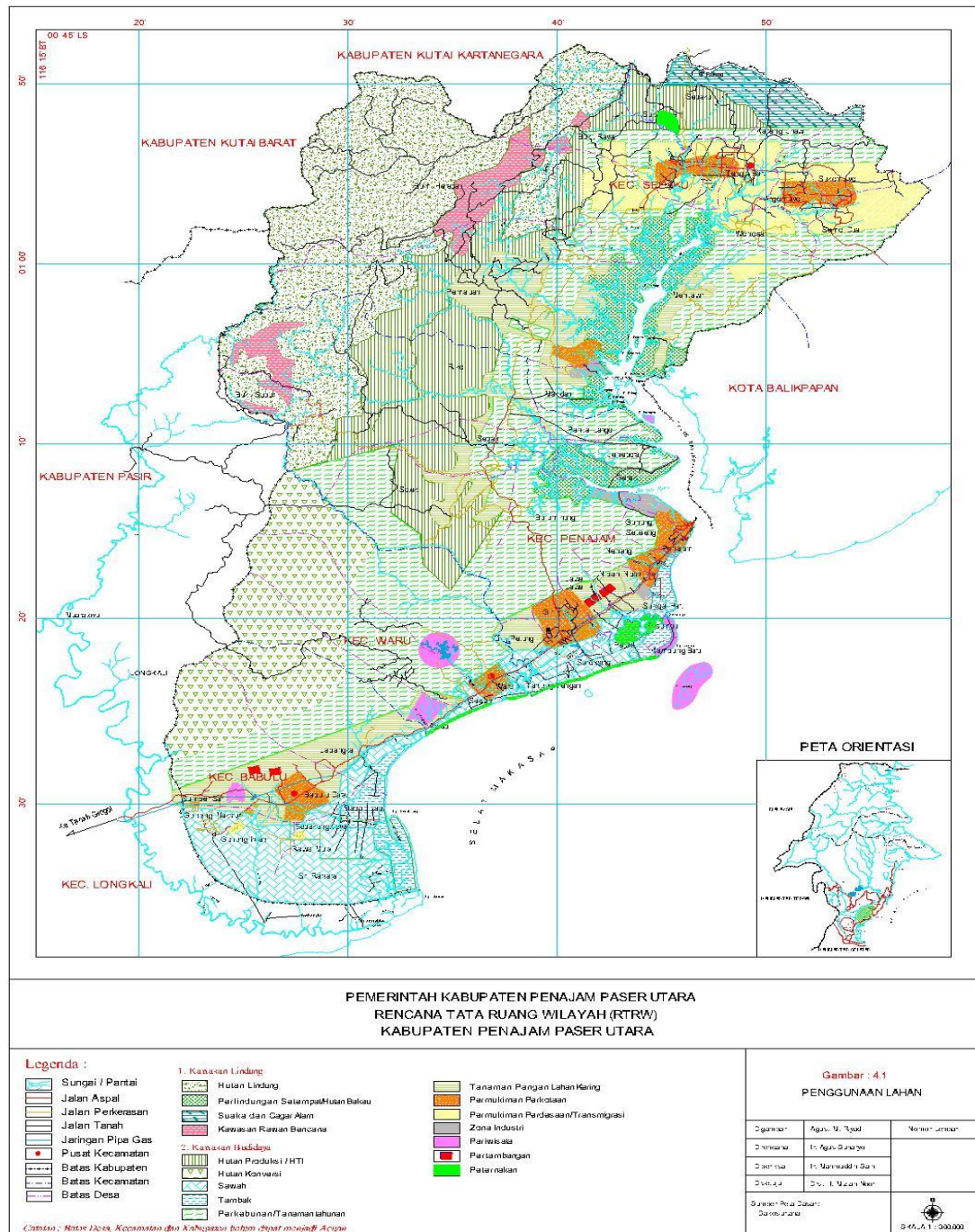
Gambar 2.9.
Diagram Rencana Pola Pemanfaatan Ruang Kab.Penajam Paser Utara



Tabel 2.39
Rencana pola pemanfaatan ruang wilayah Kab. Penajam Paser Utara

Rencana Pemanfaatan Ruang	Luas (Ha)	%
<ul style="list-style-type: none"> ■ Kawasan Lindung <ul style="list-style-type: none"> 1. Hutan Lindung 2. Perlindungan Setempat/Hutan Bakau 3. Suaka Margasatwa dan Cagar Alam 4. Kawasan Rawan Bencana Alam 	<div>57.471</div> <div>9.578</div> <div>6.900</div> <div>8.400</div>	<div>17,24</div> <div>2,87</div> <div>2,07</div> <div>2,52</div>
<ul style="list-style-type: none"> ■ Kawasan Budidaya <ul style="list-style-type: none"> 1. Kehutanan 2. Pertanian Tanaman Pangan Lahan Basah 3. Tambak 4. Perkebunan 5. Tanaman Pangan Lahan Kering 6. Tanaman Tahunan 7. Permukiman Perkotaan 8. Permukiman Perdesaan/Transmigrasi 9. Zona Industri 10. Pariwisata 11. Pertambangan 	<div>39.000</div> <div>14.339</div> <div>5.600</div> <div>100.212</div> <div>23.400</div> <div>18.900</div> <div>7.250</div> <div>27.000</div> <div>2.000</div> <div>3.500</div> <div>9.756</div>	<div>11,70</div> <div>4,30</div> <div>1,68</div> <div>30,07</div> <div>7,02</div> <div>5,67</div> <div>2,18</div> <div>8,10</div> <div>0,60</div> <div>1,05</div> <div>2,93</div>
<i>Jumlah</i>	333.306	100,00

Sumber : RTRW Kabupaten Penajam Paser Utara



Gambar 2.10. Peta Penggunaan Lahan di Kabupaten Penajam Paser Utara

2.6 TINJAUAN EKONOMI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2000 – 2009

2.6.1 Kondisi Ekonomi Daerah

Sektor pertanian merupakan sektor yang unik dan mempunyai ciri khas tersendiri dalam sektor perekonomian. Pertanian dalam arti luas mencakup pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan mempunyai potensi yang cukup besar untuk dikembangkan sehingga pertanian merupakan modal pembangunan utama di Kabupaten Penajam Paser Utara. Secara umum, kontribusi sektor pertanian Kabupaten PPU dalam menyusun PDRB tidaklah sebesar sektor pertambangan dan penggalian dan penggalian yang pada tahun 2009 mencapai 845.231 juta rupiah. Selisih 382.556 juta rupiah dari sektor pertanian yang hanya 462.675 juta rupiah per 2009.

Sektor pertanian pangan yang cukup potensial untuk dikembangkan terutama untuk komoditas padi dan jagung, karena terdapat di semua wilayah kecamatan, sehingga Kabupaten Penajam Paser Utara dapat diandalkan sebagai pemasok untuk skala lokal maupun regional. Meskipun demikian, pengembangan sektor pertanian masih dirasakan belum optimal disebabkan masih banyaknya kendala seperti produktivitas dan kualitas produk yang masih rendah, terbatasnya jaringan pemasaran dan besarnya lahan potensial yang kurang dimanfaatkan. Kurangnya penguasaan teknologi yang tepat guna bagi pertanian rakyat merupakan juga penyebab masih rendahnya daya saing komoditas pertanian daerah.

Artinya, Kabupaten PPU mempunyai potensi cukup besar untuk tanaman pangan. Luas panen padi sawah pada tahun 2009 mencapai 11.686 ha. Luas ini mengalami penurunan sebesar 21,08 % di bandingkan tahun 2008. Sedangkan untuk luas panen padi Ladang naik sebesar 34,79% dibanding tahun 2008.

Kondisi tersebut berbanding lurus dengan naiknya luas panen padi sawah, nilai produksi padi sawah juga mengalami peningkatan. Produksi

padi sawah pada tahun 2009 mengalami turun sebesar 21,08 %, yaitu dari 76.301 ton pada tahun 2008 turun menjadi 60.276 ton pada tahun 2009, sedangkan produksi padi ladang juga turun dari 3.425 ton pada tahun 2008 menjadi 2.238 ton tahun 2009 atau turun sebesar 21,00 %. Hal ini terbukti Kabupaten Penajam Paser Utara terkenal sebagai sentra produksi padi di Kalimantan Timur yaitu di Kecamatan Babulu mempunyai andil terbesar produksi padi sawah yaitu yaitu 61,06 % dari total produksi Kabupaten. Kemudian Kecamatan Penajam mempunyai andil sebesar 21,50 %, sedangkan untuk produksi padi ladang, kecamatan Sepaku merupakan penyumbang terbesar yaitu 73,32 % kemudian Kecamatan Penajam 12,02 % dari total produksi padi ladang Kabupaten.

Sementara itu disamping padi, kabupaten PPU juga menghasilkan beberapa komoditas palawija seperti jagung, kedelai, kacang tanah dan ubi kayu; dengan luas tanam pada 2002 berturut-turut 282 ha jagung, 33 ha kedelai, 98 ha kacang tanah dan 317 ha ubi kayu; dengan produksi masing-masing 564 ton, 35 ton, 96 ton dan 4.082 ton.

Sektor pertanian yang selama ini menjadi salah satu sektor unggulan Kabupaten Penajam Paser Utara terbukti dapat berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah bahkan dapat dikatakan bersaing dengan pemasukan dari sektor pertambangan dan penggalian dan penggalian yang pada tahun 2009 mencapai 845.231 juta rupiah atau selisih 382,556 juta rupiah dari sektor pertanian yang hanya 462,675 juta rupiah per 2009. Angka tersebut dapat terus meningkat dan bersaing hingga dapat disejajarkan bahkan melebihi pemasukan dari sektor Pertambangan dan penggalian. Hal ini cukup beralasan, mengingat luas lahan pertanian di 4 Kecamatan yang ada, yakni Kecamatan Penajam, Waru, Babulu dan Sepaku, Kecamatan Babulu dengan luas 399,45 untuk lahan pertaniannya adalah 355,71 Ha, Kecamatan Penajam dengan luas keseluruhan 1.207,37 Ha lahan pertaniannya 1.036,70, Kecamatan Waru dengan luas 553,88 Ha lahan pertaniannya dan Kecamatan Sepaku luas 1,172,36 Ha areal pertaniannya 1.012 Ha.

Pada sektor pertanian dimungkinkan adanya spesialisasi tanaman atau komoditas pada masing-masing kecamatan, seperti Kecamatan Babulu yang menghasilkan padi sawah hingga 61,06 % dari total produksi Kabupaten dan Kecamatan Penajam sebesar 21,50%. hal ini dibutuhkan untuk menjaga kualitas dan kuantitas hasil pertanian.

Dengan demikian dimungkinkan adanya diversifikasi dan ekstensifikasi pertanian terutama untuk komoditas palawija seperti jagung, kedelai, kacang tanah dan ubi kayu. Komoditas ini kurang dioptimalkan, hal ini dapat dilihat dari luas tanam pada 2002 yang hanya (berturut-turut) 282 ha jagung, 33 ha kedelai, 98 ha kacang tanah dan 317 ha ubi kayu; dengan produksi masing-masing 564 ton, 35 ton, 96 ton dan 4.082 ton mengingat Luas Lahan Pengembangan pertanian lahan basah 24.284,07 Ha, dan Luas Lahan Pengembangan pertanian lahan kering yang mencapai 34.024,87 Ha.

2.6.2 Perkembangan PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan total nilai tambah seluruh aktifitas ekonomi di suatu region/wilayah. Dengan kata lain, data PDRB menggambarkan kemampuan suatu wilayah dalam mengelola Sumber Daya Alam (SDA) yang dimiliki sehingga tercipta nilai tambah.

Pada tahun 2009 PDRB Kabupaten Penajam Paser Utara atas dasar harga berlaku dengan migas sebesar 2,438 trilyun rupiah, sedangkan pada tahun 2008 sebesar 2,437 trilyun rupiah. Dengan kata lain PDRB tahun 2009 atas dasar harga berlaku tumbuh sebesar 0,04 persen dibandingkan tahun 2008 sebesar 10,53 persen. Sedangkan jika dihitung tanpa migas, PDRB tahun 2009 sebesar 1,601 trilyun rupiah, dan tahun 2008 sebesar 1,425 trilyun rupiah, atau tumbuh sebesar 12,39 persen. PDRB atas dasar harga konstan pada tahun 2009 dengan migas sebesar 1,847 trilyun rupiah, sedangkan pada tahun 2008 sebesar 1,787 trilyun rupiah, atau tumbuh sebesar 3,39 persen. Sedangkan PDRB tanpa migas atas dasar harga konstan pada tahun 2009 sebesar 1,121 trilyun rupiah, tahun 2008

sebesar 1,069 trilyun rupiah, atau tumbuh sebesar 4,88 persen. Artinya bahwa pada tahun 2009, PDRB Kabupaten Penajam Paser Utara mengalami pertumbuhan positif. Namun pada pertumbuhan PDRB dengan migas laju pertumbuhannya lebih lambat dibandingkan pada PDRB tanpa migas. Ini disebabkan produksi minyak bumi pada tahun 2009 mengalami sedikit kenaikan.

2.6.3 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat dilihat dari pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK). Hal ini dikarenakan pertumbuhan ADHK merupakan pertumbuhan riil faktor-faktor produksi tanpa dipengaruhi faktor perubahan harga (inflasi/deflasi). Angka pertumbuhan tersebut menggambarkan peningkatan aktifitas perekonomian di suatu daerah dalam kurun waktu tertentu.

Selama kurun waktu 2000 – 2009 perekonomian di Kabupaten Penajam Paser Utara selalu mengalami pertumbuhan positif. Artinya bahwa aktifitas perekonomian di Kabupaten Penajam Paser Utara pada kurun waktu tersebut terus mengalami peningkatan. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dikatakan tidak tumbuh jika pertumbuhan ekonomi atau pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan nilainya 0 (nol). Jika dihitung dengan migas, laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun 2009 adalah sebesar 3,39 persen, dan pada tahun 2008 sebesar 4,99 persen. Dengan kata lain, laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun 2007 ini mengalami kenaikan. Kenaikan laju pertumbuhan ekonomi ini disebabkan oleh pertumbuhan positif yang terjadi pada Sektor Pertambangan dan Penggalan. Dan Sektor Pertambangan dan Penggalan ini merupakan sektor yang paling dominan dalam pembentukan PDRB Kabupaten Penajam Paser Utara, sehingga sangat mempengaruhi laju pertumbuhan PDRB.

Rincian mengenai perkembangan dan laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Penajam Paser Utara dengan migas pada tahun 2000 - 2009 bisa dilihat pada table 2.40 berikut :

Tabel 2.40
Perkembangan dan Laju Pertumbuhan PDRB DENGAN MIGAS
Tahun 2000 – 2009 (Juta Rupiah)

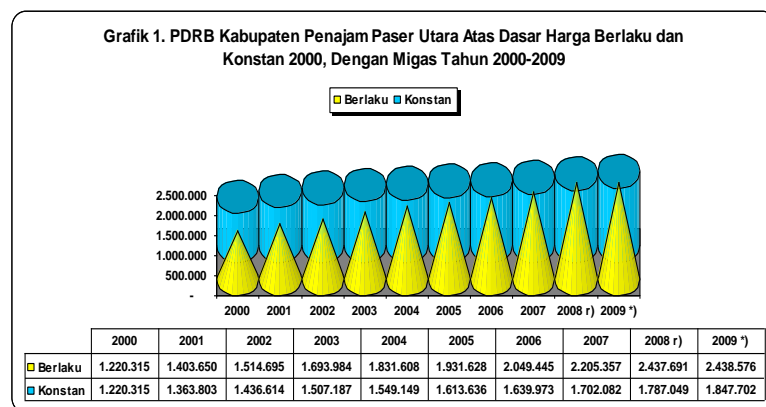
Tahun	ADHB	ADHK 2000	Laju Pertumbuhan (%)	
			ADHB	ADHK
2000	1.220.315	1.220.315	-	-
2001	1.403.815	1.363.803	15,04	11,76
2002	1.514.695	1.436.614	7,90	5,34
2003	1.693.984	1.507.187	11,84	4,91
2004	1.831.608	1.549.149	8,12	2,78
2005	1.931.628	1.613.636	5,46	4,16
2006	2.049.445	1.639.973	6,10	1,63
2007	2.205.357	1.702.082	7,61	3,79
2008 ^{r)}	2.437.691	1.787.049	10,53	4,99
2009 ^{*)}	2.438.576	1.847.702	0,04	3,39

Sumber: BPS Kab. PPU

Keterangan : ^{*)} angka sementara

^{r)} angka revisi

Gambar 2.11.
Grafik PDRB Kab. Penajam Paser Utara Atas Dasar Harga Berlaku dan
Konstan 2000, Dengan Migas Tahun 2000-2009



Sedangkan jika dihitung tanpa migas, laju pertumbuhan ekonomi tahun 2009 sebesar 4,88 persen, dan pada tahun 2008 tumbuh sebesar 8,33 persen. Laju pertumbuhan ekonomi tahun 2009 ini merupakan laju pertumbuhan terendah selama kurun waktu 2000 – 2009. Fenomena perbedaan laju pertumbuhan ekonomi antara PDRB dengan migas dan

PDRB tanpa migas ini memperlihatkan perlunya menumbuhkan perekonomian masyarakat diluar sektor migas. Pertumbuhan ekonomi jika dihitung tanpa migas tahun 2000 – 2009 dapat dilihat pada Tabel 2.41.

Tabel 2.41
Perkembangan Dan Laju Pertumbuhan PDRB TANPA MIGAS
Tahun 2000 – 2009 (Juta Rupiah)

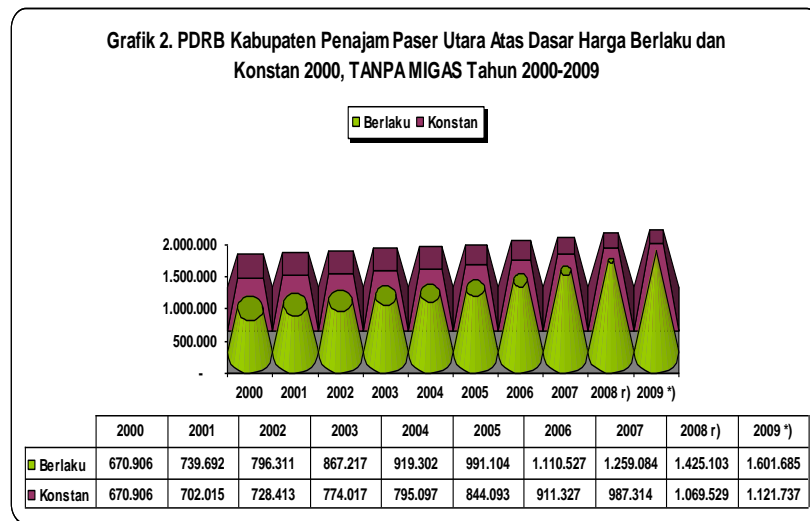
Tahun	ADHB	ADHK 2000	Laju Pertumbuhan (%)	
			ADHB	ADHK
2000	670906	670906	-	-
2001	739857	702015	10,28	4,64
2002	796311	728413	7,63	3,76
2003	867217	774017	8,90	6,26
2004	919302	795097	6,01	2,72
2005	991104	844093	7,81	6,16
2006	1110527	911327	12,05	7,97
2007	1261345	987314	13,58	8,34
2008 ^{r)}	1425103	1069529	13,19	8,38
2009 ^{*)}	1601685	1121737	12,39	4,88

Sumber: BPS Kab. PPU

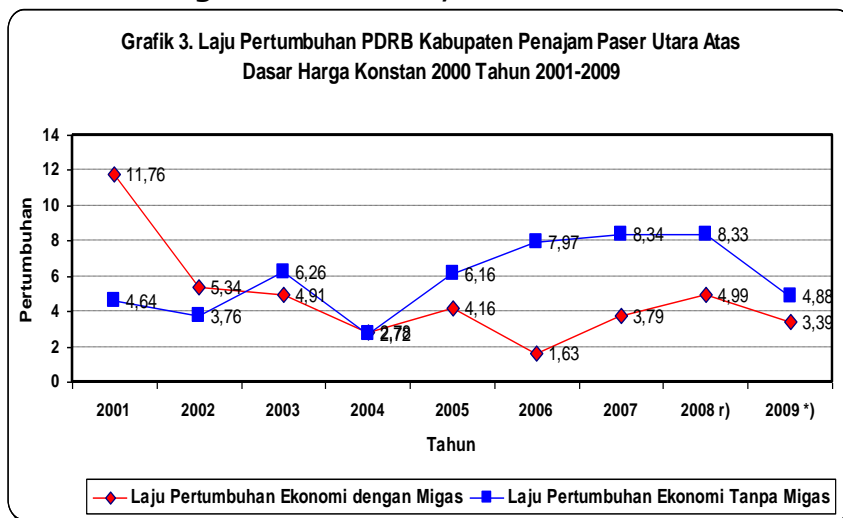
Keterangan : ^{*)} angka sementara

^{r)} angka revisi

Gambar 2.12.
Grafik PDRB Kab. Penajam Paser Utara Atas Dasar Harga Berlaku dan
Konstan 2000, Tanpa Migas Tahun 2000-2009



Gambar 2.13.
Grafik Laju Pertumbuhan PDRB Kab. Penajam Paser Utara Atas Dasar
Harga Konstan 2000, Tahun 2001-2009



2.6.4 Pertumbuhan Ekonomi Sektoral

Pertumbuhan ekonomi sektoral merupakan pertumbuhan ekonomi dari sembilan sektor ekonomi. Dan rata-rata dari sembilan sektor ekonomi tersebut membentuk pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi regional berkaitan erat dengan pertumbuhan masing-masing sektor dan sub sektor.

Sektor yang mendominasi perekonomian Kabupaten Penajam Paser Utara yaitu Sektor Pertambangan dan Penggalan. Sehingga pergerakan produksi maupun harga pada komoditas minyak mentah sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Penajam Paser Utara.

Tabel 2.42
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten PPU Tahun 2004-2009 (%)

No	Lapangan Usaha	Pertumbuhan (%)					
		2004	2005	2006	2007	2008*)	2009*)
1.	Pertanian	5,43	7,05	14,29	8,25	7,74	-0,58
2.	Pertambangan & Penggalan	2,85	2,07	-5,26	-1,86	0,42	1,22
3.	Industri Pengolahan	-6,91	8,11	8,12	9,57	7,52	5,69
4.	Listrik, Gas, dan Air	7,41	9,94	12,58	8,49	13,79	11,63
5.	Bangunan	2,77	5,30	3,14	8,57	4,99	6,59
6.	Perdagangan, Htl & Rest	13,46	3,53	1,72	5,46	9,77	7,73
7.	Pengangkutan & Komunikasi	4,43	4,22	3,94	6,00	5,78	6,18
8.	Keuangan	8,93	6,34	3,96	3,95	7,73	8,30
9.	Jasa	7,86	3,68	16,87	16,87	14,15	6,98

No	Lapangan Usaha	Pertumbuhan (%)					
		2004	2005	2006	2007	2008 ^{r)}	2009 ^{*)}
	PDRB Kab.PPU	4,91	2,78	4,16	1,63	4,99	3,39
	PDRB Kab. PPU @	2,72	6,16	7,97	8,34	8,33	4,88

Sumber: PDRB Kab. PPU Tahun 2010

Keterangan: r) = angka revisi *) = angka sementara @Tanpa Migas

Dari tabel 3 di atas dapat dilihat angka pertumbuhan sektor-sektor ekonomi Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun 2009. Angka pertumbuhan yang positif menunjukkan bahwa nilai tambah bruto (NTB) sektor tersebut meningkat, di lain pihak besar kecilnya angka pertumbuhan menunjukkan tingkat laju pertumbuhannya, apabila angka pertumbuhan lebih besar dari angka pertumbuhan tahun sebelumnya artinya laju pertumbuhan tahun ini lebih cepat dibanding tahun sebelumnya, demikian sebaliknya bila lebih kecil berarti pertumbuhannya mengalami perlambatan. Sebaliknya, angka pertumbuhan negatif menunjukkan bahwa NTB sektor tersebut menurun dibandingkan tahun sebelumnya.

Jika kita amati, Sektor yang mengalami **pertumbuhan tertinggi** pada tahun 2009 ini adalah **Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih**, dengan pertumbuhannya sebesar 11,63 persen. Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih dibentuk dari dua sub sektor, yaitu Sub Sektor Listrik dan Sub Sektor Air Bersih. Dari kedua Sub Sektor ini, Sub Sektor Listrik memiliki pertumbuhan tinggi, yaitu sebesar 13,64 persen. Hal ini disebabkan karena adanya perbaikan mesin-mesin pembangkit lama sehingga kinerjanya bisa dioptimalkan. Dengan adanya penambahan daya listrik ini maka mengurangi terjadinya pemadaman listrik di Kabupaten Penajam Paser Utara selama tahun 2009 yang otomatis menyebabkan kenaikan pemakaian listrik di masyarakat. Sedangkan Sub Sektor Air Bersih memiliki nilai pertumbuhan yang tidak terlalu besar, yaitu sebesar 3,11 persen.

Peringkat kedua tertinggi pertumbuhannya yaitu Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan, dengan angka pertumbuhan pada tahun 2009 sebesar 8,30 persen. Pada Sektor ini, Sub Sektor Bank memiliki

angka pertumbuhan sebesar 12,25 persen. Kondisi ini terjadi karena adanya penambahan bank di Kabupaten Penajam Paser Utara yaitu dibukanya cabang baru Bank Mandiri pada tahun 2009.

Pada tahun 2009 Sektor Pertambangan dan Penggalian mengalami pertumbuhan yang relatif kecil, yaitu sebesar 1,22 persen. Hal ini disebabkan oleh produksi minyak mentah yang berada di Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun 2009 mengalami kenaikan dibandingkan produksi tahun 2008. Padahal Sektor Pertambangan dan Penggalian merupakan sektor yang paling dominan dalam pembentukan PDRB Kabupaten Penajam Paser Utara. Ini berakibat pada rendahnya pertumbuhan PDRB jika dihitung dengan migas. Bahkan pada tahun 2009, pertumbuhan PDRB dengan migas tumbuh sebesar 3,39 persen. Jika dibandingkan dengan penghitungan PDRB tanpa migas, yang tumbuh sebesar 4,88 persen, terdapat selisih angka pertumbuhan yang signifikan. Yang perlu dicermati bersama adalah pertumbuhan pada Sektor Pertanian. Pada tahun 2009 Sektor Pertanian mengalami pertumbuhan yang melambat jika dibandingkan dengan pertumbuhan pada tahun 2008 yaitu sebesar -0,58 persen. Pada Sub Sektor Tanaman Bahan Makanan terjadi pertumbuhan yang melambat yaitu -22,26 persen, lebih kecil jika dibandingkan tahun 2008 sebesar 4,33 persen. Hal ini dikarenakan adanya pengaruh dari La Nina yang mengakibatkan terjadinya musim kemarau yang panjang, sehingga menyebabkan pergeseran musim tanam dan musim panen. Seharusnya petani melakukan penanaman padi pada sub round 2 tahun 2009 (bulan Mei – Juli 2009) dan panen pada sub round 3 tahun 2009 (bulan September - Desember 2009), kemudian bergeser menjadi melakukan penanaman padi pada sub round 3 (bulan September – Desember 2009) dan melakukan panen pada sub round 1 tahun 2010 (bulan Januari – April 2010).

2.6.5 Struktur Perekonomian Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2009

Struktur perekonomian di Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun 2009 tidak banyak mengalami perubahan secara peringkat. Untuk lebih rincinya dapat dilihat pada tabel 5, yaitu Tabel Kontribusi Nilai Tambah Bruto Sektoral atas dasar harga berlaku. Yang menggambarkan seberapa besar peranan atau kontribusi masing-masing sektor dan sub sektor dalam pembentukan nilai PDRB total.

Sejak dimasukkannya produksi minyak mentah ke dalam penghitungan PDRB Kabupaten Penajam Paser Utara, Sektor Pertambangan dan Penggalan merupakan sektor yang paling dominan di kabupaten ini. Pada tahun 2009 Sektor Pertambangan dan Penggalan memiliki kontribusi sebesar 34,66 persen. Dibandingkan tahun 2008, kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalan sedikit mengalami penurunan. Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalan tahun 2009 sebesar 41,85 persen. Sedangkan sektor yang memiliki kontribusi terbesar kedua adalah Sektor Pertanian, yaitu sebesar 18,97 persen. Sedangkan Sektor Industri Pengolahan memiliki kontribusi pada peringkat ketiga terbesar, dengan kontribusi terhadap PDRB sebesar 18,19 persen. Sektor selanjutnya adalah Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran dengan kontribusinya sebesar 15,65 persen.

Sektor-sektor lainnya memiliki kontribusi yang relatif kecil, dibawah 5 persen. Sehingga tidak terlalu mempengaruhi perekonomian Kabupaten Penajam Paser Utara. Namun perlu kita cermati bersama bahwa sektor andalan di Kabupaten Penajam Paser Utara saat ini, yaitu Sektor Pertambangan dan Penggalan, yang mengandalkan produksi minyak mentah, kita ketahui bahwa komoditas minyak merupakan komoditas yang tidak dapat diperbaharui, sehingga suatu saat pasti akan habis. Sehingga perlu langkah-langkah untuk mendongkrak perekonomian Kabupaten Penajam Paser Utara dari sektor-sektor lain yang potensial,

seperti Sektor Pertanian, Sektor Industri Pengolahan dan Sektor Perdagangan.

Rincian tabulasi Struktur Ekonomi di Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2002– 2009 dapat dilihat pada tabel 4.43.

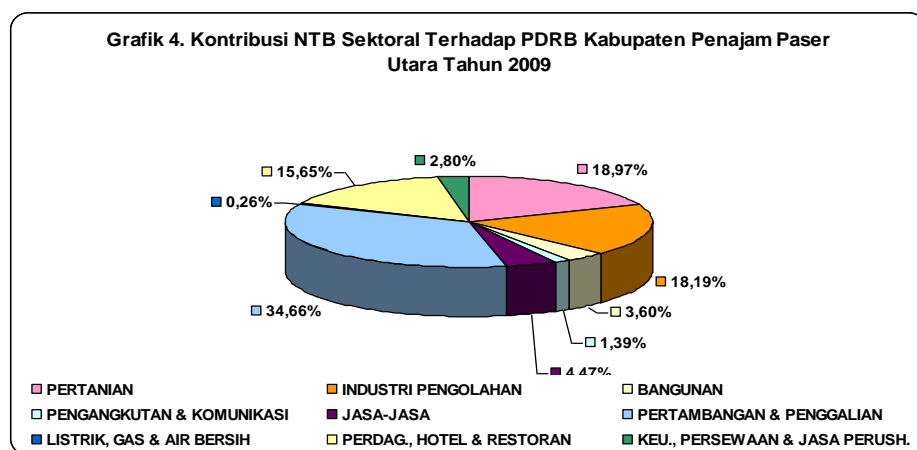
Tabel 2.43.
Struktur Ekonomi Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2002 - 2009
(%) (Kontribusi NTB Sektoral Terhadap PDRB ADHB)

No	Lapangan Usaha	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008 ^{r)}	2009 ^{*)}
1.	Pertanian	12,69	12,29	13,08	13,52	14,97	16,58	17,62	18,97
2.	Pertambangan & Penggalian	47,72	49,09	50,11	49,01	46,14	43,19	41,85	34,66
3.	Industri Pengolahan	19,63	17,97	14,71	14,58	15,30	16,21	15,82	18,19
4.	Listrik, Gas, dan Air	0,15	0,15	0,16	0,17	0,19	0,21	0,22	0,26
5.	Bangunan	1,87	2,97	3,13	3,26	3,28	3,52	3,36	3,60
6.	Perdagangan, Htl & Rest	11,64	11,32	12,28	12,82	13,00	12,77	13,31	15,65
7.	Pengangkutan & Komunikasi	1,22	1,17	1,23	1,27	1,30	1,31	1,29	1,39
8.	Keuangan	2,22	2,15	2,21	2,28	2,29	2,40	2,49	2,80
9.	Jasa	2,87	2,89	3,08	3,09	3,53	3,82	4,04	4,47
Total		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: PDRB Kab. PPU Tahun 2010

Keterangan: r) = angka revisi *) = angka sementara

Gambar 2.14.
Grafik Kontribusi NTB Sektoral Terhadap PDRB Kab. Penajam Paser Utara Tahun 2009



2.6.6 PDRB Perkapita Dan Pendapatan Regional Perkapita

Perkembangan PDRB perkapita dan pendapatan perkapita Kabupaten Penajam Paser Utara atas dasar harga berlaku dari tahun ke

tahun juga terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2009 PDRB perkapita sebesar 18,11 juta rupiah, sedangkan pada tahun 2008 PDRB perkapita sebesar 18,43 juta rupiah. Penurunan PDRB perkapita tersebut diikuti oleh penurunan pendapatan perkapita. Pada tahun 2009 pendapatan perkapita sebesar 15,49 juta rupiah, sedangkan pada tahun 2008 sebesar 15,76 juta rupiah.

Penurunan PDRB perkapita tersebut diikuti oleh penurunan pendapatan perkapita. Pada tahun 2009 pendapatan perkapita sebesar 15,49 juta rupiah, sedangkan pada tahun 2008 sebesar 15,76 juta rupiah.

Kenaikan PDRB perkapita maupun pendapatan perkapita dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu kenaikan PDRB itu sendiri dan pertambahan penduduk. Jika PDRB tumbuh lebih cepat dari pertumbuhan penduduk, maka pendapatan perkapita akan mengalami peningkatan yang lebih cepat juga, namun sebaliknya jika PDRB tumbuh lebih lambat dari pertumbuhan penduduk, maka pertumbuhannya akan melambat juga.

Tabel 2.44.
PDRB Perkapita Dan Pendapatan Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Dan Konstan, Dengan Migas Tahun 2000 – 2009 (Juta Rupiah)

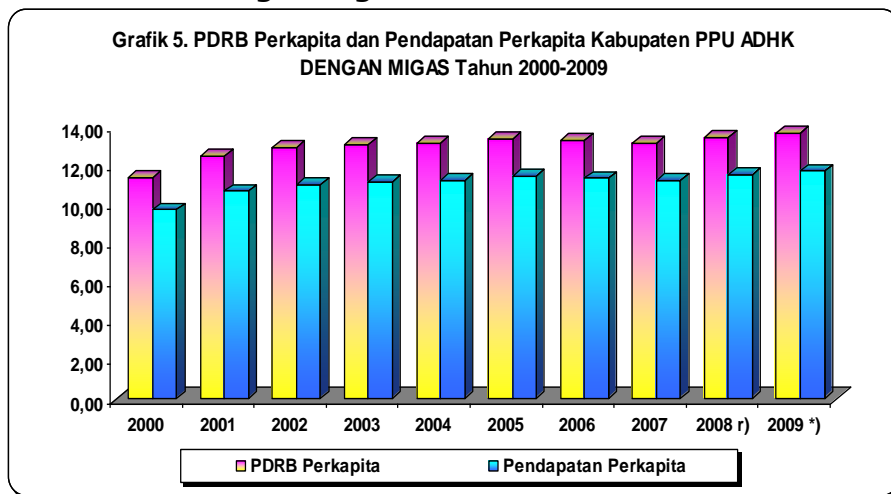
Tahun	PDRB Perkapita		Pendapatan Perkapita	
	Berlaku	Konstan 2000	Berlaku	Konstan 2000
2000	11,39	11,39	9,73	9,73
2001	12,89	12,52	11,02	10,70
2002	13,64	12,94	11,66	11,06
2003	14,74	13,11	12,60	11,21
2004	15,56	13,16	13,31	11,25
2005	16,03	13,39	13,71	11,45
2006	16,62	13,30	14,21	11,37
2007	17,08	13,18	14,60	11,27
2008 ^{r)}	18,44	13,51	15,76	11,55
2009 ^{*)}	18,11	13,73	15,49	11,74

Sumber: PDRB Kab.PPU Tahun 2010

Keterangan : ^{*)} angka sementara

^{r)} angka revisi

Gambar 2.15.
Grafik PDRB Perkapita dan Pendapatan Perkapita Kabupaten PPU ADHB
Dengan Migas Tahun 2000-2009



Sedangkan jika produksi minyak mentah tidak diperhitungkan dalam penghitungan PDRB, maka PDRB per kapita dan pendapatan per kapita bisa dilihat pada tabel 2.45 berikut ini:

Tabel 2.45.
PDRB Perkapita Dan Pendapatan Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Dan Konstan, Tanpa Migas Tahun 2000 – 2009 (Juta Rupiah)

Tahun	PDRB Perkapita		Pendapatan Perkapita	
	Berlaku	Konstan 2000	Berlaku	Konstan 2000
2000	6,26	6,26	5,35	5,35
2001	6,79	6,44	5,81	5,51
2002	7,17	6,56	6,13	5,61
2003	7,54	6,73	6,45	5,76
2004	7,81	6,76	6,68	5,78
2005	8,23	7,01	7,03	5,99
2006	9,01	7,39	7,70	6,32
2007	9,75	7,65	8,34	6,54
2008 ^{r)}	10,78	8,09	9,21	6,91
2009 ^{*)}	11,90	8,33	10,17	7,12

Sumber: PDRB Kab. PPU Tahun 2010

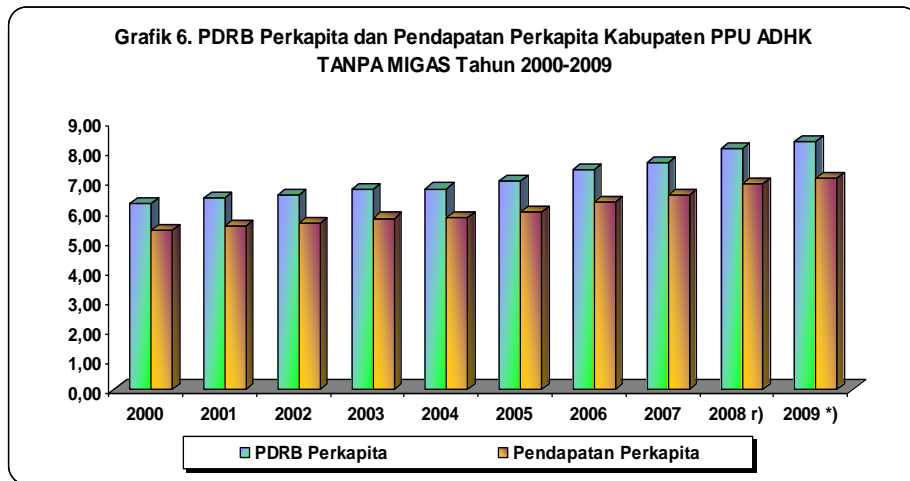
Keterangan : ^{*)} angka sementara

^{r)} angka revisi

Dari tabel 2.45 di atas bisa dilihat bahwa jika produksi minyak mentah tidak diperhitungkan, maka PDRB per kapita tahun 2009 sebesar 11,90 juta rupiah, dan pada tahun 2008 sebesar 10,78 juta rupiah.

Sedangkan pendapatan per kapita tahun 2009 sebesar 10,17 juta rupiah, dan pada tahun 2008 sebesar 9,21 juta rupiah.

Gambar 2.16.
Grafik PDRB Perkapita dan Pendapatan Perkapita Kabupaten PPU ADHB Tanpa Migas Tahun 2000-2009



2.7 POTENSI SEKTORAL KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

2.7.1 Pertanian

2.7.1.1 Pertanian Tanaman Pangan

Secara umum, produksi tanaman pangan utama yang dihasilkan oleh Kabupaten Penajam Paser Utara adalah berupa padi, palawija dan tanaman sayur serta buah-buahan semusim. Namun demikian, sama seperti daerah-daerah prural lain di Indonesia, produksi tanaman pangan utama yang dihasilkan adalah berupa padi.

Seluruh kecamatan dalam hal ini menghasilkan produksi padi yang bervariasi. Pada Tabel 2.46 ditunjukkan bahwa areal sawah terluas terdapat di Kecamatan Babulu yaitu seluas 7.135 Ha dengan produksi pertahun sebesar 36.802 ton atau dengan produktivitas lahan sebesar 5,16 ton/Ha. Sedangkan areal ladang padi terluas terdapat di Kecamatan Sepaku yaitu seluas 676 Ha, dan produktivitas padi ladang tertinggi terdapat di Kecamatan Sepaku dengan produktivitas sebesar 2.43 ton/Ha.

Tabel 2.46
Luas Panen Dan Produksi Padi
Menurut Kecamatan Tahun 2005-2009

No	Kecamatan	Padi Sawah			Padi Ladang		
		Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas
1	Babulu	7.135	36.802	5,16	90	218	2,42
2	Waru	672	3.466	5,16	49	110	2,24
3	Penajam	2.513	12.962	5,16	111	269	2,42
4	Sepaku	1.366	7.046	5,16	676	1.641	2,43
	Jumlah 2009	11.686	60.276	5,16	926	2.238	2,42
	2008	14.807	76.301	5.15	1.420	3.425	2.41
	2007	14.231	72.578	4.99	1.374	3.146	2.29
	2006	12.906	66.117	5.12	1.035	2.372	2.29
	2005	11.081	57.104	5.15	1.461	3.562	2.44

Sumber: Kabupaten Penajam Paser Utara Dalam Angka Tahun 2010

Penelaahan agregat produksi padi Kabupaten Penajam Paser Utara menunjukkan bahwa selama periode 2005-2009 terdapat kecenderungan peningkatan produktivitas padi sawah dan padi ladang.

Selanjutnya produksi tanaman pangan lain yang tersebar di 4 kecamatan di Penajam Paser Utara berupa tanaman palawija yang terdiri dari komoditas jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kedelai, dan kacang tanah. Daerah penghasil utama jagung tertinggi terdapat di Kecamatan Babulu. Dengan luas areal 474 Ha dihasilkan sebanyak 1.040 ton komoditas jagung atau dengan rata-rata produktivitas sebesar 2,19 ton/ha.

Tabel 2.47
Luas Panen Dan Produksi Palawija
Menurut Kecamatan Tahun 2009 (ton)

No	Kecamatan	Jagung		Ubi Kayu		Ubi Jalar		Kacang Tanah		Kedelai		Kacang Hijau	
		Luas	Prod	Luas	Prod	Luas	Prod	Luas	Prod	Luas	Prod	Luas	Prod
1	Babulu	872	191	212	896	633	375	32	16	-	-	7	6
2	Waru	32	79	14	569	23	178	18	12	5	-	26	4
3	Penajam	91	232	35	669	20	225	8	19	-	25	15	14
4	Sepaku	44	157	39	626	18	169	23	13	8	10	15	10
	Jml. 2009	1,039	659	300	2,760	694	947	81	60	13	35	63	34
	2008	1,051	1,567	359	7,121	516	1,938	96	54	1	89	36	52
	2006	512	4,721	419	6,387	316	9,053	112	144	20	18	33	111

2007	913	2,307	373	5,057	344	3,874	106	103	10	1	67	39
2005	226	1.081	160	5,923	140	3,031	73	120	13	24	6	35

Sumber: Kabupaten Dalam Angka Tahun 2010

Selanjutnya, daerah utama penghasil ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kedelai dan kacang hijau terdapat di Kecamatan Babulu. Pada tanaman ubi kayu dihasilkan sebanyak 2.609 ton pada areal panen seluas 185 Ha atau dengan rata-rata produktivitas sebesar 14,1 ton/Ha. Sedangkan pada tanaman ubi jalar dihasilkan sebanyak 2.567 ton pada areal panen seluas 271 Ha atau dengan rata-rata produktivitas sebesar 9,47 ton/Ha, hal ini dapat dilihat pada Tabel 2.47 di atas.

Tanaman pangan lain yang juga dihasilkan di Kabupaten Penajam Paser Utara adalah komoditas sayur-sayuran dan buah-buahan semusim. Tabel 2.42 menunjukkan luas arel, produksi dan produktivitas Kabupaten Paser Penajam dalam komoditas sayuran pada tahun 2009.

Tabel 2.48

**Luas Panen, Produksi Dan Produktivitas
Sayuran Semusim Tahun 2009**

No	Jenis Sayuran	Luas (Ha)	Produksi (ton)	Produktivitas (Kg/Ha)
1	Bawang Daun	0	0	0,60
2	Kubis	0	0	1,02
3	Petsai/Sawi	25	58	1,07
4	Kacang Panjang	0	0	1,51
5	Cabe Besar	79	403	1,19
6	Tomat	62	373	2,93
7	Terong	51	224	2,15
8	Buncis	38	484	1,99
9	Ketimun	58	102	2,09
10	Labu Siam	5	282	1,11
11	Kangkung	48	13	1,51
12	Bayam	30	156	1,14
13	Cabe Rawit	37	68	1,32
	JUMLAH	482	3.436	19.63

Sumber: Kabupaten Dalam Angka Tahun 2010

Dari tabel di atas secara keseluruhan terdapat 2.151 hektar lahan yang digunakan untuk menanam 13 macam tanaman sayuran semusim.

Areal terluas dalam hal ini digunakan untuk menanam komoditas kacang panjang seluas 300 Ha, bayam seluas 294 Ha, terong seluas 224 Ha, kemudian tomat seluas 176 Ha. Sedangkan dalam perspektif produktivitas maka ditemukan angka yang signifikan untuk komoditas tomat sebesar 2,93 kg/Ha, terong sebesar 2,15 kg/Ha, dan ketimun sebesar 2,09 kg/Ha.

2.7.1.2 Pertanian Tanaman Perkebunan

Secara umum produksi pertanian tanaman perkebunan di Kabupaten Penajam Paser Utara terdiri dari kelapa sawit, karet, kelapa, kopi, lada dan Kakao. Dimana produksi pertanian tanaman perkebunan tersebut ditinjau dari banyaknya petani, tanaman menghasilkan, produksi, produktivitas. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel berikut ini.

Tabel 2.49
Banyaknya Petani, Produksi Dan
Produktivitas Tanaman Perkebunan Tahun 2009

No	Jenis Tanaman	Banyaknya Petani (KK)	Tanaman Menghasilkan (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Kg/Ha)
1	Kelapa Sawit	2.970	1.833	24.356	13.283,9
2	Karet	1.701	69,5	70,1	1.008,6
3	Kelapa	1.563	3.119,5	2.926,5	938,1
4	Kopi	270	139,5	106,0	759,9
5	Lada	6.308	1.497,7	1.986,2	1.326,2
6	Kakao	224	116,5	113	970

Sumber: Kabupaten Dalam Angka Tahun 2010

Komoditas kelapa sawit merupakan tanaman perkebunan utama di Penajam Paser Utara. Pada tahun 2009, luas total perkebunan kelapa sawit seluas 21.854,3 Ha dengan tanaman menghasilkan seluas 15.561,50 dan jumlah produksi sebesar 236.409,00 ton. Sedangkan produktivitas lahan komoditas kelapa sawit yang dicapai pada tahun 2009 adalah sebesar 13.283,9 kg/Ha dan produktivitas berdasarkan tenaga kerja yang terlibat adalah sebesar 8,2 ton/petani.

Komoditas perkebunan lain yang cukup signifikan adalah komoditas Kelapa dan Lada. Pada komoditas kelapa, luas areal pada tahun 2009 mencapai seluas 5.040,5 Ha dengan tanaman menghasilkan seluas

3.119,5 Ha dan jumlah produksi sebesar 2.926,5 ton. Sedangkan produktivitas berdasarkan tenaga kerja yang terlibat adalah sebesar 1,9 ton/petani. Pada komoditas lada, luas areal pada tahun 2009 mencapai seluas 1.861,3 Ha dengan tanaman menghasilkan seluas 1.497,7 Ha dan jumlah produksi sebesar 1.986,20 ton. Sedangkan produktivitas berdasarkan tenaga kerja yang terlibat adalah sebesar 0,3 ton/petani.

Selanjutnya persebaran komoditas perkebunan tersebut dapat ditemukan di setiap wilayah kecamatan di Penajam Paser Utara. Tabel 2.50 menunjukkan persebaran komoditas perkebunan rakyat di 4 wilayah kecamatan di Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2006-2009.

Tabel 2.50
Luas Areal dan Produksi Tanaman Perkebunan Rakyat
Per-Kecamatan di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2006-2009

No	Kecamatan	Kopi		Kelapa		Kelapa Sawit		Karet		Lada		Kakao	
		Luas (Ha)	Prod (Ton)	Luas (Ha)	Prod (Ton)	Luas (Ha)	Prod (Ton)	Luas (Ha)	Prod (Ton)	Luas (Ha)	Prod (Ton)	Luas (Ha)	Prod (Ton)
1	Babulu	21,00	15,30	557,80	387,40	2.492,0	7.730,6	413,0	12,7	2,00	1,40	149,0	34,40
2	Waru	1,00	0,70	234,00	197,60	1.774,0	4.016,9	381,0	0,9	0,30	0,30	1,5	1,20
3	Penajam	115,00	57,00	2.682,70	2.212,60	2.464,0	6.483,4	930,5	12,30	12,50	8,10	121,0	75,00
4	Sepaku	59,50	33,00	185,50	128,90	2.048,0	907,0	1.292,0	46,40	2.248,5	1.976,40	9,5	2,40
	Jml.												113,00
	2009	196,50	106,00	3.660,0	2.926,5	8.778,4	19.137,9	3.017,0	70,10	2.544,3	1.986,20	281,00	
	2008	189,00	115,20	4.827,5	2.960,3	8.087,5	17.298,8	1.853,5	64,60	2.032,3	2.266,70	276,00	144,30
	2007	189,00	115,40	4.811,5	3.037,7	5.988,0	15.963,7	266,5	53,17	2.015,3	2.266,70	276,00	144,99
	2006	283,00	97,96	3.421,0	2.703,15	5.496,0	13.852,2	245,5	47,12	7.725,0	1.940,61	276,00	116,67

Sumber: Kabupaten Penajam Paser Utara Dalam Angka Tahun 2010

- a. Daerah penghasil utama komoditas kopi adalah Kecamatan Penajam, jumlah produksi pada tahun 2009 sebesar 57 ton pada luas areal 115 Ha atau dengan tingkat produktivitas sebesar 0,47 ton/Ha. Daerah penghasil lain yang cukup signifikan adalah Kecamatan Sepaku dengan jumlah produksi sebesar 33 ton pada luas areal 59,5 Ha atau dengan tingkat produktivitas sebesar 0,55 ton/ha.
- b. Daerah penghasil utama komoditas Kelapa juga ada di Kecamatan Penajam, jumlah produksi pada tahun 2009 sebesar 2.212,60 ton

pada luas areal 2.680,70 Ha atau dengan tingkat produktivitas sebesar 0,82 ton/Ha.

- c. Daerah penghasil utama komoditas Kelapa sawit ada di Kecamatan Babulu, jumlah produksi pada tahun 2009 sebesar 7.730,6 ton pada luas areal 2.492 Ha atau dengan tingkat produktivitas sebesar 3,10 ton/Ha.
- d. Daerah penghasil utama komoditas Karet ada di Kecamatan Sepaku, jumlah produksi pada tahun 2009 sebesar 46,4 ton pada luas areal 1.292 Ha atau dengan tingkat produktivitas sebesar 0,03 ton/Ha.
- e. Daerah penghasil utama komoditas Lada ada di Kecamatan Sepaku, jumlah produksi pada tahun 2009 sebesar 1.976,4 ton pada luas areal 2.248,5 Ha atau dengan tingkat produktivitas sebesar 0,88 ton/Ha.
- f. Daerah penghasil utama komoditas Kakao ada di Kecamatan Penajam, jumlah produksi pada tahun 2009 sebesar 75 ton pada luas areal 121 Ha atau dengan tingkat produktivitas sebesar 0,62 ton/Ha.

2.7.2 Peternakan

Subsektor peternakan dapat dikatakan belum berkembang di Kabupaten Penajam Paser Utara. Populasi ternak yang ada selama ini cenderung hanya menjadi pekerjaan sampingan para petani atau belum dikelola secara profesional dengan perhitungan skala ekonomi yang menguntungkan.

Tabel 2.51
Populasi Ternak Per-kecamatan
Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2009

No	Jenis Ternak	Banyaknya (ekor)			
		Babulu	Waru	Penajam	Sepaku
1	Sapi	1.154	472	4.773	2.128
2	Kerbau	10	24	142	490
3	Kambing	1.425	76	1.000	1.602
4	Domba	-	-	115	-
5	Babi	-	-	-	215
6	Rusa	-	203	-	-
7	Ayam Ras	-	17.500	48.500	2.400

No	Jenis Ternak	Banyaknya (ekor)			
		Babulu	Waru	Penajam	Sepaku
8	Ayam Buras	45.163	13.540	41.498	29.957
9	Itik	4.642	2.781	2.781	1.150
10	Angsa	155	247	103	1.037

Sumber: Kabupaten Penajam Paser Utara Dalam Angka Tahun 2010

Pada Tabel 2.51 ditunjukkan populasi ternak yang ada di masing-masing kecamatan, Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun 2009. Kecamatan Babulu mempunyai keunggulan komparatif dalam ternak ayam buras dan kambing. Selanjutnya Kecamatan Waru unggul dalam peternakan ayam ras, begitu juga pada Kecamatan Penajam unggul dalam peternakan ayam ras dan ayam buras serta ternak sapi. Sedangkan Kecamatan Sepaku mempunyai keragaman hayati cukup beragam, daerah ini mempunyai keunggulan komoditas ayam ras, kambing, kerbau dan babi.

Program yang telah berjalan selama ini dan perlu mendapat catatan bagi keberlanjutan pengembangan subsektor peternakan di Kabupaten Penajam Paser Utara, antara lain:

- 2.8 Program penggemukkan sejumlah 5.000 Sapi di Kecamatan Sepaku bekerjasama dengan Koperasi Ternak dan Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Penajam Paser Utara;
- 2.9 Program penggemukkan sejumlah 2.500 Sapi dengan sistem Gado (Bagi hasil) di Desa Giri Mukti, Kecamatan Penajam;
- 2.10 Program penggemukkan dengan sistem pemeliharaan di bawah pohon kelapa sejumlah 1.500 Sapi di Kelurahan Saloloang, Kecamatan Penajam.

2.7.3 Perikanan

Kabupaten Penajam Paser Utara mempunyai potensi yang cukup memadai dalam subsektor perikanan darat dan laut. Dengan luas laut 272,24 Km², Kabupaten Penajam Paser Utara menyimpan potensi hasil perikanan yang melimpah, apalagi di kawasan Selat Makassar merupakan

jalur berkembang biaknya ikan yang mempunyai nilai ekonomis yang cukup tinggi. Selain potensi perikanan laut juga terdapat perikanan darat perikanan umum, tambak, kolam dan keramba dengan kecenderungan jumlah areal yang terus bertambah.

Tabel 2.52
Produksi Perikanan Menurut Kecamatan (Ton) Tahun 2006-2009

No	Kecamatan	Perikanan Laut	Perikanan Darat			
			Perikanan Umum	Tambak	Kolam	Keramba
1	Babulu	1.830	75,2	2.221,8	38,8	-
2	Waru	1.143,8	109,1	137,3	33,3	18,5
3	Penajam	1.572,5	72,4	1.039,5	116,5	6,0
4	Sepaku	212,3	84,9	496,2	32,8	-
	Jumlah 2009	4.758,6	341,6	4.136,2	221,4	24,5
	Jumlah 2008	4.621,5	327,3	2.165,9	234,3	24,7
	Jumlah 2007	4.590,4	551,4	3.984,0	206,3	22,3
	Jumlah 2006	4.523,7	472,1	3.591,3	188,2	20,8

Sumber: Kabupaten Penajam Paser Utara Dalam Angka Tahun 2010

Tabel 2.52 menunjukkan produksi perikanan laut dan darat di masing-masing kecamatan, Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun 2006-2009. Secara keseluruhan terdapat peningkatan produksi perikanan laut di Kabupaten Penajam Paser Utara. Pada tahun 2006 produksi perikanan laut sebesar 4.523,7 ton yang kemudian meningkat menjadi sebesar 4.758,6 ton pada tahun 2009.

Pada produksi perikanan laut, produksi tertinggi dihasilkan di Kecamatan Babulu yaitu sebesar 1.830 ton, kemudian di Kecamatan Penajam sebesar 1.572,5 ton, Kecamatan Waru sebesar 1.143,8 ton dan di Kecamatan Sepaku sebesar 212,3 ton. Sedangkan pada produksi perikanan darat, produksi tertinggi dihasilkan di Kecamatan Babulu yang mencapai 2.335,8 ton, kemudian di Kecamatan Penajam sebesar 1.234,4 ton, Kecamatan Sepaku sebesar 613,9 ton dan Kecamatan Waru sebesar 298,2 ton.

2.7.4 Pertambangan

Secara umum, Kabupaten Penajam Paser Utara mempunyai sumber daya pertambangan dan penggalian yang cukup beragam, mulai bahan

galian industri, bahan galian mineral logam dan energi, serta bahan non migas. Sampai dengan 20 tahun mendatang deposit bahan tambang pasti akan berkurang seiring dengan eksploitasi yang dilakukan khususnya minyak. Akan tetapi di Kabupaten Penajam Paser Utara terdapat lokasi potensial untuk eksploitasi sumber tambang yaitu di Blok Seturian.

a. Potensi bahan Galian Industri.

- Batu Gunung seluas 1.500 Ha dengan cadangan 480 juta m³ di Labangka;
- Lempung seluas 500 Ha dengan cadangan 11,5 juta m³ di Babulu;
- Pasir kwarsa ketebalan 1-6 m, ukuran butir 1/8 - 1/2 mm dengan kandungan mineral kwarsa 99,99% terbesar di Penajam dan Babulu.

b. Potensi bahan Galian Mineral Logam dan Energi:

- Galian Mineral logam (emas) dijumpai di DAS Riko, saat ini belum dieksploitasi;
- Minyak dan Gas di wilayah Kecamatan Penajam yang sedang diusahakan dan adanya potensi Migas yang terdapat di daerah lepas pantai;
- Galian Mineral Energi (Batubara), yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan dengan luas 9.757,435 Ha, yang diusahakan oleh 8 perusahaan (Koperasi pada Idi, PT. Bosowa Pasir Bara, PT. Kutai Tamindo Bumi Sakti, dan lain-lain), baik pada tingkat penyelidikan umum, eksplorasi, maupun eksploitasi;
- Pembangkit sumberdaya kelistrikan.

c. Potensi bahan non migas:

Beberapa potensi yang ada yakni,

- Batu gamping
Sebaran batu gamping di Kabupaten Penajam Paser Utara cukup luas dengan sebaran umumnya memanjang ke arah Utara Selatan. Di Desa Krayan, Kecamatan Babulu, batu gamping, memiliki sifat fisik lebih baik dengan kekerasan dan bidang

perlapisan yang memperhatikan flay bedded dimana rata-rata lapisan sekitar 30-50 cm. Diameter singkapan mencapai 7.000 meter panjang dan 1.000 meter lebar dengan ketebalan yang tersingkap sekitar 25 meter.

- Lempung

Bahan galian lempung sebarannya di Kabupaten Penajam Paser Utara cukup luas dan banyak dimanfaatkan penduduk sebagai bahan dasar pembuatan batubata, seperti di daerah Penajam dan Waru, bahan keramik baik sebagai keramik kasar (gerabah) maupun halus (porselen), dan bahan baku utama industri. Umumnya lempung ini membentuk morfologi pebukitan bergelombang dan dataran rendah. Sedangkan pembawa batuan ini adalah formasi-formasi Pemaluan, Pulubalang dan Balikpapan.

- Pasir Kuarsa

Di Kabupaten Penajam Paser Utara sebaran pasir kuarsa menempati bagian timur daerah ini sepanjang Pantai Penajam dan Sepaku I-III. Pasir kuarsa di daerah Penajam dan Sepaku berwarna kelabu putih, bersifat lepas, putih bersih kalau tercuci oleh air hujan, dengan butiran ketebundar membundar tanggung. Ketebalan singkapan yang tersingkap 1-6 meter dengan matrix (penyemen) lempung.

- Batu Bara

Bahan galian mineral energi adalah batu bara, dimana endapan batu bara di daerah Petung Sepaku singkapan batu bara berupa sisipan dalam batu pasir bagian dari formasi Balikpapan, yang memiliki rata-rata ketebalan singkapan sekitar 100-150 cm. Di Desa Rintik batubara tersingkap berasosiasi dengan serpih kelabu gelap dan batu pasir ketebalan batubara mencapai 50 cm. Sebaran batubara cukup bervariasi dari ketebalan beberapa

sentimeter sampai dengan beberapa meter, dan memanjang mengikuti pelemparan beberapa formasi batuan, seperti Balikpapan, Pamaluan dan Pulubalang. Melihat kualitas batubara yang dijumpai di daerah ini umumnya berkalori tinggi, dengan kilap bagus dan kandungan debunya tidak begitu banyak. Jumlah perusahaan pertambangan yang ada di Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2001 adalah sebanyak 8 (delapan) perusahaan. Luas lahan perusahaan pertambangan Kabupaten Penajam Paser Utara adalah 9.757,435 Ha. Kecamatan Sepaku merupakan kecamatan yang paling banyak terdapat perusahaan pertambangan, yaitu 6 (enam) perusahaan dengan luas 248,801 Ha.

2.7.5 Perdagangan dan Industri

Sektor perindustrian dan perdagangan di Kabupaten Penajam Paser Utara baru menjadi sektor pelengkap yang melayani kebutuhan lokal. Kedekatan lokasi Kabupaten Penajam Paser Utara dengan Kota Balikpapan sejauh ini belum mampu dimanfaatkan secara optimal sebagai mesin pertumbuhan ekonomi alternatif selain dari sektor pertanian dan pertambangan.

Tabel 2.53
Banyaknya Perusahaan Menurut Kecamatan Tahun 2009

No	Kecamatan	Jenis Perusahaan		Jumlah
		Perkebunan	Industri	
1	Babulu	4	267	271
2	Waru	4	209	213
3	Penajam	3	430	433
4	Sepaku	5	203	208
Jumlah		16	1.109	1.125

Sumber: Kabupaten Penajam Paser Utara Dalam Angka Tahun 2010

Tabel 2.53 di atas menunjukkan jumlah perusahaan yang ada di masing-masing kecamatan di Kabupaten Penajam Paser Utara. Secara keseluruhan, terdapat 1.125 perusahaan di Penajam Paser Utara yang masing-masing sebanyak 16 perusahaan bergerak di bidang perkebunan dan sebanyak 1.109 perusahaan bergerak di bidang industri. Jumlah

perusahaan industri terbanyak ada di wilayah Penajam dengan 430 perusahaan industri dan perusahaan perkebunan terbanyak terdapat di Kecamatan Sepaku yaitu sebanyak 5 perusahaan.

Tabel 2.54
Banyaknya Tenaga Kerja Perusahaan
Menurut Kecamatan Tahun 2009

No	Kecamatan	WNI		Jumlah
		LK	PR	
1	Babulu	300	275	575
2	Waru	4.712	2.019	6.731
3	Penajam	1.895	1.374	3.271
4	Sepaku	2.863	537	3.326
Jumlah		9.770	4.205	13.975

Sumber: Kabupaten Penajam Paser Utara Dalam Angka Tahun 2010

Selanjutnya jumlah tenaga kerja yang dapat diserap oleh sektor industri dan perdagangan ditunjukkan pada Tabel 2.54 di atas. Pada tahun 2009, jumlah tenaga kerja yang dapat diserap mencapai 13.975 orang. Sedangkan jumlah tenaga kerja yang terserap di Kecamatan Waru sebanyak 6.731 orang, kemudian di kecamatan Sepaku mencapai sebanyak 3.326 orang, di Kecamatan Babulu sebanyak 575 orang dan di Kecamatan Waru mencapai sebanyak 3.271 orang.

2.7.6 Pariwisata

Penajam Paser Utara adalah kabupaten dengan sejumlah keindahan alam yang masih alami. Kondisi alam memiliki kontur beragam dengan beribu ekosistem di dalamnya, membuat kabupaten ini memiliki keunikan alam tersendiri untuk dikunjungi. Beberapa obyek wisata alam yang dimiliki Kabupaten Penajam Paser Utara diantaranya adalah :

1. Pantai pasir putih di Tanjung Jumlai
2. Pantai Nipah-Nipah
3. Sentra penggemukan dan pengembangan Sapi Brahman
4. Bendung Babulu
5. Bendung Waru

6. Penangkaran rusa di Desa Api-Api
7. Tempat wisata di Pulau Kuwangan dan Pulau Gusung.

Keindahan alam yang masih asli dan potensi wisata alam lainnya dapat dikatakan mampu menarik wisatawan dalam jumlah yang signifikan. Umumnya potensi yang ada masih bersifat lokal dan dikunjungi oleh masyarakat Penajam Paser Utara Sekitarnya. Dari data rata-rata lama menginap tamu hotel ditunjukkan bahwa pada tahun 2009 jumlah kunjungan menginap ke Penajam Paser Utara mencapai 10.359 orang dengan rata-rata lama menginap hanya satu malam. Data ini terlihat meningkat jika dibandingkan dengan jumlah tamu yang menginap ke Penajam Paser Utara tahun 2008 yang hanya 10.009 orang dan tahun 2007 yang hanya mencapai 5.755 orang.

2.8 ARAHAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR DI KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA

2.8.1 Transportasi

2.8.1.1 Jaringan Jalan dan Perangkutan Umum

Peningkatan jaringan jalan dan perangkutan umum di Kabupaten Petajam dilakukan untuk mendukung kemudahan/kelancaran hubungan dari stu wilayah ke wilayah yang lain. Dengan prosentase jalan dengan jenis permukaan kerikil dan tanah sebesar 522,20 Km atau 57,51% dari total panjang jalan, maka dalam pembangunan sampai akhir tahun perencanaan direncanakan terjadinya peningkatan kualitas permukaan jalan menjadi 80% jalan dengan kondisi permukaan sudah diaspal. Sedangkan berdasarkan hasil perhitungan aksesibilitas dan mobilitas menunjukkan bahwa Kabupaten Petajam Paser Utara dengan indeks aksesibilitas 0,27 telah memenuhi standar pelayanan minimal. Indeks mobilitas juga telah memenuhi standar pelayanan minimal yaitu 6,93 (dengan standar minimalnya di Kabupaten Petajam sebesar 5). Karena kondisi jalan yang mayoritas dengan perkerasan tanah dan kerikil secara langsung telah menghambat layanan jalan dan kegiatan masyarakat. Sedangkan untuk sektor perangkutan, perlunya untuk meningkatkan pelayanan pengangkutan umum di Kabupaten Petajam khususnya kawasan perkotaan sehingga mampu mendukung kegiatan ekonomi kawasan perkotaan. Rencana pengembangan jaringan jalan di Kabupaten Petajam Paser Utara antara lain :

1. Peningkatan kualitas permukaan kerikil dan tanah
2. Pembangunan jembatan Petajam – Balikpapan
3. Pembangunan jalan akses Petajam – Pulau Balang

2.8.1.2 Terminal

Berkembangnya kegiatan ekonomi di Kabupaten Petajam dan pergerakan yang semakin bertambah antar wilayah perlu didukung adanya titik simpul pergerakan atau terminal yang memadai. Kondisi

eksisting terminal dengan klasifikasi Tipe C harus dievaluasi sehingga kebutuhan pergerakan dalam kurun waktu 20 tahun mendatang dapat diakomodasi. Untuk itu perlu adanya peningkatan pelayanan terminal menjadi Tipe B yaitu terminal berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota dalam propinsi, angkutan kota, dan angkutan pedesaan.

Persyaratan terminal dengan klasifikasi Tipe B yaitu :

1. Terletak dalam jaringan trayek antar kota antar dalam propinsi
2. Terletak di jalan arteri atau kolektor dengan kelas jalan sekurang-kurangnya III B.
3. Jarak antara dua terminal penumpang tipe B dengan terminal penumpang tipe A sekurang-kurangnya 30 km.
4. Luas lahan yang tersedia sekurang-kurangnya 3 Ha untuk terminal di Pulau Jawa dan Sumatera dan 2 Ha di pulau lain.
5. Mempunyai akses jalan masuk atau keluar dan dari terminal dengan jarak sekurang-kurangnya 50 m di Pulau Jawa dan 30 m di pulau lain dihitung dari jalan ke pintu keluar atau masuk terminal.

2.8.1.3 Modal Transportasi Laut

Berkembangnya kegiatan ekonomi wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dengan potensi pengembangan sektor pertanian, pertambangan dan industri membutuhkan pelayanan transportasi laut yang memadai. Tingginya Arus transportasi dan bahkan antrian kendaraan yang panjang dan memerlukan waktu lama untuk diangkut oleh Feri. Tidak kurang sekitar 3 – 5 kapal Feri tiap hari beroperasi selama 24 jam, yang dikelola oleh BUMN di bawah ASDP. Kedepan perlu adanya pembangunan pelabuhan Khusus Penajam – Ferry dan pembangunan pelabuhan Sandar. Dengan adanya pemisahan pelabuhan barang dan penumpang diharapkan akan meningkatkan pelayanan pelabuhan serta mendukung perkembangan ekonomi wilayah.

2.8.2 Air Bersih

Berdasarkan perhitungan kebutuhan air bersih sampai dengan akhir tahun 2029 diketahui bahwa kebutuhan air bersih di Kabupaten Penajam Paser Utara pada 47.313.216 liter per hari atau 47.313,21 m³ per hari. Dengan kondisi produksi air bersih tahun 2009 sebesar 1.243.766,50 m³, maka untuk memenuhi kebutuhan tersebut perlu untuk pengembangan sumber air baku baik kualitas maupun kuantitasnya sehingga bertambahnya jumlah penduduk dan kebutuhan air bersih dapat dilayani PDAM Kabupaten Penajam Paser Utara. Sumber air baku potensial yang bisa dimanfaatkan yaitu air permukaan (sungai). Melalui pengolahan air diharapkan kualitas air sungai yang secara fisik dan kimia belum memenuhi syarat air sehat menjadi air yang sehat. Selanjutnya perlu dilakukan pengembangan jaringan transmisi dan distribusi pada kawasan-kawasan permukiman yang diprediksikan berkembang dan melakukan promosi untuk meningkatkan jumlah pelanggan baru setiap tahun. Potensi perkembangan jumlah pelanggan baru dapat diketahui melalui survei minat calon pelanggan PDAM Penajam Paser Utara. Beberapa faktor penting yang harus diperhatikan PDAM Kota Penajam Paser Utara dalam peningkatan pelayanan antara lain :

- Prosedur/persyaratan menjadi pelanggan.
- Kualitas air bersih
- Kontinuitas air bersih
- Penanganan pengaduan pelanggan
- Sistem tarif dan biaya tambahan yang lain
- Sarana perpipaan pendukung pelayanan
- Pelayanan petugas untuk kepentingan teknis dan administrasi

Sedangkan untuk masyarakat dengan pelayanan non PDAM, maka perlu adanya monitoring secara berkala oleh Dinas Kesehatan dan instansi terkait lainnya untuk memastikan bahwa air bersih tersebut tidak berbahaya atau tercemar bahan berbahaya.

2.8.3 Listrik

Tabel 2.55

Perhitungan Kebutuhan Listrik Kabupaten Penajam Paser Utara

Tahun	Rumah Tangga	Industri & Perdgn	Fas Sos-Ek	Fasilitas Perkantoran	PJU	Cadangan	Total
2007	126.259.200	88.381.440	18.938.880	12.625.920	1.262.592	6.312.960	253.780.992
2029	221.780.700	155.246.490	33.267.105	22.178.070	2.217.807	11.089.035	445.779.207

Sumber : Hasil Perhitungan, 2009

Berdasarkan perhitungan diatas diketahui bahwa kebutuhan listrik di Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun 2029 sebesar 445.779.207 watt atau 445.779,2 Kilowatt.

Pelayanan listrik di Kabupaten Penajam Paser Utara menggunakan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) yang dikelola oleh PLN Wilayah VI cabang Balikpapan yang terdiri dari 3 Ranting. Ranting Petung melayani Penajam, Long Ikis, Long Kali, dan Maridan. Ranting Sepaku yang meliputi Sepaku dan Semoi, serta ranting Jenebora yang meliputi Jenebora, Pantau Lango dan Gersik. Jumlah pelanggan listrik PLN di Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2009 sebanyak 14.809 pelanggan dengan produksi listrik sebanyak 45.039.929 Kwh dan kapasitas tersambung sebanyak 12.504.750 VA. Pengembangan jaringan listrik sampai dengan akhir tahun perencanaan (tahun 2029) adalah penyediaan daya yang cukup yaitu sebesar 445.779.207 watt atau 445.779,2 kilowatt. Peningkatan pelayanan juga harus dilakukan untuk mengurangi frekuensi pemadaman listrik karena keterbatasan suplai daya. Pengembangan jaringan disesuaikan dengan potensi jumlah pelanggan baru terutama pada kawasan-kawasan permukiman baru. Pada kurun waktu sampai dengan akhir tahun perencanaan (tahun 2029) direncanakan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) yang diharapkan mampu memenuhi kebutuhan energi listrik di Kabupaten Penajam Paser Utara.

2.8.4 Jaringan Telematika

Pengembangan jaringan telematika dilakukan dengan peningkatan jaringan pelayanan kabel maupun non kabel. Pelayanan kabel dilakukan oleh PT. Telkom melalui jaringan kabel telepon dengan pengembangan ke wilayah permukiman baru maupun penambahan pelanggan pada wilayah yang sudah terlayani jaringan. Melalui survei minat calon pelanggan dapat diketahui potensi penambahan sambungan telepon baru di Kabupaten Penajam Paser Utara. Sedangkan pelayanan non kabel dilayani operator-operator GSM melalui pembangunan tower-tower yang menangkap sinyal melalui handphone yang lebih berkembang dibanding telepon dengan jaringan kabel. Kedepan dalam pengembangan telepon non kabel adalah perlunya penataan tower bersama/terpadu di Kabupate Penajam Paser Utara dengan persyaratan sebagai berikut :

Tabel 2.56
Rencana Ketentuan Pembangunan Tower Telekomunikasi Kabupaten Penajam Paser Utara

Jenis Bangunan	Jarak Tower dari Bangunan (meter)	
	Ketinggian Tower sampai dengan 45 meter	Ketinggian Tower di atas 45 meter
Perumahan	20	30
Komersial	10	15
Industri	5	10

Sumber : Keputusan Menteri Bersama Menteri Komunikasi dan Informasi

Berdasarkan tabel di atas maka rencana pembangunan tower di Kabupaten Penajam Paser Utara adalah sebagai berikut :

1. Untuk ketinggian tower di atas 45 meter, jarak tower dari bangunan perumahan terdekat adalah 30 meter.
2. Untuk ketinggian tower di bawah 45 meter, jarak tower dari bangunan perumahan terdekat adalah 20 meter

Tentang radiasi komunikasi radio mengatur ketentuan batasan maksimum radiasi yang diizinkan. Selanjutnya pada bagian tentang sarana pendukung menara komunikasi mengatur tentang komponen fisik dan non fisik yang terdapat pada menara tersebut, yang terdiri dari grounding dan penangkal petir, catu daya listrik beserta catu daya back up -nya, aviation

light, identitas kepemilikan dan dibangunnya menara, luas minimal lahan serta kemudahan akses dan ketersediaan catu daya yang terpisah dari gedung induknya (seandainya menempel pada suatu gedung tertentu). Tentang pengoperasian dan pemeliharaan yang mengatur kewajiban adanya laporan rutin keadaan setiap menara telekomunikasi. Untuk mengatur kebijakan terkait dengan pembangunan menara/tower telekomunikasi maka kedepan perlu adanya peraturan daerah yang mengatur prosedur perijinan pembangunan menara/tower telekomunikasi, syarat lokasi, syarat teknis bangunan serta sanksi-sanksi terkait pelanggaran peraturan tersebut. Kedepan konsep pembangunan menara/tower telekomunikasi terpadu harus dilakukan sehingga perkembangan jumlah tower dapat dikendalikan.

2.8.5 Sarana Pendidikan

Kebutuhan sarana pendidikan di Kabupaten Penajam Paser Utara sampai dengan akhir tahun perencanaan (2029) perlu adanya penambahan jumlah sarana pendidikan TK dan SD. Sarana pendidikan TK memerlukan penambahan dan SD memerlukan penambahan. Jumlah sarana SLTP sejumlah 34 unit dan SMU sejumlah 19 unit telah memenuhi kebutuhan sampai dengan tahun 2029. Untuk SLTP dan SMU pengembangannya diarahkan pada perbaikan kondisi sarana pendidikannya seperti laboratorium, perbaikan kelas serta peningkatan kualitas pendidikannya, misalnya penambahan kurikulum yang disesuaikan dengan kondisi wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara. Penambahan kurikulum yang bisa dilakukan antara lain pada SMK yaitu kurikulum pengembangan keterampilan SMK berbasis keunggulan lokal Kabupaten Penajam Paser Utara.

2.8.6 Sarana Kesehatan

Pengembangan sarana kesehatan di Kabupaten Penajam sampai dengan akhir tahun perencanaan adalah peningkatan pelayanan

kesehatan pada tingkat polindes, puskesmas dan rumah sakit. Selain itu perlu adanya kebijakan yang mendukung berkembangnya fasilitas yang mendukung pengembangan sarana kesehatan, diantaranya praktek dokter yang tersebar dan mampu memenuhi kebutuhan, apotek maupun klinik-klinik pengobatan yang disediakan oleh swasta. Sedangkan Puskesmas sejumlah 11 unit dan Puskesmas pembantu (PUSTU) sejumlah 44 unit telah memenuhi kebutuhan sampai dengan tahun 2029. Pengembangan diarahkan pada perbaikan-perbaikan apabila terjadi kerusakan pada bangunan tersebut dan peningkatan pelayanan medis kepada masyarakat.

2.8.7 Sarana Perdagangan dan Jasa

Pasar merupakan salah satu faktor yang sangat berperan dalam menggerakkan roda perekonomian. Pada tahun 2009, terdapat 10 pasar di Kabupaten Penajam Paser Utara dengan rincian sebagai berikut 2 pasar di Kecamatan Babulu, 1 pasar di Kecamatan Waru, 5 pasar di Kecamatan Penajam, dan 2 pasar di Kecamatan Sepaku. Sedang jumlah pedagang secara keseluruhan sebanyak 1.370 pedagang

Arahan pengembangan sarana perdagangan adalah upaya pemerataan sarana perdagangan dan jasa pada kawasan-kawasan permukiman sesuai skala pelayanan fasilitas. Peningkatan kondisi pasar perlu dilakukan untuk mengantisipasi perkembangan kegiatan perdagangan oleh masyarakat pada masing-masing kecamatan. Selain itu perlu pembangunan Pasar Besar Penajam untuk melayani pelayanan lingkup wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara yang mencakup 4 (empat) kecamatan terdiri dari 30 desa dan 24 kelurahan.

BAB III

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS



BAB III

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

3.1. Potensi Daerah

Saat ini potensi sumber daya manusia yang dimiliki oleh suatu daerah merupakan aset yang sangat penting, karena sumber daya manusia termasuk subyek atau pelaku pelaksanaan pembangunan. Selain itu di Kabupaten Penajam Paser Utara juga mempunyai potensi sumber daya alam yang cukup besar dan dapat dijadikan peluang bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara.

3.2. Politik, Keamanan dan Pemerintahan

Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) secara resmi baru berdiri pada tanggal 10 April 2002 berdasarkan Undang-Undang R.I. Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur. Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara ini sebagai pemekaran dari wilayah Kabupaten Pasir karena telah terpenuhinya berbagai persyaratan dan pertimbangan berdasarkan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah dan pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat atas prakarsa sendiri. Kewenangan tersebut didasarkan pada prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta potensi Kabupaten Penajam Paser Utara yang dilaksanakan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Di lain pihak pembangunan Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan merupakan upaya peningkatan pelayanan dan

kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan dampak krisis multidimensional, tuntutan reformasi dan globalisasi. Untuk itu pelaksanaan pembangunan Kabupaten Penajam Paser Utara akan senantiasa mempertimbangkan kondisi, potensi, kemampuan daerah dan aspirasi masyarakat dalam mewujudkan kehidupan yang lebih baik yaitu masyarakat adil dan makmur, damai, berakhlak mulia, berpengetahuan luas dan sejahtera.

Wilayahnya mencakup 4 (empat) kecamatan terdiri atas 30 desa dan 24 kelurahan. Sebagai Kabupaten baru yang usianya masih sangat muda, banyak kegiatan yang perlu dilakukan dalam menata administrasi pemerintahan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara efektif, efisien dan berkeadilan. Infrastruktur pemerintahan masih sangat terbatas, baik dilihat dari kelengkapan lembaga, jumlah personil, gedung perkantoran maupun sarana administrasi.

Lembaga eksekutif di tingkat Kabupaten terdiri dari Bupati dan Wakil Bupati, dan jabatan struktural Sekretaris Daerah. Lembaga legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) sudah terbentuk, lembaga yudikatif Kejaksaan Negeri sudah ada tetapi Pengadilan Negeri masih belum ada. Untuk lembaga di bidang Pertahanan dan Keamanan (KODIM dan POLRES) saat ini sudah terbentuk. Untuk kegiatan-kegiatan yang terkait dengan lembaga yudikatif dan lembaga pertahanan dan keamanan ini sementara masih ikut Kabupaten induk, yaitu Kabupaten Paser.

Dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintahan, maka secara bertahap, lembaga teknis di tingkat Kabupaten ini tentunya perlu ditambah sesuai dengan kebutuhan, demikian halnya dengan pengisian jabatan struktural yang masih kosong, termasuk penambahan personil diberbagai lembaga pemerintahan.

3.2.1. Politik

1). Input : Kondisi Politik

- a). Keberadaan tokoh kultural merupakan sebuah kenyataan unik tersendiri dalam percaturan politik di Kabupaten Penajam Paser Utara. Tokoh-tokoh kultural kharismatik, baik yang berbasis religius maupun yang berbasis budaya lokal, sangat berpengaruh dalam turut serta menentukan arah pergerakan politik yang ada di Kabupaten Penajam Paser Utara. Sehingga seringkali lembaga-lembaga dan tokoh-tokoh politik formal justru dipengaruhi oleh lembaga dan tokoh politik informal ini. Keberadaan tokoh politik informal atau kultural ini sesungguhnya merupakan potensi yang dapat dikembangkan dalam proses dinamisasi politik dan demokratisasi bila dapat dikelola dengan baik.
- b). Arus demokratisasi dan percepatan proses konsolidasi politik baik di tingkat nasional maupun regional yang semakin gencar akan berpengaruh pada kondisi politik di sekitar Kabupaten Penajam Paser Utara. Apabila Kabupaten Penajam Paser Utara tidak dapat mengikuti arus percepatan ini maka hal ini akan menjadi persoalan besar yang dihadapi oleh internal entitas politik (elit politik yang menjadi faktor penentu sikap partai politik) di Kabupaten Penajam Paser Utara.
- c). Tingkat keterlibatan politik masyarakat yang tinggi tetapi masih sering mudah dikendalikan oleh polarisasi politik tertentu dapat membawa tingkat partisipasi politik masyarakat justru menurun. Kecenderungan ini harus dijawab dengan kondisi sentimen politik masyarakat yang cair dan tidak ada karakter fanatisme. Pembangunan berbasis masyarakat (*community based development*) akan berhasil di Kabupaten Penajam Paser Utara, berbanding lurus dengan keberhasilan

Kabupaten Penajam Paser Utara dalam mengelola tingginya polarisasi dan keterlibatan politik masyarakat.

- d). Optimalisasi peran tokoh kultural merupakan sebuah keniscayaan untuk meminimalisir adanya kecenderungan kekuatan politik negatif dalam memanfaatkan mereka untuk proses politik yang kontra produktif dengan pembangunan politik itu sendiri. Bila optimalisasi peran tokoh politik informal ini gagal dilakukan dalam waktu dekat, bisa jadi karisma yang mereka miliki akan disalahgunakan oleh pihak-pihak tidak bertanggungjawab.
- e). Proses pembangunan yang harus semakin produktif dalam menjawab berbagai persoalan sosial dan kemiskinan merupakan sebuah desakan yang tidak hanya penting secara formal tapi juga substantif. Akan tetapi, sekali lagi tantangan ini tidak akan bisa terjawab bila permasalahan konflik horizontal belum teratasi. Problem kemiskinan hanya akan dapat teratasi bila kolektivisme, soliditas dan kepercayaan antar masyarakat terjaga utuh dalam bingkai modal sosial (*social capital*).
- f). Dengan makin maju dan modernnya sistem birokrasi, proses pelayanan publik (*public services*) juga makin dirasakan sebagai kebutuhan dasar masyarakat. Proses ini dapat berjalan dengan baik bila ada daya dukung politik di atasnya. Ini merupakan sebuah cerminan dari keterkaitan erat antara politik dan administrasi publik. Sehingga bila terjadi permasalahan di level politik, maka proses administrasi dan pelayanan publik juga akan terganggu.

2). Analisis Politik

a). Proyeksi Peluang

Salah satu faktor penting untuk diketahui dari aktifitas masyarakat yang berpengaruh terhadap berbagai kegiatan pemanfaatan ruang di Kabupaten Penajam Paser Utara adalah karakteristik sosial budaya kemasyarakatan yang diidentifikasi melalui indikator seperti; jenis lembaga organisasi, manfaat yang didapat, adat istiadat yang masih berlaku, tokoh masyarakat, sistem dan bentuk kegotong-royongan. Berdasarkan indikator yang ada tersebut, maka potensi sosial politik masyarakat di Kabupaten Penajam Paser Utara yang menjadi peluang bagi tercapainya tujuan adalah:

- (1) Banyaknya kelembagaan sosial yang menunjang di tingkat pedesaan seperti Lembaga Musyawarah Desa, LPM, BPD, Karang Taruna, kelompok-kelompok tani, PKK, KUD, KUT dan Koperasi Kredit, TPQ-TPQ, dan kuatnya pengaruh Kepemimpinan tokoh-tokoh masyarakat setempat.
- (2) Kewenangan untuk mengatur pemerintahan sendiri (otonomi daerah);
- (3) Posisi strategis PPU yang berbatasan langsung dengan Kota Balikpapan;
- (4) Pintu gerbang arus barang dan jasa lintas propinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan.
- (5) Terwujudnya sistem politik yang demokratis dengan dukungan partai-partai politik untuk mewujudkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan

b). Proyeksi Ancaman

- (1) Ancaman ke depan dalam pembangunan politik di Kabupaten Penajam Paser Utara masih berkuat pada masalah tarik menarik kepentingan politik antar partai.
- (2) Keterbatasan anggaran pembangunan dari pusat;
- (3) Perlunya pemantapan stabilitas politik dan keamanan;
- (4) Masih perlunya upaya pengurangan kesenjangan antar wilayah khususnya di daerah perbatasan, perkotaan dan perdesaan.

c). Proyeksi Permasalahan

- (1) Analisa pertambahan dan kepadatan penduduk terlihat bahwa untuk jumlah pertambahan penduduk yang terdapat di Kabupaten Penajam Paser Utara masih kecil. Dalam sudut pandang politik, pertambahan jumlah penduduk tersebut berbanding lurus dengan pengorganisasian masyarakat sipil yang juga dirasakan semakin kuat.
- (2) Gambaran tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan ke depan yang mendesak adalah bagaimana agar pemerintah daerah dan berbagai elemen masyarakat lainnya dapat mendayagunakan potensi perkembangan masyarakat sipil (*civil society*) tersebut secara baik. Artinya, perkembangan konsolidasi masyarakat sipil ini dilihat sebagai sebuah potensi besar dalam pelaksanaan pembangunan politik di Kabupaten Penajam Paser Utara.

d). Proyeksi Keberhasilan

- (1) Saat ini kecenderungan makin membaiknya kondisi di Kabupaten Penajam Paser Utara nampaknya sudah makin menunjukkan arah yang berarti. Kendati demikian, bukan berarti keberhasilan akan dicapai dengan sendirinya tanpa adanya berbagai upaya intervensi produktif. Satu hal yang

cukup penting untuk mencapai derajat keberhasilan tinggi adalah Responsibilitas Aparatur. Hal ini dimaksudkan sebagai penilaian daya tanggap dan daya antisipatif pemda atas aspirasi warga, baik usulan maupun gugatan.

(2) Prestasi tentu merujuk pada tingginya daya tanggap dan daya antisipatif tersebut. Seberapa jauh kepedulian pemda terhadap persoalan dan keinginan yang timbul di masyarakat. Responsibilitas ini menyangkut pula penciptaan hubungan baik antara elit, birokrasi dan masyarakat. Terkait hal ini ditemukan beberapa program pemda yang secara pro-aktif membangun komunikasi langsung antara Pemda dan masyarakat.

3). Output

- a). Secara spesifik Kabupaten Penajam Paser Utara ke depan diharapkan dapat mengembangkan empat jenis program yang berbeda dalam membangun kesinambungan politik di daerahnya. Pertama, program yang berorientasi pada pendidikan politik. Program ini terutama ditujukan pada upaya-upaya daerah untuk menciptakan kondisi daerah yang kondusif (stabil) secara politik. Pemda mengembangkan mekanisme satu arah dalam pendidikan politik bermuatan wawasan kebangsaan.
- b). Program yang berorientasi pada upaya harmonisasi hubungan antar stakeholder (pemangku kepentingan) dalam masyarakat dan antar kekuatan politik. Secara kongkrit program ini dibuat dalam kegiatan-kegiatan pertemuan atau pengembangan forum antar stakeholder dalam masyarakat, seperti Parpol, Ormas, Orprof, dan LSM. Tujuan utama program ini, sebenarnya lebih pada upaya untuk membangun hubungan dan komunikasi yang harmonis antar stakeholder. Tujuan lainnya sebagai bagian dari upaya Pemerintah Daerah untuk menyerap aspirasi

masyarakat. Hal yang menarik, program ini ternyata oleh daerah dikongkritkan juga dalam konteks penyelenggaraan Pemilu dan pemberian bantuan dana bagi partai politik.

- c). Program pengembangan pelaksanaan hak asasi manusia (HAM). Isu HAM ternyata sudah masuk ke dalam rencana strategis (Renstra) Kabupaten Penajam Paser Utara. Dalam praktiknya sampai tahun ketiga pelaksanaan otonomi, Isu HAM dikembangkan sebatas tahap sosialisasi. Masih sedikit daerah yang secara progresif mengembangkan isu HAM secara praktis dalam konteks perlindungan HAM. Berangkat dari kegiatan yang dijalankan oleh Kabupaten Penajam Paser Utara, Pemerintah Daerah masih memahami bahwa persoalan HAM sebatas konteks politik, artinya Pemerintah Daerah belum mampu menarik benang merah antara prioritas program pembangunan dengan isu HAM.

3.2.2. Keamanan

1). Input : Kondisi Keamanan

Permasalahan kondisi keamanan di Kabupaten dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a). Adanya masalah keamanan masyarakat bersumber dari berbagai tindakan pelanggaran hukum, baik pidana maupun perdata masih banyak persoalan harus diselesaikan Program-program penyadaran hukum tersebut sangat penting khususnya untuk tindakan preventif.
- b). Besaran angka berbagai kasus tindakan melawan hukum tersebut di atas jelas membawa dampak pada kondisi keamanan daerah yang kurang kondusif. Pelanggaran hukum dapat dikategorikan dalam tidak pidana dan perdata
- c). Persoalan ekonomi regional dan nasional dipastikan akan berdampak luas terhadap kondisi ekonomi lokal Kabupaten

Penajam Paser Utara. Dan sudah menjadi sebuah kenyataan umum bahwa persoalan ekonomi sangat erat kaitannya dengan masalah sosial lainnya, khususnya keamanan. Mengingat adanya kecenderungan perekonomian nasional dan regional yang belum menunjukkan indikasi membaik, maka kecenderungan yang akan muncul di Kabupaten Penajam Paser Utara juga tidak akan jauh berbeda.

- d). Capaian yang ada saat ini untuk sektor keamanan adalah sudah dilakukannya upaya-upaya meningkatkan kekuatan perangkat keamanan. Sementara, aparat keamanan yang selama ini ada meskipun belum dapat dikatakan mencukupi tetapi sudah eksis dan dapat mengatasi berbagai permasalahan keamanan yang muncul di lapangan. Hanya saja modal dasar di sektor ini tentu membutuhkan berbagai upaya optimalisasi baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya.

2). Analisis Keamanan

a). Proyeksi Peluang

- (1) Kondisi eksternal sebenarnya cukup mendukung upaya perbaikan kondisi keamanan di Kabupaten Penajam Paser Utara ke depan. Semakin tegasnya tindakan aparat dalam menindak pelaku kejahatan yang memiliki kecenderungan meningkat sejak pertengahan tahun. Kesigapan aparat ini ditandai dengan semakin seringnya digelar operasi keamanan (misalnya operasi narkoba, lalu lintas, dll).
- (2) Secara statistik dapat dilihat terjadi kecenderungan penurunan jumlah kriminalitas. Jenis tindak kriminalitas yang mengalami penurunan cukup signifikan sebagai akibat peningkatan kesiagaan dan kesigapan aparat ini adalah curat dan curanmor. Kendati demikian, kedua jenis tindak

kejahatan ini masih merupakan kasus kejahatan dengan frekuensi tinggi.

- (3) Potensi kuatnya nilai kultural dan religius yang ada dan hidup di masyarakat sebenarnya adalah sebuah kekuatan dasar yang layak untuk dikembangkan. Norma dan nilai religius yang cukup tinggi dan terjaga juga merupakan sebuah modal dasar yang sangat signifikan. Aspek religiusitas yang kuat ini juga dapat melambatkan pilihan-pilihan individual masyarakat, khususnya dalam turut serta menjaga keamanan sosial secara kolektif dan berkelanjutan.
- (4) Masyarakat di Kabupaten Penajam Paser Utara sendiri pada dasarnya telah memiliki modal sosial (*social capital*) yang cukup mapan, khususnya dalam hal penciptaan kondisi keamanan yang kondusif. Berbagai kelembagaan masyarakat untuk pengamanan sosial sudah cukup banyak tersedia. Kolektivisme masyarakat yang terbingkai dalam kontrol sosial dan kelembagaan kultural dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk penciptaan kondisi keamanan yang lebih baik pada masa mendatang.

b). Proyeksi Ancaman

- (1) Jumlah peningkatan angka kejahatan di atas dapat dilihat bahwa dinamika sosial yang mungkin terjadi cukup besar.
- (2) Apabila tidak ada kerjasama antara pemerintah daerah, para pemuka agama/tokoh masyarakat dan aparat penegak hukum, maupun koordinasi dengan pemerintah provinsi mengenai kondisi keamanan jangka panjang tidak akan dapat dicapai hasil pembangunan yang terintegrasi dengan daerah lain dan kecenderungannya, pembangunan antar daerah akan berjalan secara parsial dan pembangunan di kabupaten Penajam Paser Utara dapat berjalan stagnan.

c). Proyeksi Permasalahan

- (1) Penjelasan di atas sesungguhnya sekaligus menjelaskan akan adanya proyeksi permasalahan itu sendiri. Hal ini menjadi permasalahan ke depan terutama ketika kemudahan transportasi memberi dampak meningkatnya pergerakan orang maupun barang.
- (2) Perlunya pemantapan stabilitas politik dan keamanan;
- (3) Masih perlunya upaya pengurangan kesenjangan sosial khususnya di daerah perbatasan, perkotaan dan perdesaan.

d). Proyeksi Keberhasilan

- (1) Dari berbagai kondisi keamanan yang ada, proyeksi keberhasilan secara umum dapat dikatakan cukup baik. Terutama ketika pada masa mendatang pemerintah dapat mengembangkan berbagai program pengembangan keamanan publik. Program ini berbeda dengan konteks keamanan yang diupayakan aparat keamanan, namun sebagai *support* untuk membangun sebuah kondisi aman di masyarakat.
- (2) Kegiatan yang dilakukan lebih pada upaya pemberian bantuan dan pelibatan masyarakat dalam menciptakan keamanan di wilayahnya masing-masing (swakarsa). Tujuannya jelas sebagai upaya sharing tanggungjawab dalam pengamanan wilayah. Masyarakat diharapkan memiliki kesadaran untuk mampu membangun sistem keamanan yang berasal dari masyarakat sendiri dan untuk kepentingan masyarakat sendiri.

3). Output

- a). Prediksi atas kondisi keamanan di Kabupaten Penajam Paser Utara ke depan makin membaik, terutama ketika pemerintah mampu meningkatkan kualitas dan keragaman perangkat keamanan yang ada.
- b). Di sektor keamanan ini pelaksanaan program yang ada pada kurun waktu terakhir sangatlah sedikit. Dari minimnya pola intervensi program di daerah dalam rangka peningkatan kemampuan pengamanan publik, maka arah intervensi ke depan sesungguhnya harus mengarah pada optimalisasi dan ekstensifikasi. Optimalisasi adalah lebih melihat pada kekuatan yang sudah ada saat ini. Bagaimana pembenahan pola manajemen, kedisiplinan, peningkatan kualitas, komitmen serta pembagian tugas yang jelas antar aparat keamanan yang ada sangatlah diperlukan.
- c). Ekstensifikasi adalah memperluas dan memperbanyak jumlah elemen yang ada yang akan melakukan tugas-tugas pengamanan. Ekstensifikasi ini dapat dilakukan di dalam dan di luar. Ekstensifikasi yang kedalam adalah bagaimana pemerintah daerah dapat memotivasi dan memfasilitasi masyarakat dan berbagai pelaku pembangunan di Kabupaten Penajam Paser Utara untuk mau turut serta menginisiasi (mendorong agar mengambil prakarsa) lembaga-lembaga keamanan swadaya. Arahnya agar lembaga ini dapat secara proaktif mengantisipasi serta mengatasi berbagai aksi kriminal maupun kerusuhan sosial yang ada di masyarakat. Sedangkan ekstensifikasi ke luar adalah dengan jalan turut bersama aparat yang lain, mendesakkan kebijakan penambahan personil keamanan yang akan di tugaskan di Kabupaten Penajam Paser Utara.

3.2.3 Pemerintahan

1. Input : Kondisi Pemerintahan

- a) Sesuai dengan berlakunya UU Nomor 32 Tahun 2004, kewenangan daerah kini mencakup seluruh urusan pemerintahan kecuali urusan yang telah ditetapkan menjadi kewenangan pemerintah pusat. Dalam pasal 14 ayat 1 UU Nomor 32 Tahun 2004 telah ditentukan kewenangan yang wajib dilaksanakan oleh daerah kabupaten dan daerah kota. Selanjutnya dalam pasal 14 ayat 2 dikemukakan adanya: urusan pemerintahan kabupaten/kota yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Penjelasan pasal 14 ayat 2 ini: yang dimaksud urusan pemerintahan yang secara nyata ada dalam ketentuan ini sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi yang dimiliki antara lain pertambangan dan penggalian, perikanan, pertanian, perkebunan, kehutanan, dan pariwisata.
- b) Berdasarkan pasal 18 ayat 1 UU Nomor 32 Tahun 2004 Daerah juga berwenang mengelola sumber daya di wilayah laut. Dalam ayat 2 dikemukakan bahwa: daerah mendapatkan bagi hasil atas pengelolaan sumberdaya alam di bawah dasar dan atau di dasar laut sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya pada ayat 3 dikemukakan bahwa kewenangan daerah di wilayah laut meliputi: eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut; pengaturan administratif; pengaturan tata ruang; penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh pemerintah; ikut serta dalam pemeliharaan keamanan; ikut serta dalam pertahanan kedaulatan negara. Kewenangan daerah kabupaten/kota di

wilayah laut adalah sejauh sepertiga dari batas laut daerah propinsi.

- c) Telah dilakukan koordinasi yang mengacu pada perundang-undangan yang berlaku, baik menyangkut koordinasi dengan lembaga-lembaga pelaksana urusan pemerintahan daerah, koordinasi dengan lembaga teknis daerah, dengan unsur staf, maupun dengan lembaga-lembaga lainnya secara berkala dan rutin.
- d) Telah dilakukan penambahan fasilitas baik menyangkut penyediaan prasarana maupun sarana pemerintah, penyediaan/pencadangan fasilitas tanah untuk perluasan pembangunan gedung perkantoran.
- e) Di bidang hukum dan perundang-undangan telah dilakukan penyuluhan hukum, sarasehan dan pengawasan pelaksanaan produk hukum dan peraturan daerah melalui sosialisasi dan operasi yang bersifat pembinaan dengan melibatkan berbagai instansi terkait.
- f) Dalam hal penyelenggaraan otonomi daerah telah dilaksanakan penataan kelembagaan pemerintahan daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Di samping itu juga telah dilaksanakan penataan kelembagaan pada tingkatan pemerintahan desa, dan kaitannya dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya. Sebagian besar urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan wajib maupun kewenangan pilihan telah dilaksanakan.

2. Analisis Pemerintahan

a). Proyeksi Peluang

- 1) Dimungkinkan adanya pembentukan dan pengembangan struktur organisasi pemerintahan yang dapat menyelenggarakan fungsinya secara efektif dan efisien dalam pelaksanaan

pembangunan, penyediaan layanan publik, termasuk dalam upaya meningkatkan sumber pendapatan asli daerah (PAD).

- 2) Diperlukan adanya kerjasama dengan pemerintah daerah lain, dengan sektor swasta, maupun koordinasi dengan pemerintah propinsi mengenai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak mampu ditangani sendiri oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara sehingga dalam jangka panjang akan dapat dicapai hasil pembangunan yang terintegrasi dengan daerah lain.
- 3) Dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien dimungkinkan untuk menyusun pengelolaan anggaran bagi setiap institusi pemerintahan yang berbasis kinerja. Kinerja institusi yang berorientasi sebagai penghasil (meningkatkan sumber PAD) perlu dibedakan dengan kinerja institusi yang berorientasi pada layanan publik.
- 4) Dimungkinkan adanya peningkatan kuantitas dan kualitas pegawai untuk menunjang efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan. Penambahan jumlah pegawai perlu didasarkan pada proyeksi kebutuhan dengan tidak mengabaikan aspek kualitas; sedangkan peningkatan kualitas pegawai dapat dilakukan dengan mengikutsertakan pada pendidikan dan latihan.
- 5) Diperlukan adanya kerjasama antar institusi pemerintahan daerah dalam bentuk koordinasi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi penyelenggaraan pemerintahan sehingga akan menunjang terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien.

b). Proyeksi Ancaman

- 1) Terhambatnya pengembangan struktur organisasi pemerintahan dapat menyebabkan terjadinya inefisiensi dan tidak efektifnya pelaksanaan pembangunan, penyediaan layanan publik,

termasuk upaya meningkatkan sumber pendapatan asli daerah (PAD).

- 2) Apabila tidak ada kerjasama dengan pemerintah daerah lain, dengan sektor swasta, maupun koordinasi dengan pemerintah propinsi mengenai penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam jangka panjang tidak akan dapat dicapai hasil pembangunan yang terintegrasi dengan daerah lain dan kecenderungannya, pembangunan antar daerah akan berjalan secara parsial.
- 3) Apabila tidak disusun pengelolaan anggaran bagi setiap institusi pemerintahan yang berbasis kinerja akan menyebabkan penyelenggaraan pemerintahan yang tidak efektif dan efisien. Karena itu diperlukan penyusunan anggaran berbasis kinerja bagi institusi yang berorientasi sebagai penghasil (meningkatkan sumber PAD) maupun institusi yang berorientasi pada layanan publik.
- 4) Kurangnya kuantitas dan kualitas pegawai akan menyebabkan tidak efektif dan inefisiensi penyelenggaraan pemerintahan. Untuk itu diperlukan penambahan jumlah pegawai berdasarkan proyeksi kebutuhan dengan tidak mengabaikan aspek kualitas; dan peningkatan kualitas pegawai dengan mengikutsertakan pada pendidikan dan latihan.
- 5) Kurangnya kerjasama antar institusi pemerintahan daerah dalam bentuk koordinasi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi penyelenggaraan pemerintahan akan sulit diwujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien.

c). Proyeksi Permasalahan

- 1) Dalam jangka menengah maupun jangka panjang akan muncul masalah pembentukan dan pengembangan struktur organisasi pemerintahan yang dapat menyelenggarakan fungsinya secara

efektif dan efisien dalam pelaksanaan pembangunan, penyediaan layanan publik.

- 2) Kurangnya kerjasama dengan pemerintah daerah lain, dengan sektor swasta, maupun koordinasi dengan pemerintah propinsi mengenai penyelenggaraan urusan pemerintahan sehingga dalam jangka menengah maupun jangka panjang sulit untuk mewujudkan pembangunan yang terintegrasi dengan daerah lain.
- 3) Kurangnya pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien bagi setiap institusi pemerintahan yaitu pengelolaan anggaran yang berbasis kinerja; baik institusi yang berorientasi sebagai penghasil (meningkatkan sumber PAD) maupun institusi yang murni berorientasi pada layanan publik.
- 4) Kuantitas maupun kualitas pegawai akan menjadi persoalan dalam upaya menunjang efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan. Karena itu diperlukan penambahan jumlah pegawai berdasarkan pada proyeksi kebutuhan dan peningkatan kualitas pegawai melalui keikutsertaan dalam pendidikan dan latihan.
- 5) Akan tetap muncul masalah kerjasama antar institusi pemerintahan daerah dalam bentuk koordinasi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi penyelenggaraan pemerintahan sehingga sulit mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien.

d). Proyeksi Keberhasilan

- 1) Akan dapat dilakukan pembentukan dan pengembangan struktur organisasi pemerintahan yang dapat menyelenggarakan fungsinya secara efektif dan efisien dalam pelaksanaan pembangunan, penyediaan layanan publik, termasuk dalam upaya meningkatkan sumber pendapatan asli daerah (PAD).

- 2) Dapat diwujudkan adanya kerjasama dengan pemerintah daerah lain, dengan sektor swasta, maupun koordinasi dengan pemerintah propinsi mengenai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak mampu ditangani sendiri oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara; sehingga dalam jangka panjang akan dapat dicapai hasil pembangunan yang terintegrasi dengan daerah lain.
- 3) Terwujudnya pengelolaan anggaran bagi setiap institusi pemerintahan yang berbasis kinerja untuk mewujudkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan; baik institusi yang diproyeksikan untuk meningkatkan sumber PAD maupun institusi yang berorientasi pada layanan publik.
- 4) Tercapainya peningkatan kuantitas dan kualitas pegawai untuk menunjang efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan; baik berdasarkan proyeksi kebutuhan maupun peningkatan kualitas pegawai karena keikutsertaannya dalam pendidikan dan latihan.
- 5) Terwujudnya kerjasama antar institusi pemerintahan daerah dalam bentuk koordinasi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi penyelenggaraan pemerintahan sehingga tidak akan ada ego sektoral dan menunjang terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien.

3. Output

- a) Terbentuk dan berkembangnya struktur organisasi pemerintahan yang dapat menyelenggarakan fungsinya secara efektif dan efisien dalam pelaksanaan pembangunan, penyediaan layanan publik, termasuk dalam upaya meningkatkan sumber pendapatan asli daerah (PAD).
- b) Adanya institusi pemerintahan daerah yang menangani urusan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; sehingga

tidak ada kerancuan misalnya dalam menangani urusan penyediaan prasarana dan sarana umum, maupun penanganan urusan-urusan lainnya.

- c) Adanya kriteria yang jelas mengenai kerjasama dengan pihak swasta, daerah lain, dan dengan pemerintah propinsi mengenai urusan pemerintahan yang seharusnya ditangani oleh kabupaten atau ditangani oleh propinsi, atau ditangani oleh kabupaten dan propinsi. Karena itu diperlukan perundang-undangan (perda) yang didasarkan kajian mendalam untuk mengatur kewenangan diantara kedua institusi pemerintahan daerah tersebut.
- d) Adanya alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan belum mencerminkan prinsip anggaran berbasis kinerja (*money follow function*); baik institusi yang berorientasi sebagai penghasil (meningkatkan sumber PAD) maupun institusi yang berorientasi pada layanan publik.
- e) Adanya peningkatan kuantitas dan kualitas pegawai untuk menunjang efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan. Penambahan jumlah pegawai perlu didasarkan pada proyeksi kebutuhan dengan tidak mengabaikan aspek kualitas; sedangkan peningkatan kualitas pegawai dapat dilakukan dengan mengikutsertakan pada pendidikan dan latihan.
- f) Terwujudnya kerjasama antar institusi pemerintahan daerah dalam bentuk koordinasi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi penyelenggaraan pemerintahan sehingga akan menunjang terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien.

3.3 Kondisi Sosiokultural Dan Kualitas Hidup

Penduduk merupakan salah satu modal dasar atau asset pembangunan nasional. Penduduk tidak hanya sebagai sasaran pembangunan, tetapi juga merupakan pelaku pembangunan. Oleh sebab itu, pembangunan di sektor ini sangat penting untuk dilaksanakan. Tujuannya tentu untuk meningkatkan pelayanan kependudukan dan pengendalian jumlah penduduk dalam rangka penyediaan dan penyerapan tenaga kerja yang berkualitas.

Tahun 2009 penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara mengalami pertumbuhan sebesar 2.47 % yaitu 137.165 jiwa dari 133.859 jiwa pada tahun 2008. Penduduk di Kabupaten Penajam Paser Utara pada akhir tahun 2009 terdiri dari 70.665 penduduk laki-laki dan 66.508 penduduk perempuan dengan persentase pertumbuhan 2,47 %. Rasio jenis kelamin penduduk pada tahun 2008 di Kabupaten Penajam Paser Utara tercatat lebih besar dari angka 100 yaitu 106,24 yang artinya penduduk perempuan lebih sedikit dibanding penduduk laki-laki.

Dilihat dari aspek distribusi penduduk, sebaran penduduk di Kabupaten Penajam Paser Utara di Kecamatan Penajam sebanyak 61.062 jiwa, di Kecamatan Sepaku 27.910 di Kecamatan Babulu 34.892 jiwa, dan di Kecamatan Waru sebanyak 13.301 jiwa. Kepadatan penduduk di Kabupaten Penajam Paser Utara yang paling tinggi terdapat di Kecamatan Babulu sebesar 87,35 jiwa/km², dan terendah terdapat di Kecamatan Sepaku dengan kepadatan penduduknya 23,81 jiwa/km².

Data kondisi empiris kependudukan dan tenaga kerja menurut data tahun 2009 adalah seperti berikut :

1. Dari total jumlah penduduk 137.165 jiwa terdapat sebanyak 91.819 jiwa (sekitar 67%) tergolong penduduk usia produktif. Hal ini memberikan indikasi bahwa secara kuantitatif potensi penduduk usia produktif di Kabupaten PPU cukup besar. Rasio ketergantungan sangat rendah, yaitu rata-rata sebesar 116, artinya dari sejumlah 1000 orang

yang berpotensi menjadi tenaga kerja produktif (umur 15-64 tahun) menanggung 116 orang yang belum produktif (umur < 15 tahun) atau tidak produktif (umur 65 tahun ke atas).

2. Rata-rata pertumbuhan jumlah penduduk pada lima tahun terakhir (2004-2009) sebesar 0,03%, di mana tingkat pertumbuhan penduduk terendah di Kecamatan Babulu, dan tertinggi di Kecamatan Penajam;
3. Pertumbuhan penduduk di Kecamatan Penajam lebih disebabkan oleh migrasi masuk karena Penajam menjadi pusat perdagangan, pelabuhan, dan pemerintahan;
4. Jumlah pencari kerja yang belum ditempatkan sampai dengan akhir bulan Desember 2009 sebesar 1.278 jiwa.

Dari sekian banyak sektor yang ada, pertanian merupakan sektor dominan yang paling banyak menyerap tenaga kerja yaitu sekitar 15.001 orang. Dua sektor lain yang banyak menyerap tenaga kerja adalah sektor jasa dan perdagangan.

Laju pertumbuhan penduduk di suatu wilayah biasanya mempunyai dampak negatif terhadap masalah sosial, artinya semakin tinggi laju pertumbuhan penduduk maka masalah sosial di daerah itu akan semakin kompleks. Beberapa contoh misalnya kemiskinan dan anak terlantar, sarana pendidikan, sarana kesehatan dan sebagainya. Hingga tahun 2009, kondisi empiris sosial kemasyarakatan di Kabupaten Penajam Paser Utara dapat digambarkan seperti berikut:

1. Dari keseluruhan jumlah penduduk 137.165 jiwa, sebanyak \pm 19.000 jiwa (13,54%) dikategorikan sebagai penduduk miskin. Pada umumnya, pola penyebarannya berada pada daerah pedesaan dan terpencil;
2. Jumlah penduduk yang diklasifikasikan sebagai golongan yatim-piatu terdapat sebanyak 145 orang;
3. Terdapat 7 (Tujuh) Panti Asuhan Sosial dengan 200 anak asuh;
4. Organisasi kemasyarakatan pemuda terdapat sebanyak 47 organisasi yang tersebar di 4 (empat) kecamatan.

1. Input : Kondisi Kualitas Hidup

- a) Pengukuran tingkat kualitas hidup penduduk yang disebut Indeks Pembangunan manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI) mengkombinasikan tiga aspek indikator, yaitu angka harapan hidup (*Life Expectancy Rate*), pendidikan yang diukur dengan angka melek huruf rata-rata dan lamanya sekolah dan pendapatan yang diukur dengan daya beli masyarakat (*purchasing power parity*). Berdasarkan kesimpulan laporan indeks pembangunan manusia Kabupaten Penajam Paser Utara (2009), nilai IPM Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar 73,11 yang berarti masih 27,89 poin tertinggal dari nilai ideal IPM yaitu 100. Dimana untuk tingkat nasional menduduki peringkat 116 dan peringkat kedelapan di Provinsi Kalimantan Timur dari 13 Kabupaten di Kalimantan Timur.
- b) Tingkat harapan hidup di Kabupaten Penajam Paser Utara adalah 71,32 tahun, angka melek hurufnya adalah 94,93%, dengan rata-rata lama pendidikannya 7,58 tahun sesuai dengan Susenas 2001, Tingkat harapan hidup Kabupaten Penajam Paser Utara sudah diatas rata-rata Kalimantan Timur (70,3) dan rata-rata Nasional sebesar 66,1 tahun. Akan tetapi angka melek hurufnya masih dibawah rata-rata Kalimantan Timur 95,3 persen dan tetapi sudah diatas tingkat nasional sebesar 90,9 persen. Rata-rata lama pendidikannya setara dengan Kalimantan Timur yaitu 6 tahun.
- c) Prasarana dan sarana Kesehatan di Kabupaten Penajam Paser Utara merupakan faktor yang berkontribusi terhadap tingkat harapan hidup penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara. Indikator-indikator derajat kesehatan penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara sampai dengan akhir tahun 2008 meliputi penurunan angka kematian bayi sebesar 10 per 2788 orang (0,36%). Sedangkan angka kematian ibu bersalin adalah 3 per 2788 orang

- d) Lembaga pendidikan mulai tingkat Sekolah Dasar sampai dengan Sekolah Lanjutan Atas yang diharapkan mampu menghasilkan lulusan sumberdaya manusia yang berkualitas. Jumlah Sekolah (Negeri dan Swasta) pada tahun 2008 menunjukkan:
- 1) 105 Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah baik negeri maupun swasta (total 19.016 siswa);
 - 2) 20 SLTP Negeri dan 14 SLTP swasta dengan jumlah siswa 6.166 siswa);
 - 3) 19 SMU/SMK/MA dengan jumlah siswa 3.945 siswa.
- e) Heterogenitas etnis masyarakat Kabupaten PPU yang masing-masing memiliki karakteristik keahlian spesifik yang dipandang sangat menguntungkan bagi pembangunan daerah. Suku Pasir memiliki spesialisasi keahlian di bidang kehutanan, suku Bugis ahli dalam bidang bahari dan pertambakan, suku Banjar ahli dalam bidang perdagangan sedangkan suku Jawa ahli dalam bidang pertanian dan perkebunan.
- f) Mobilitas penduduk yang cukup tinggi, terutama cukup banyaknya pendatang di beberapa ibukota Kecamatan akan berdampak pada cepatnya perubahan sosial dan kecepatan kemajuan di berbagai bidang pembangunan.
- g) Hal selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah alokasi dana untuk sektor pendidikan seyogyanya terus dipertahankan mendapatkan prioritas utama.
- h) Potensi sumber penghasilan di Kabupaten Penajam Paser Utara yang banyak, dengan masih banyaknya potensi sumberdaya alam, akan tetapi dari sisi teknologi, permodalan dan akses pasar juga menyulitkan keadaan dalam pengembangannya. Kondisi alam Kabupaten Penajam Paser Utara sesuai topografi, geologi, jenis tanah, iklim dan hidrologi menunjukkan produktifnya lahan-lahan pertanian. Beberapa daerah yang jauh dan belum sepenuhnya terjangkau sarana dan prasarana pokok permukiman seperti

transportasi, listrik dan air bersih menjadikan lokasi-lokasi tersebut semakin terisolir dari aksesnya terhadap pasar.

2. Analisis Kualitas Hidup

a). Proyeksi Peluang

Berdasarkan kondisi sektor kesehatan, pendidikan dan kemampuan ekonomi masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara diatas, maka ada beberapa peluang untuk kemajuan pembangunan manusia Kabupaten Penajam Paser Utara :

- 1) Masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara dengan indeks pembangunan manusia yang cukup baik seyogyanya mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah Propinsi Kalimantan Timur maupun pemerintah nasional untuk menjadi target utama program dan strategi pemberdayaan masyarakatnya. Sehingga alokasi dana bantuan untuk pembangunan sumber daya manusia bisa lebih ditingkatkan dan diprioritaskan.
- 2) Pada sektor kesehatan adanya peluang untuk mengajukan program-program pembangunan dalam upaya peningkatan ketrampilan dan peralatan tenaga medis tradisional, Sehingga diharapkan tingkat kematian kelahiran bayi dirumah akan dapat ditekan. Jumlah tenaga dokter dan tenaga medis lainnya juga tidak mengalami peningkatan yang cukup memadai dalam 10 tahun terakhir. Oleh karena itu perlu dipersiapkan insentif bagi mereka yang ingin mengabdikan di Kabupaten sehingga kedepan peluang penambahan tenaga medis dapat ditingkatkan sesuai dengan pertumbuhan penduduk.
- 3) Pada sektor pendidikan dipandang perlu melakukan penambahan tenaga pendidikan untuk level Sekolah Dasar, SLTP dan SLTA.
- 4) Perlunya strategi pendidikan yang diarahkan pada upaya-upaya memperpanjang rata-rata lama pendidikan siswa. Alokasi

pemanfaatan dana pendidikan seyogyanya diprioritaskan meringankan biaya pendidikan bagi siswa yang ingin terus melanjutkan sekolah. Sedangkan strategi lainnya seperti peningkatan kualitas guru melalui pelatihan dan pendidikan mendapatkan dan perbaikan sarana pendidikan mendapatkan tempat prioritas-prioritas selanjutnya. Apabila yang menjadi target arah kebijakan adalah peningkatan IPM Kabupaten Penajam Paser Utara.

- 5) Kurikulum yang berbasis kerja juga peluang yang perlu digarap agar anak peserta didik lebih mendekati dunia kerja disekitarnya. Disamping itu subyek studi yang berkaitan dengan upaya penangkalan infiltrasi budaya asing ke masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara juga perlu disiasati untuk membentengi generasi muda dalam memfilter informasi yang mereka terima.
- 6) Peluang program-program pemberdayaan ekonomi masyarakat dipandang sangat perlu, apalagi mengingat kedepan pembangunan jembatan Penajam – Balikpapan yang menghubungkan Balikpapan dan Penajam telah selesai.
- 7) Pembangunan jembatan Penajam – Balikpapan diproyeksikan memberikan peluang pada percepatan pertumbuhan ekonomi dan akan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam pembiayaan pendidikan dan kesehatan.
- 8) Etos kerja masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara merupakan modal untuk membangun kesadaran masyarakat tersebut untuk menimba ilmu kejenjang pendidikan yang lebih tinggi.
- 9) Adanya pembangunan di bidang sosial kemasyarakatan diharapkan dapat meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang bermartabat dan berbudaya serta dinamis, adaptif, dan memiliki ketahanan sosial-budaya dalam menghadapi segala

bentuk perubahan di era otonomi daerah serta perkembangan perekonomian nasional, regional maupun global.

b). Proyeksi Ancaman

Berdasarkan kondisi sektor kesehatan, pendidikan dan kemampuan ekonomi masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara diatas, maka ada beberapa proyeksi ancaman untuk kemajuan pembangunan manusia Kabupaten Penajam Paser Utara:

- 1) Ancaman yang paling mendasar untuk pembangunan SDM di Kabupaten Penajam Paser Utara adalah ber (i) migrasinya kader-kader muda terbaik dari wilayah ini keluar Kabupaten Penajam Paser Utara, karena berkarier di wilayah lain seperti di pulau jawa ataupun luar negeri lebih menjanjikan dari segi pendapatan dan jaminan hidup ke depan.
- 2) Industrialisasi di Kabupaten Penajam Paser Utara dikarenakan pembangunan jembatan Penajam – Balikpapan diprediksikan juga akan membawa ekses-ekses negatif berupa infiltrasi budaya asing.

c). Proyeksi Permasalahan

Berdasarkan kondisi sektor kesehatan, pendidikan dan kemampuan ekonomi masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara di atas, maka ada beberapa proyeksi permasalahan pembangunan manusia Kabupaten Penajam Paser Utara:

- 1) Permasalahan utama di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara adalah pada upaya-upaya peningkatan pembangunan sumberdaya manusianya yang meliputi sektor kesehatan, pendidikan dan pendapatan perlu dilakukan secara bersamaan. Kurang berhasilnya upaya-upaya peningkatan sektor perekonomian akan menjadi penghambat tenaga-tenaga muda produktif di Kabupaten Penajam Paser Utara untuk bertahan di wilayah ini.

- 2) Permasalahan selanjutnya adalah strategi kebijakan dalam sektor pendidikan, kesehatan dan peningkatan pendapatan masyarakat seyogyanya ditujukan pada hasil dan dampak langsung dirasakan oleh masyarakat. Strategi kebijakan yang tidak langsung memberi hasil dan dampak ke masyarakat seyogyanya menjadi prioritas lanjutan.
- 3) Terbatasnya dana pengembangan ketiga sektor tersebut juga akan menjadi permasalahan tersendiri. Oleh karena itu perlu dipikirkan bentuk-bentuk kerjasama kemitraan antara pemerintah dan masyarakat dalam menanggulangi keterbatasan dana anggaran, dan perlu strategi alokasi dan distribusi dana anggaran secara tepat dan hasil guna.

d). Proyeksi Keberhasilan

Berdasarkan kondisi sektor kesehatan, pendidikan dan kemampuan ekonomi masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara di atas, maka ada beberapa proyeksi keberhasilan pembangunan manusia Kabupaten Penajam Paser Utara:

- 1) Keberhasilan pembangunan kualitas sumber daya manusia sangat tergantung kerjasama ketiga sektor meliputi pemerintah, masyarakat dan swasta dalam kerangka kerja *'good governance'*. Masing-masing sektor merupakan mitra antara satu dengan lainnya dimana akuntabilitas dan tanggungjawab terhadap arah dan permasalahan pembangunan ditanggung secara bersama. Dialog dan kerjasama antara ketiga sektor tersebut akan menunjang keberhasilan program pembangunan SDM di Kabupaten Penajam Paser Utara.
- 2) Transparansi antar ketiga sektor diatas dalam mengkomunikasikan indikator-indikator pembangunan SDM di Kabupaten Penajam Paser Utara akan menambah tingkat kepercayaan (*'trust'*) antara ketiga sektor tersebut. Masyarakat

akan memahami problem yang dihadapi pemerintah dalam upaya pembangunan SDM dan begitu pula sebaliknya pemerintah akan memahami problem-problem riil di masyarakat, termasuk hal-hal yang menghambat keberhasilan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Masyarakat dan pemerintah memahami kesulitan aktor-aktor ekonomi dalam mengembangkan usahanya di wilayah ini dan begitu pula sebaliknya. Sehingga keberhasilan ataupun kegagalan strategi dan program pembangunan merupakan aksi bersama, sehingga resistensi penolakan yang bisa diwujudkan dengan aksi-aksi unjuk rasa dan aksi ketidakpuasan lainnya bisa dieliminir.

- 3) Keberhasilan disini bukan hanya keberhasilan dalam meningkatkan indeks IPM tetapi juga keberhasilan dalam mendewasakan sektor pemerintah, masyarakat dan kalangan bisnis dalam kerangka *'good governance'*.
- 4) Keberhasilan pembangunan ekonomi di Kabupaten Penajam Paser Utara dapat diindikasikan dengan terdapatnya alih teknologi modern kepada masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara.
- 5) Keberhasilan di Kabupaten Penajam Paser Utara juga diindikasikan dengan kemampuan untuk meminimalisasikan dampak infiltrasi budaya asing yang negatif.
- 6) Terciptanya kesejahteraan dan keadilan sosial yang lebih merata bagi seluruh lapisan masyarakat di kota maupun di pedesaan, sesuai dengan harkat dan martabat serta nilai-nilai kemanusiaan yang beradab, meningkatkan kemampuan, kesempatan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah, serta pengembangan dan peningkatan kinerja organisasi-organisasi sosial, panti-panti sosial, karang taruna, maupun lembaga-lembaga sosial serta meningkatkan profesionalisme para pekerja sosial.

3. Output

- a). Strategi dan program kebijakan dibidang SDM akan menunjukkan arah yang baik apabila indikator dalam indeks pembangunan menuju kearah perbaikan. Indikator-indikator yang dimaksud adalah termasuk diantaranya indikator harapan hidup, melek huruf, lamanya pendidikan, dan kemampuan membeli.
- b). Disamping ketiga aspek tersebut diatas, perlu juga diperhatikan *output-output* lainnya yang merupakan indikator-indikator penunjang bagi peningkatan indeks pembangunan manusia, seperti *output* yang berbentuk keamanan dan kenyamanan berusaha, serta terbebas dari berbagai pungutan liar merupakan situasi yang mendukung *output* pertumbuhan ekonomi.
- c). *Output* jaminan status kepegawaian, berkarier dan kecukupan standar hidup merupakan daya tarik bagi para tenaga medis untuk bekerja di wilayah ini.
- d). *Output* kebijakan Kabupaten Penajam Paser Utara berupa pendekatan formal dan informal untuk meningkatkan moralitas dan etos pendidikan masyarakat.
- e). *Output* kebijakan Kabupaten Penajam Paser Utara berupa pendidikan formal dan informal di masyarakat untuk menanggulangi dampak negatif dari infiltrasi budaya asing.

3.4 Sumber Daya Alam

Pendekatan lingkungan mengkonsepsikan pembangunan sebagai pengelolaan biosphere dan pemanfaatan sumberdaya manusia, modal sumberdaya hayati dan non hayati untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kualitas hidup manusia. Yang dimaksud dengan konservasi ialah pengelolaan biosphere bagi keperluan manusia sehingga menghasilkan manfaat sebesar-besarnya bagi generasi kini dan memantapkan potensi untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi generasi

yang akan datang. Strategi konservasi meliputi kegiatan perlindungan, pengawetan, pemeliharaan, rehabilitasi, introduksi, pelestarian pemanfaatan dan pengembangan.

Pembangunan tanpa pertimbangan ekologi bisa menimbulkan kerusakan lingkungan, dan pada gilirannya menimbulkan masalah sosial dan ekonomi. Untuk menghindari kondisi demikian perlulah diintegrasikan pada setiap tahap ikhtiar konservasi dengan proses pembangunan, sejak penetapan kebijakan hingga pelaksanaan dan operasinya, hal ini dilakukan melalui kebijakan partisipasi lingkungan dan kebijakan pelestarian lintas instansi.

Hingga saat ini, sumber daya alam sangat berperan sebagai sokoguru (tiang utama) perekonomian Kabupaten Penajam Paser Utara, dan masih akan diandalkan dalam jangka panjang. Kelangsungan dan perkembangan usaha subsektor-subsektor sangat bergantung pada pemeliharaan dan pengelolaan kelestarian sumberdaya alam yang menunjangnya.

Sumberdaya alam menurut karakternya secara umum dibedakan menjadi dua, yaitu: Sumberdaya yang dapat diperbarui dan sumberdaya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumberdaya alam yang dapat diperbaharui seperti: iklim, lahan, perhutanan, perkebunan, pertanian, pertambakan, mata air, sungai, danau, lautan dan lain-lain. Sedangkan sumberdaya tidak dapat diperbarui misalnya mineral (bahan tambang), bahan galian, dan lain-lain. Gambaran umum sumberdaya alam Kabupaten Penajam Paser Utara dapat digambarkan sebagai berikut:

3.4.1 Sumber Daya Iklim

1). Input : Kondisi Iklim

- a). Seperti daerah di Indonesia pada umumnya yang merupakan daerah tropis, Kabupaten Penajam Paser Utara mempunyai iklim tropis yang ditandai dengan adanya 2 (dua) musim, yaitu musim hujan dan kemarau. Musim hujan berlangsung mulai dari bulan Oktober sampai dengan Maret, dan musim kemarau berlangsung mulai dari bulan April sampai dengan September.
- b). Hujan terjadi sepanjang tahun, hanya frekuensi terbanyak terjadi pada bulan Januari sampai April. Pada bulan Mei sampai dengan September berkurang dan mulai bulan Oktober sampai dengan Desember mulai turun hujan dengan frekuensi berangsur-angsur bertambah.
- c). Keadaan udara di Kabupaten Penajam Paser Utara hingga tahun 2008 dapat dikatakan masih bersih sebab belum banyak sumber-sumber polusi udara baik yang berasal dari industri, kendaraan bermotor, maupun aktivitas pembakaran yang melampaui daya dukung alam sehingga keadaan udara di Kabupaten Penajam Paser Utara pada umumnya relatif dapat dikatakan segar dan sehat dan masyarakat masih merasakan nyaman menghirup udara yang segar. Suhu udara relatif panas berkisar antara 28°C - 32°C yang sangat cocok untuk tanaman perkebunan.
- d). Keadaan udara tersebut ditunjang oleh keadaan lingkungan yang masih memadai penghijauannya untuk menjaga kesegaran udara yang sehat alami, baik dari sektor kehutanan, pertanian dan perkebunan.

2). Analisis Sumber Daya Iklim

a). Proyeksi Peluang

- (1) Keadaan udara Kabupaten Penajam Paser Utara yang selama ini hingga tahun 2009 masih relatif segar dan sehat akan dapat dipertahankan selama variabel-variabel lingkungan

penentu kesegaran udara dapat dipertahankan. Variabel-variabel yang mempengaruhi kesegaran udara adalah siklus musim, hutan (konservasi dan produksi), tanaman penghijauan (perkebunan, pertanian, pekarangan, kawasan pemukiman) harus ditingkatkan di masa depan, khususnya dalam masa pembangunan jangka panjang 20 tahun kedepan sebagai perimbangan atas terbukanya peluang pengembangan kawasan industri, perdagangan dan pemukiman baru dan pertumbuhan penduduk karena migrasi yang menyertainya. Program penetapan kawasan hutan konservasi dan penghijauan setiap kawasan tidak saja dihubungkan dengan debit air, erosi, abrasi, produksi pertanian, perkebunan dan hutan, akan tetapi juga diperhitungkan secara teliti dengan kebutuhan paru-paru daerah dalam menciptakan pemeliharaan kesegaran udara yang sehat mengantisipasi perkembangan kawasan industri, perdagangan dan pemukiman baru nantinya.

- (2) Faktor manusia selaku penguasa dan penentu keadaan lingkungan hidup dan kelestarian sumberdaya alam, yakni masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara sendiri baik dari kalangan petani, nelayan, pengusaha, ulama, dan umara' (pemerintah) perlu dikembangkan adanya pembaharuan kesadaran terus-menerus untuk meluaskan wawasan, pengertian dan kemampuan kebersamaan kerjasama dalam pengelolaan kesegaran udara tidak sebatas memelihara kelestarian lingkungan hidup akan tetapi menempatkan program peningkatan kesegaran udara alami sebagai prioritas program lingkungan untuk meningkatkan daya tarik daerah mengundang partisipasi dalam investasi dan pembangunan daerah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam 20 tahun pembangunan ke depan.

b). Proyeksi Ancaman

- (1) Faktor-faktor lain yang dimasa depan signifikan akan ancaman yang mempengaruhi keadaan udara Kabupaten Penajam Paser Utara adalah polusi udara yang bersumber dari asap buang pabrik, kendaraan bermotor, pembakaran limbah pertanian dan kebakaran hutan, polusi dari gas buang penggunaan mesin-mesin pengolah udara seperti AC dan almari es (*refrigerator*), serta polusi dari gas buang akibat proses pembusukan limbah industri, pasar maupun rumah tangga yang lalai penanganannya yang harus diproyeksikan ke depan.
- (2) Masih rendahnya pengetahuan dan pengertian masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara terhadap masalah kelestarian udara segar yang sehat. Kebiasaan buruk pengelolaan limbah keluarga merupakan potensi sumber pencemaran udara yang dapat berubah menjadi ancaman nyata dimasa mendatang.
- (3) Faktor lain yang perlu dipertimbangkan adalah kemungkinan adanya sumber-sumber pencemaran yang datang dari daerah-daerah tetangga yang memerlukan penanganan bersama.

c). Proyeksi Permasalahan

- (1) Sekalipun udara segar yang sehat masih dapat dinikmati dengan bebas hingga akhir 2009, akan tetapi dalam 20 tahun mendatang seiring dengan terbukanya peluang pengembangan industri agribisnis dapat terjadi perubahan negatif dengan beroperasinya industri-industri, bertambahnya mobil dan mesin-mesin bahan bakar fosil, dan semakin banyaknya akumulasi limbah-limbah yang tidak dikelola baik.
- (2) Sedangkan permasalahan yang terkait dengan pengelolaan sumberdaya udara adalah: belum tersedianya sumberdaya manusia dan kodifikasi pengetahuan dan teknologi untuk pengelolaan udara segar yang sehat; kurang jelasnya kewenangan dan tanggungjawab instansi pemerintah yang

mengelolanya; kurang tumbuhnya kesadaran komunal terkait dengan pengelolaan pelestarian udara segar yang sehat; kurang adanya perencanaan partisipatif yang memadai ke depan pengelolaan udara segar yang sehat secara lestari.

d). Proyeksi keberhasilan

- (1) Keberhasilan mempertahankan dan bahkan meningkatkan kondisi udara segar yang sehat secara alamiah akan ditentukan oleh beberapa faktor yang meliputi: ketersediaan sumberdaya manusia yang memiliki kompetensi dibidangnya; ketersediaan aturan hukum yang memadai yang mengatur pengelolaan kelestarian udara; keprofesionalan aparat pemerintah yang menangani pengelolaan kelestarian udara; efektivitas penggalangan partisipasi masyarakat (ulama, usahawan, aktivis LSM lingkungan, dan pelaku lingkungan, yakni mereka yang pekerjaan sehari-harinya dapat menimbulkan pencemaran lingkungan bila lalai atau tidak dilaksanakannya dengan baik); tersedianya sumber anggaran daerah, pemerintah propinsi dan pemerintah pusat untuk pengelolaan lingkungan, khusus utamanya sumber keuangan asli daerah (misalnya dipungut retribusi dari pelaku lingkungan seperti pemilik motor, mobil, mesin pabrik, cerobong-cerobong asap, perusahaan limbah dsb); tindakan hukum yang tegas dan pengenaan sanksi yang berat atas setiap pelanggar pencemaran udara.
- (2) Sedangkan tolok ukur keberhasilan adalah terjaganya pencemaran udara dibawah standar minimal pencemaran udara yang berlaku secara nasional dan internasional.

3). Output

Output yang dihasilkan dengan perencanaan jangka panjang dalam 20 tahun kedepan meliputi:

- a). Adanya buku panduan pemerintah yang memadai tentang pengelolaan sumberdaya udara secara profesional;
- b). Terwujudnya kelembagaan masyarakat mitra pemerintah dalam pengelolaan sumberdaya udara;
- c). Adanya peraturan daerah yang memadai yang mengatur pencegahan dan pengelolaan pencemaran udara;
- d). Terselenggaranya kegiatan preventif pencemaran udara yang efektif yang mungkin terjadi pada perusahaan industri maupun jasa, rumah tangga, dan bencana alam;
- e). Terpeliharanya udara segar yang sehat dengan tingkat pencemaran yang minimal.
- f). Adanya peningkatan signifikan program penghijauan yang memadai yang menyertai pengembangan kawasan pemukiman, perkantoran, perdagangan, dan industri serta penyediaan, penataan, dan penetapan kawasan paru-paru kota yang seimbang;

Pada tahun 2009, perekonomian Kabupaten PPU menunjukkan kinerja yang positif setiap tahunnya. Seluruh sektor kegiatan memberikan sumbangan positif terhadap pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Harga Berlaku dengan migas yaitu sebesar 0,04%. Tahun 2008, PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dengan migas mencapai 2,437 trilyun rupiah dan akhirnya pada tahun 2009 meningkat cukup pesat 2,438 trilyun rupiah. Produk Domestik Regional Bruto Atas Harga Berlaku tanpa migas yaitu sebesar 12,39%. Tahun 2008, PDRB Atas Dasar Harga Berlaku tanpa migas mencapai 1,425 trilyun rupiah dan akhirnya pada tahun 2009 meningkat cukup pesat 1,601 trilyun rupiah.

Sektor yang mempunyai kontribusi terbesar adalah sektor pertambangan dan penggalian dengan kontribusi sebesar 34,66%. Peringkat kedua diduduki sektor pertanian dengan kontribusi sebesar 18,97 % dan ketiga dari sektor industri sebesar 18,19%. Secara umum, pendukung terbesar struktur ekonomi Kabupaten PPU antara tahun 2000-2009 adalah sektor pertambangan dan penggalian dan penggalian.

3.4.2 Sektor Pertanian

1) Input : Kondisi Pertanian

- a). Sektor pertanian merupakan sektor yang unik dan mempunyai ciri khas tersendiri dalam sektor perekonomian. Pertanian dalam arti luas mencakup pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan mempunyai potensi yang cukup besar untuk dikembangkan sehingga pertanian merupakan modal pembangunan utama di Kabupaten Penajam Paser Utara. Secara umum, kontribusi sektor pertanian Kabupaten PPU dalam menyusun PDRB tidaklah sebesar sektor pertambangan dan penggalian yang pada tahun 2009 mencapai 845.231 juta rupiah. Selisih 589.662 juta rupiah dari sektor pertanian yang hanya 382.556 juta rupiah per 2009.
- b). Sektor pertanian pangan yang cukup potensial untuk dikembangkan terutama untuk komoditas padi dan jagung, karena terdapat di semua wilayah kecamatan, sehingga Kabupaten Penajam Paser Utara dapat diandalkan sebagai pemasok untuk skala lokal maupun regional.
- c). Berdasarkan data yang ada sektor ini mempunyai peranan besar dalam kegiatan ekonomi rakyat dan mempunyai kontribusi cukup besar dalam perekonomian daerah. Meskipun demikian, pengembangan sektor pertanian masih dirasakan belum optimal disebabkan masih banyaknya kendala seperti produktivitas dan

kualitas produk yang masih rendah, terbatasnya jaringan pemasaran dan besarnya lahan potensial yang kurang dimanfaatkan. Kurangnya penguasaan teknologi yang tepat guna bagi pertanian rakyat merupakan juga penyebab masih rendahnya daya saing komoditas pertanian daerah.

- d). Kecamatan Babulu dan Penajam sejak dulu terkenal sebagai sentra produksi padi di Kalimantan Timur. Kecamatan Babulu mempunyai andil terbesar produksi padi sawah yaitu yaitu 61,06 % dari total produksi Kabupaten. Kemudian Kecamatan Penajam mempunyai andil sebesar 21,50 %, sedangkan untuk produksi padi ladang, kecamatan Sepaku merupakan penyumbang terbesar yaitu 73,32 % kemudian Kecamatan Penajam 12,02 % dari total produksi padi ladang Kabupaten.
- e). Artinya, Kabupaten PPU mempunyai potensi cukup besar untuk tanaman pangan. Luas panen padi sawah pada tahun 2009 mencapai 11.686 ha. Luas ini mengalami penurunan sebesar 21,08% di bandingkan tahun 2008. Sedangkan untuk luas panen padi Ladang turun sebesar 34,75% dibanding tahun 2008.
- f). Kondisi tersebut berbanding lurus dengan turunnya luas panen padi sawah, nilai produksi padi sawah juga mengalami penurunan. Produksi padi sawah pada tahun 2009 mengalami penurunan sebesar 21,00 %, yaitu dari 76.301 ton pada tahun 2008 turun menjadi 60.276 ton pada tahun 2009, sedangkan produksi padi ladang juga turun dari 3.425 ton pada tahun 2008 menjadi 2.238 ton tahun 2009 atau turun sebesar 34,66 %.
- g). Sementara itu disamping padi, kabupaten PPU juga menghasilkan beberapa komoditas palawija seperti jagung, kedelai, kacang tanah dan ubi kayu; dengan luas panen pada tahun 2009 berturut-turut 341 ha jagung, 28 ha kedelai, 55 ha kacang tanah dan 194 ha ubi kayu; dengan produksi masing-masing 659 ton, 35 ton, 60 ton dan 2.760 ton.

2) Analisis Sumberdaya Pertanian

a). Proyeksi Peluang

- (1) Diperlukan adanya optimalisasi penggunaan lahan pertanian, mengingat penggunaan lahan pertanian yang selama ini belum dimaksimalkan karena 60 persen wilayah daratan masih berbentuk hutan belantara (statistik 2006). Sektor pertanian yang selama ini menjadi salah satu sektor unggulan Kabupaten Penajam Paser Utara terbukti dapat berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah bahkan dapat dikatakan bersaing dengan pemasukan dari sektor pertambangan dan penggalian dan penggalian yang pada tahun 2009 mencapai 845.231 juta rupiah atau selisih 382.556 juta rupiah dari sektor pertanian yang hanya 462.675 juta rupiah per 2009. Angka tersebut dapat terus meningkat dan bersaing hingga dapat disejajarkan bahkan melebihi pemasukan dari sektor Pertambangan dan penggalian. Hal ini cukup beralasan, mengingat luas lahan pertanian di 4 Kecamatan yang ada, yakni Kecamatan Penajam, Waru, Babulu dan Sepaku, Kecamatan Babulu dengan luas 399,45 untuk lahan pertaniannya adalah 355,71 Ha, Kecamatan Penajam dengan luas keseluruhan 1.207,37 Ha lahan pertaniannya 1.036,70, Kecamatan Waru dengan luas 553,88 Ha lahan pertaniannya dan Kecamatan Sepaku luas 1,172,36 Ha areal pertaniannya 1.012 Ha.
- (2) Pada sektor pertanian dimungkinkan adanya spesialisasi tanaman atau komoditas pada masing-masing kecamatan, seperti Kecamatan Babulu yang menghasilkan padi sawah hingga 61,06 % dari total produksi Kabupaten dan Kecamatan Penajam

sebesar 21,50 %. hal ini dibutuhkan untuk menjaga kualitas dan kuantitas hasil pertanian.

- (3) Dimungkinkan adanya diversifikasi dan ekstensifikasi pertanian terutama untuk komoditas palawija seperti seperti jagung, kedelai, kacang tanah dan ubi kayu. Komoditas ini kurang dioptimalkan, hal ini dapat dilihat dari luas panen pada 2009 yang hanya (berturut-turut) 341 ha jagung, 28 ha kedelai, 55 ha kacang tanah dan 194 ha ubi kayu; dengan produksi masing-masing 659 ton, 35 ton, 60 ton dan 2.760 ton mengingat Luas Lahan Pengembangan pertanian lahan basah 24.284,07 Ha, dan Luas Lahan Pengembangan pertanian lahan kering yang mencapai 34.024,87 Ha.

b). Proyeksi Ancaman

- (1) Faktor-faktor yang dewasa ini menjadi ancaman adalah merusak lingkungan seperti maraknya kerusakan hutan melalui pembalakan hutan secara liar yang ditujukan untuk mengalihkan fungsi hutan secara ilegal, penggunaan berlebihan dan penyalahgunaan insektisida, kerusakan lahan pertanian oleh petani yang tidak ramah lingkungan seperti membakar lahan pertanian yang bertujuan baik untuk membuka lahan maupun akan menanam kembali, yang dapat menimbulkan polusi udara.
- (2) Apabila optimalisasi lahan pertanian tidak segera dilakukan maka pendapatan pada sektor pertanian tidak akan mengalami peningkatan yg signifikan yang artinya tidak dapat berkontribusi positif dengan PAD. Namun, apabila melihat rasio perbandingan antara luas wilayah dengan peruntukan lahan pertanian yang sangat jauh mengindikasikan kabupaten PPU akan kekurangan SDM untuk melakukan optimalisasi lahan pertanian, sehingga hal ini juga perlu untuk dipertimbangkan.
- (3) Apabila tidak segera dilakukan spesialisasi tanaman atau komoditas pada masing-masing kecamatan akan menyebabkan

kapasitas atau volume produksi kabupaten PPU menjadi stagnan.

- (4) Terhambatnya diversifikasi dan ekstensifikasi pertanian akan menyebabkan kabupaten PPU kekurangan varian komoditas yang seharusnya berpeluang untuk diciptakan, mengingat besaran lahan yang diperuntukkan untuk pengembangan sektor pertanian masih sangat dimungkinkan.

c). Proyeksi Permasalahan

- (1) Dalam jangka menengah ataupun panjang, kegiatan perluasan lahan pertanian akan menimbulkan ancaman terhadap Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan kelestarian hutan, baik hutan lindung maupun hutan produksi, mengingat 60 persen daerah peruntukan lahan pertanian masih berbentuk hutan belantara.
- (2) Kebiasaan masyarakat atau para petani yang selama ini lebih fokus pada jenis tanaman pangan, seperti tanaman padi dapat mengakibatkan kebijakan ini tidak dapat berjalan karena dimungkinkan adanya kekhawatiran akan daya serap pasar, perbedaan biaya produksi yang mungkin terdapat selisih, kekhawatiran akan ketidakpahaman terhadap metode tanam dan perawatan selain padi, sehingga menyebabkan para petani menjadi konservatif terhadap jenis tanaman lain.
- (3) Kurangnya pemahaman dan faktor kebiasaan dari masyarakat pertanian di kabupaten PPU terhadap komoditas selain Padi dapat menghambat proses diversifikasi dan ekstensifikasi pertanian.

d). Proyeksi keberhasilan.

Berdasarkan kondisi sektor pertanian, dan peranan sektor pertanian dalam menunjang perekonomian Kabupaten Penajam Paser Utara di atas, maka ada beberapa proyeksi keberhasilan pembangunan sektor pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara:

- (1) Keberhasilan dalam optimalisasi penggunaan lahan tidur untuk aktifitas pertanian ditentukan oleh kerjasama tiga sektor utama

pembangunan dalam kerangka *good governance*, yaitu pemerintah, Swasta dan masyarakat/petani sebagai stakeholder primer. Keberhasilan mempertahankan dan bahkan meningkatkan sumberdaya pertanian akan ditentukan oleh beberapa faktor berikut : ketersediaan sumberdaya manusia yang memiliki kompetensi dibidangnya; ketersediaan aturan hukum yang memadai yang mengatur perusahaan dan pengelolaan lahan pertanian yang berbasis kelestarian lingkungan; keprofesionalan aparat pemerintah yang menangani perusahaan dan pengelolaan lahan pertanian yang berbasis kelestarian ekosistem lingkungan; efektivitas penggalangan partisipasi masyarakat (ulama, usahawan, aktivis LSM lingkungan, dan para petani) dalam perusahaan dan pengelolaan lahan pertanian yang berbasis kelestarian ekosistem lingkungan; terselenggaranya program intensifikasi, diversifikasi dan ekstensifikasi komoditas pertanian untuk meningkatkan nilai tambah dan kapasitas produksi melalui pengembangan kapasitas manajerial pelaku usaha atau petani dan strategi pemasaran yang efektif termasuk pemanfaatan teknologi tepat guna untuk menunjang peningkatan pendapatan masyarakat; tersedianya sumber dana masyarakat, anggaran daerah, pemerintah propinsi dan pemerintah pusat yang memadai untuk perusahaan dan pengelolaan lahan pertanian secara berkesinambungan; dan Tindakan hukum yang tegas dan pengenaan sanksi yang berat atas setiap pelanggaran, penelantaran dan perusakan lingkungan.

- (2) Sedangkan tolok ukur keberhasilan adalah berkembangnya pola perusahaan dan pengelolaan lahan pertanian yang ramah lingkungan dan meningkatnya produktivitas dan daya saing, serta menurunnya (baik secara) kuantitas maupun kualitas kegiatan eksploitasi yang merusak sumberdaya pertanian.

3) Output

Output yang dihasilkan dalam 20 tahun kedepan adalah sbb:

- a) Tersedianya buku panduan pemerintah yang memadai tentang perusahaan dan pengelolaan sumberdaya pertanian secara profesional;
- b) Ketersediaan aturan hukum yang memadai yang mengatur perusahaan dan pengelolaan sumberdaya pertanian yang berbasis pada kelestarian ekosistem lingkungan;
- c) Terselenggaranya kegiatan preventif perusakan dan pencemaran lingkungan yang menjadi penyangga kelestarian sumberdaya pertanian
- d) Meningkatnya jumlah Sumber Daya Manusia yang profesional dibidang pertanian.
- e) Terpeliharanya dan berkembangnya potensi sumberdaya dan ekosistem lingkungan dibidang pertanian.
- f) Meningkatnya nilai tambah dan kapasitas produksi lahan pertanian melalui intensifikasi, diversifikasi dan ekstensifikasi pertanian serta strategi peningkatan kapasitas manajerial secara terpadu dari hulu sampai hilir;
- g) Terbangunnya *chain supply* pada sektor pertanian yang tertata dengan rapi dari hilir hingga mudik melalui pembentukan Badan Usaha Milik Daerah yang khusus menangani sumberdaya perkebunan;
- h) Meningkatnya sumber dana masyarakat, anggaran daerah, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat yang memadai untuk perusahaan dan pengelolaan sumberdaya pertanian secara berkesinambungan.

3.4.3 Sektor Perikanan

1) Input : Kondisi Perikanan dan Kelautan

- a) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) memiliki luas laut seluas 272,24 km², sehingga potensi perikanan laut relatif cukup besar. Berdasarkan data tahun 2009, jumlah tangkapan ikan laut mencapai 4.758,6 ton dengan armada kapal penangkap ikan sejumlah 2.699 unit. Sedangkan untuk perikanan darat, pada 2009 terdapat luas tambak 2.999 Ha dengan produksi 4.136,2 ton dan kolam serta karamba mempunyai produksi masing-masing sebesar 221,4 ton dan 24,5 ton. Diantara empat kecamatan, Penajam dan Babulu merupakan dua kecamatan yang memiliki potensi perikanan laut, dan bahkan tambak.
- b) Produksi perikanan dibedakan menjadi dua, yaitu perikanan laut dan perikanan darat. Di Kabupaten Penajam Paser Utara, produksi perikanan laut pada tahun 2008 mengalami peningkatan sebesar 2,97% yaitu dari 4.621,5 ton. Pada tahun 2009 naik menjadi 4.758,6 ton. Dan untuk produksi perikanan darat mengalami penurunan sebesar 3,37% dibandingkan tahun 2008.
- c) Bila ditinjau setiap kecamatan, maka kecamatan Waru merupakan penyumbang terbesar produksi perikanan laut, yaitu sebesar 33,45% dari total produksi Kabupaten, kemudian kecamatan Penajam mempunyai andil sebesar 29,69% terkecil kecamatan Sepaku hanya 11,76%.

2). Analisis Sumberdaya Perikanan Dan Kelautan

a). Proyeksi Peluang

- (1) Keadaan pesisir dan laut disepanjang pantai timur dan selatan Kabupaten Penajam Paser Utara merupakan potensi yang masih dapat dikembangkan tahun 2010 mendatang. Dalam 20 tahun kedepan dalam rencana pembangunan jangka panjang perlu dikembangkan budidaya perikanan laut, rumput laut,

tambak yang merupakan komoditi yang di masa depan memiliki prospek untuk komoditi ekspor memenuhi kebutuhan pasar internasional maupun komoditi pasar domestik;

- (2) Potensi yang belum dikembangkan dan dapat dikembangkan dalam 20 tahun ke depan adalah budidaya ikan laut karamba, rumput laut, dan kolam ikan air tawar. Demikian pula pengolahan pasca panen ikan masih sangat potensial untuk dikembangkan lanjut untuk pengelolaan mutu produk maupun pengolahan lanjut yang memiliki nilai tambah untuk peningkatan pendapatan;
- (3) Faktor manusia selaku penguasa dan penentu dalam pemanfaatan sumberdaya laut dan pesisir, yakni masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara sendiri baik dari kalangan nelayan, ulama, dan umara' (pemerintah) perlu dikembangkan adanya pembaharuan kesadaran terus-menerus untuk meluaskan wawasan, pengertian dan kemampuan kebersamaan dalam kerjasama pengelolaan sumberdaya laut dan perikanan tidak sebatas memelihara kelestarian lingkungan hidup akan tetapi menempatkan program peningkatan pembudayaan potensi laut dan perikanan secara produktif untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dengan mengembangkan potensi laut dan perikanan yang lebih kompetitif dalam 20 tahun pembangunan ke depan.

b). Proyeksi Ancaman

- (1) Faktor-faktor yang dewasa ini menjadi ancaman adalah perusakan ekosistem laut dan perikanan berupa maraknya perusakan hutan lindung mangrove, penggunaan berlebihan dan penyalahgunaan insektisida, perusakan terumbu karang oleh pola penangkapan yang tidak ramah lingkungan seperti jaring tarik, penggunaan bahan peledak dan bahan beracun;

- (2) Masih rendahnya pengetahuan dan penguasaan teknologi budidaya maupun pengolahan hasil yang berbasis kelestarian lingkungan bagi masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara akan menjadi ancaman bagi kelestarian lingkungan laut dan perikanan di masa mendatang. Demikian pula belum adanya kajian potensi kelautan dan perikanan yang memberikan informasi yang akurat tentang kapasitas potensi sumberdaya kelautan dan perikanan serta daya dukung optimalnya, dan belum adanya aturan hukum yang mengatur pengelolaan sumberdaya kelautan berbasis kapasitas dan daya dukung akan menjadi ancaman arah pengelolaan yang dapat membiarkan eksploitasi yang melampaui daya dukung potensi sehingga dapat mengancam kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan dalam 20 tahun ke depan seiring dengan pertumbuhan penduduk. Kebiasaan buruk pengelolaan limbah keluarga, limbah perikanan dan di masa mendatang adalah pengelolaan limbah industri merupakan potensi sumber pencemaran sungai dan laut yang dapat berubah menjadi ancaman nyata dimasa mendatang;
- (3) Faktor lain yang perlu dipertimbangkan adalah kemungkinan adanya sumber-sumber pencemaran yang datang dari daerah-daerah tetangga yang dapat berakibat fatal bagi kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan yang memerlukan penanganan bersama.

c). Proyeksi Permasalahan

- (1) Penduduk di daerah pesisir dan laut yang merupakan konsentrasi penduduk miskin, rendahnya tingkat pendidikan formal, dan rendahnya penguasaan pengetahuan dan teknologi yang terkait dengan pengusahaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berbasis kelestarian lingkungan hidup menjadi masalah sentral dalam peningkatan produktifitas dan

peningkatan pendapatan masyarakatnya. Disamping itu, keterbatasan kapasitas manajemen yang profesional untuk memberikan fasilitasi masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan masih menjadi kendala yang menyertai sehingga peningkatan kesejahteraan masyarakat penyangga kelautan dan perikanan belum dapat membebaskan dari jeratan kemiskinannya;

- (2) Dalam 20 tahun ke depan yang diwarnai dengan era globalisasi dan persaingan yang semakin meningkat diperlukan perencanaan strategis dalam 20 tahun mendatang. Kata kunci dalam pengembangan usaha perikanan dan kelautan adalah kemampuan menemukan posisi pengembangan usaha yang dapat menghasilkan produk-produk sebagai komoditi yang memiliki daya saing kuat (*positioning*) di masa depan, dalam 20 tahun mendatang dibidang kelautan dan perikanan. Untuk itu, diperlukan riset pengembangan dalam kerangka pembuatan *business plan* yang memandu pengembangan usaha dalam 20 tahun ke depan. Adanya prioritas pengembangan produk-produk unggulan berdaya saing tinggi ke depan yang mendapat prioritas pengembangan 20 tahun ke depan sehingga dapat memberikan nilai tambah yang tinggi. Karena itu, warga masyarakat yang selama ini menggeluti bidang usaha perikanan dan kelautan yang produk-produknya tidak kompetitif ke depan di dorong untuk mengalihkan usaha ke produk-produk yang kompetitif;
- (3) Sedangkan permasalahan yang terkait dengan pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut adalah: masih banyaknya potensi sumberdaya perikanan dan kelautan yang belum dieksploitasi dan yang masih dilerantarkan; rendahnya pengetahuan dan penguasaan teknologi masyarakat dalam pengusahaan dan pengolahan sumberdaya perikanan dan kelautan sehingga

produktivitasnya masih tergolong rendah; belum tersedianya sumberdaya manusia dan kodifikasi pengetahuan dan teknologi yang memadai untuk pengelolaan sumberdaya perikanan dan kelautan yang lestari; belum adanya *business plan* yang memadai berdasarkan riset yang andal untuk komoditi-komoditi strategis ke depan yang memandu pengembangan perusahaan sumberdaya kelautan dan perikanan; kurang profesionalnya instansi pemerintah dalam perumusan kebijakan dan pengurusan manajemen sumberdaya kelautan dan perikanan sehingga langkah-langkah penyelesaian masalah kelautan dan perikanan yang berbasis kelestarian lingkungan belum sepenuhnya memenuhi persyaratan *problem solving* yang baik, proaktif, sistematis, terukur dan terkendali; Kurang berkembangnya inisiatif dan partisipasi masyarakat yang melembaga dalam penyelenggaraan kegiatan pengembangan cara-cara usaha yang produktif dan ramah lingkungan; kurang berkembangnya penggalan sumberdana masyarakat dan sumber pendapatan asli daerah untuk membangun sistem anggaran yang kokoh dalam pembiayaan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan.

d). Proyeksi keberhasilan.

- (1) Keberhasilan mempertahankan dan bahkan meningkatkan sumberdaya laut dan pesisir akan ditentukan oleh beberapa faktor berikut: ketersediaan sumberdaya manusia yang memiliki kompetensi dibidangnya; ketersediaan aturan hukum yang memadai yang mengatur perusahaan dan pengelolaan sumberdaya perikanan dan kelautan yang berbasis kelestarian lingkungan; keprofesionalan aparat pemerintah yang menangani perusahaan dan pengelolaan sumberdaya perikanan dan kelautan yang berbasis kelestarian ekosistem lingkungan; efektivitas penggalan partisipasi masyarakat

(ulama, usahawan, aktivis LSM lingkungan, dan pelaku usaha perikanan dan kelautan) dalam pengusahaan dan pengelolaan sumberdaya perikanan dan kelautan yang berbasis kelestarian ekosistem lingkungan; terselenggaranya program intensifikasi dan ekstensifikasi usaha untuk meningkatkan nilai tambah dan kapasitas produksi melalui pengembangan kapasitas manajerial pelaku usaha dan strategi pemasaran yang efektif termasuk pemanfaatan teknologi tepat guna untuk menunjang peningkatan pendapatan masyarakat; tersedianya sumber dana masyarakat, anggaran daerah, pemerintah propinsi dan pemerintah pusat yang memadai untuk pengusahaan dan pengelolaan sumberdaya perikanan dan kelautan secara berkesinambungan; dan Tindakan hukum yang tegas dan pengenaan sanksi yang berat atas setiap pelanggar penelantaran dan perusakan ekosistem sumberdaya perikanan dan kelautan;

- (2) Jembatan Penajam – Balikpapan merupakan faktor kritis terkait dengan pengembangan kawasan perindustrian, perdagangan, dan pemukiman yang mengundang migrasi nelayan andon yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan nelayan lokal karena terbukanya potensi pasar baru dan migrasi penduduk dari daerah lain yang dapat merambah ke sektor perikanan dan kelautan. Karena itu, kegiatan proaktif mempersiapkan diri baik sektor pemerintah, usahawan maupun lembaga-lembaga swadaya masyarakat untuk membangun kesadaran bersama menanggulangi ancaman yang akan timbul merupakan faktor kunci dalam keberhasilan mempertahankan dan usaha meningkatkan pengusahaan dan pengelolaan sumberdaya perikanan secara produktif dalam kurun waktu hingga 20 tahun mendatang;

- (3) Sedangkan tolok ukur keberhasilan adalah berkembangnya pola pengusaha dan pengelolaan sumberdaya perikanan dan kelautan yang ramah lingkungan dan meningkatnya produktivitas dan daya saing serta menurunnya baik secara kuantitas maupun kualitas kegiatan eksploitasi yang merusak sumberdaya perikanan dan kelautan.

3). Output

Output yang dihasilkan dalam 20 tahun kedepan adalah sbb:

- a) Tersedianya buku panduan pemerintah yang memadai tentang pengusaha dan pengelolaan sumberdaya perikanan dan kelautan secara profesional;
- b) Meningkatnya sumberdaya manusia yang memiliki kompetensi profesional dibidangnya;
- c) Ketersediaan aturan hukum yang memadai yang mengatur pengusaha dan pengelolaan sumberdaya perikanan dan kelautan yang berbasis kelestarian ekosistem lingkungan;
- d) Meningkatnya keprofesionalan aparat pemerintah yang menangani pengusaha dan pengelolaan sumberdaya perikanan dan kelautan yang berbasis kelestarian ekosistem lingkungan;
- e) Meningkatnya efektivitas penggalangan partisipasi masyarakat (ulama, usahawan, aktivis LSM lingkungan, dan pelaku usaha perikanan dan kelautan) dalam pengusaha dan pengelolaan sumberdaya perikanan dan kelautan yang berbasis kelestarian ekosistem lingkungan;
- f) Meningkatnya sumber dana masyarakat, anggaran daerah, pemerintah propinsi dan pemerintah pusat yang memadai untuk pengusaha dan pengelolaan sumberdaya perikanan dan kelautan secara berkesinambungan;
- g) Terselenggaranya tindakan hukum yang tegas dan peneraan sanksi yang berat atas setiap pelanggar penelantaran dan perusakan sumberdaya perikanan dan kelautan;

- h) Terwujudnya kelembagaan masyarakat mitra pemerintah dalam pengembangan kebijakan, manajemen perusahaan dan pengelolaan sumberdaya perikanan dan kelautan sebagai upaya meningkatkan partisipasi masyarakat;
- i) Adanya peraturan daerah yang memadai untuk mengatur perlindungan dan pencegahan setiap kegiatan pencemaran dan perusakan potensi sumberdaya perikanan dan kelautan;
- j) Terselenggaranya kegiatan preventif perusakan dan pencemaran lingkungan yang menjadi penyangga kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan;
- k) Terpeliharanya dan berkembangnya potensi sumberdaya dan ekosistem lingkungan kelautan dan perikanan.
- l) Meningkatnya nilai tambah dan kapasitas produksi unit-unit usaha pengelolaan sumberdaya perikanan dan laut melalui strategi peningkatan kapasitas manajerial secara terpadu dari hulu sampai hilir.

3.4.4 Sektor Perkebunan

1). Input : Kondisi Perkebunan

- a) Sektor perkebunan memiliki potensi besar di masa mendatang karena masih luasnya potensi lahan di Kabupaten PPU. Berdasarkan data Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab.PPU tahun 2009, komoditas perkebunan yang dominan di kabupaten PPU berturut-turut adalah kelapa sawit, kelapa, karet, lada, kopi dan kakao.
- b) Tanaman perkebunan terluas di Kabupaten Penajam Paser Utara adalah kelapa sawit dengan luas total 37.542,60 Ha sedangkan tanaman menghasilkan seluas 15.854,30 Ha atau 62,46%. Produksi kelapa sawit pada tahun 2009 mengalami kenaikan sebesar 8,44% dibanding tahun 2008 lalu. Jika dilihat

produktivitasnya maka produktivitas kelapa sawit pada tahun 2009 adalah 13,28 ton /ha.

- c) Luas perkebunan karet menempati urutan kedua dengan luas 10.242 Ha, tanaman menghasilkan seluas 4.478,50 Ha atau 78,53% dan terjadi penurunan produksi sebesar 25,18%, selain dua komoditas perkebunan tersebut diatas, juga terdapat tanaman kelapa, lada, kopi dan kakao dan rata-rata mengalami peningkatan produksi.

2). Analisis Sumberdaya Perkebunan

a). Proyeksi Peluang

- (1) Kondisi alam Kabupaten Penajam Paser Utara dibidang perkebunan merupakan potensi yang masih dapat dikembangkan tahun 2010 mendatang. Dalam 20 tahun kedepan dalam rencana pembangunan jangka panjang perlu dikembangkan komoditi kelapa sawit, kelapa, karet, lada, kopi dan kakao. yang di masa depan memiliki prospek untuk komoditi ekspor memenuhi kebutuhan pasar internasional maupun komoditi pasar domestik;
- (2) Potensi yang belum dikembangkan dan dapat dikembangkan dalam 20 tahun ke depan adalah komoditas karet lada, kopi dan kakao. Meskipun, tanaman karet menempati urutan kedua setelah kelapa sawit dengan luas lahan perkebunan yang mencapai 10.242 Ha namun memiliki perbedaan luas lahan tanaman yang sangat mencolok dengan kelapa sawit yang mencapai 37.542,60 Ha. Demikian pula pengolahan pasca panen komoditas perkebunan yang masih sangat potensial untuk dikembangkan serta pengelolaan mutu komoditas perkebunan maupun pengolahan lanjutan yang memiliki nilai tambah untuk peningkatan pendapatan;
- (3) Faktor manusia selaku penguasa dan penentu dalam pemanfaatan lahan perkebunan, yakni masyarakat Kabupaten

Penajam Paser Utara sendiri baik dari kalangan petani, ulama, dan umara' (pemerintah) perlu dikembangkan adanya pembaharuan kesadaran terus-menerus untuk meluaskan wawasan, pengertian dan kemampuan kebersamaan dalam kerjasama pengelolaan lahan perkebunan tidak sebatas pada memelihara kelestarian lingkungan hidup akan tetapi menempatkan program intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi sektor perkebunan secara berkesinambungan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dengan mengembangkan potensi disektor perkebunan yang lebih kompetitif dalam 20 tahun pembangunan ke depan;

b). Proyeksi Ancaman

- (1) Faktor-faktor yang dewasa ini menjadi ancaman adalah perusakan lingkungan seperti maraknya perusakan hutan melalui pembalakan hutan secara liar yang ditujukan untuk mengalihkan fungsi hutan secara ilegal, penggunaan berlebihan dan penyalahgunaan insektisida, perusakan lahan perkebunan oleh petani yang tidak ramah lingkungan seperti membakar lahan perkebunan yang bertujuan baik untuk membuka lahan maupun guna menanam kembali, yang dapat menimbulkan polusi udara;
- (2) Masih rendahnya pengetahuan dan penguasaan teknologi di bidang tanaman perkebunan maupun pengolahan hasil yang berbasis kelestarian lingkungan bagi masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara akan menjadi ancaman bagi kelestarian lingkungan alam di masa mendatang. Demikian pula belum adanya kajian potensi di sektor perkebunan yang memberikan informasi yang akurat tentang kapasitas potensi sumberdaya perkebunan serta daya dukung optimalnya, dan belum adanya aturan hukum yang mengatur pengelolaan sumberdaya perkebunan berbasis kapasitas dan daya dukung akan menjadi

ancaman arah pengelolaan yang dapat membiarkan eksploitasi yang melampaui daya dukung potensi sehingga dapat mengancam kelestarian sumberdaya alam dalam 20 tahun ke depan seiring dengan penambahan penduduk;

c). Proyeksi Permasalahan

- (1) Penduduk di kawasan pedesaan dan pinggiran hutan yang merupakan kawasan pengembangan disektor perkebunan merupakan konsentrasi penduduk miskin, rendahnya tingkat pendidikan formal, dan rendahnya penguasaan pengetahuan dan teknologi yang terkait dengan pengusahaan dan pengelolaan lahan perkebunan yang berbasis pada kelestarian lingkungan hidup menjadi masalah sentral dalam peningkatan produktifitas dan peningkatan pendapatan masyarakatnya. Disamping itu, keterbatasan kapasitas manajemen yang profesional untuk memberikan fasilitas pada masyarakat dalam pengelolaan lahan perkebunan masih menjadi kendala yang menyertai sehingga peningkatan kesejahteraan masyarakat penyangga kelautan dan perikanan belum dapat membebaskan dari jeratan kemiskinannya;
- (2) Dalam 20 tahun ke depan yang diwarnai dengan era globalisasi dan persaingan yang semakin meningkat diperlukan perencanaan strategis dalam 20 tahun mendatang. Kata kunci dalam pengembangan usaha sektor perkebunan adalah kemampuan menemukan posisi pengembangan usaha yang dapat menghasilkan produk-produk sebagai komoditi yang memiliki daya saing kuat (positioning) di masa depan, dalam 20 tahun mendatang dibidang perkebunan. Untuk itu, diperlukan riset pengembangan dalam kerangka pembuatan business plan yang memandu pengembangan usaha dalam 20 tahun ke depan. Adanya prioritas pengembangan produk-produk unggulan berdaya saing tinggi ke depan yang mendapat

prioritas pengembangan 20 tahun ke depan sehingga dapat memberikan nilai tambah yang tinggi. Karena itu, warga masyarakat yang selama ini menggeluti bidang usaha di sektor perkebunan yang produk-produknya tidak kompetitif ke depan di dorong untuk mengalihkan usaha ke produk-produk yang kompetitif;

- (3) Sedangkan permasalahan yang terkait dengan pengelolaan hasil perkebunan adalah: masih banyaknya potensi di sektor perkebunan yang belum diusahakan untuk ditanami dan yang masih dilerantarkan; rendahnya pengetahuan dan penguasaan teknologi masyarakat dalam pengusahaan dan pengolahan lahan perkebunan sehingga produktivitasnya masih tergolong rendah; belum tersedianya sumberdaya manusia dan kodifikasi pengetahuan dan teknologi yang memadai untuk pengelolaan lahan pertanian yang lestari; belum adanya business plan yang memadai berdasarkan riset yang andal untuk komoditi-komoditi strategis ke depan yang memandu pengembangan pengusahaan sektor perkebunan; kurang profesionalnya instansi pemerintah dalam perumusan kebijakan dan pengurusan manajemen sektor perkebunan sehingga langkah-langkah penyelesaian masalah di sektor perkebunan yang berbasis kelestarian lingkungan belum sepenuhnya memenuhi persyaratan problem solving yang baik, proaktif, sistematis, terukur dan terkendali; Kurang berkembangnya inisiatif dan partisipasi masyarakat yang melembaga dalam penyelenggaraan kegiatan pengembangan cara-cara usaha yang produktif dan ramah lingkungan; kurang berkembangnya penggalian sumberdana masyarakat dan sumber pendapatan asli daerah untuk membangun sistem anggaran yang kokoh dalam pembiayaan pengelolaan sumberdaya sektor perkebunan.

d). Proyeksi keberhasilan.

- (1) Keberhasilan mempertahankan dan bahkan meningkatkan hasil perkebunan akan ditentukan oleh beberapa faktor berikut: ketersediaan sumberdaya manusia yang memiliki kompetensi dibidangnya; ketersediaan aturan hukum yang memadai yang mengatur perusahaan dan pengelolaan lahan perkebunan yang berbasis kelestarian lingkungan; keprofesionalan aparat pemerintah yang menangani perusahaan dan pengelolaan sumberdaya perkebunan yang berbasis kelestarian ekosistem lingkungan; efektivitas penggalangan partisipasi masyarakat (ulama, usahawan, aktivis LSM lingkungan, dan pelaku usaha perkebunan) dalam perusahaan dan pengelolaan sumberdaya perkebunan yang berbasis pada kelestarian ekosistem lingkungan; terselenggaranya program intensifikasi dan ekstensifikasi perkebunan untuk meningkatkan nilai tambah dan kapasitas produksi melalui pengembangan kapasitas manajerial pelaku usaha dan strategi pemasaran yang efektif termasuk pemanfaatan teknologi tepat guna untuk menunjang peningkatan pendapatan masyarakat; tersedianya sumber dana masyarakat, anggaran daerah, pemerintah propinsi dan pemerintah pusat yang memadai untuk perusahaan dan pengelolaan sumberdaya perkebunan secara berkesinambungan; dan Tindakan hukum yang tegas dan pengenaan sanksi yang berat atas setiap pelanggaran penelantaran dan perusakan ekosistem lahan perkebunan;
- (2) Jembatan Penajam – Balikpapan merupakan faktor kritis terkait dengan pengembangan kawasan perindustrian, perdagangan, dan pemukiman yang mengundang migrasi para petani perkebunan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan petani lokal karena terbukanya potensi pasar baru dan

migrasi penduduk dari daerah lain yang dapat merambah ke sektor perkebunan. Akan tetapi, hal ini juga dapat berdampak positif pada usaha eksentifikasi perkebunan mengingat luasnya lahan perkebunan yang akan dikembangkan. Karena itu, kegiatan proaktif dalam mempersiapkan diri baik pemerintah, petani maupun lembaga-lembaga swadaya masyarakat untuk membangun kesadaran bersama menanggulangi ancaman yang akan timbul merupakan faktor kunci dalam keberhasilan mempertahankan dan usaha meningkatkan pengusahaan dan pengelolaan sumberdaya perkebunan secara produktif dalam kurun waktu hingga 20 tahun mendatang;

- (3) Sedangkan tolok ukur keberhasilan adalah berkembangnya pola pengusahaan dan pengelolaan (ekstensifikasi, diversifikasi, dan eksentifikasi) sumberdaya perkebunan yang ramah lingkungan dan meningkatnya produktivitas dan daya saing serta menurunnya baik secara kuantitas maupun kualitas kegiatan eksploitasi yang merusak lingkungan alam.

3). Output

Output yang dihasilkan dalam 20 tahun kedepan adalah sbb:

- a) Tersedianya buku panduan pemerintah yang memadai tentang pengusahaan dan pengelolaan sumberdaya perkebunan secara profesional;
- b) Meningkatnya sumberdaya manusia yang memiliki kompetensi profesional dibidangnya;
- c) Meningkatnya hasil produksi komoditas perkebunan, yang dikelola secara profesional;
- d) Terbentuknya desa binaan dalam rangka spesialisasi, ekstensifikasi, dan diversifikasi komoditas perkebunan yang dilakukan secara kewilayahan;
- e) Terciptanya sinergitas antara pemerintah kabupaten Penajam Paser Utara, Swasta, petani, maupun LSM lingkungan;

- f) Terbangunnya chain suply dalam sektor perkebunan yang tertata dengan rapi dari hilir hingga mudik melalui pembentukan Badan Usaha Milik Daerah yang khusus menangani sumberdaya perkebunan;
- g) Ketersediaan aturan hukum yang memadai yang mengatur perusahaan dan pengelolaan sumberdaya perkebunan yang berbasis pada kelestarian ekosistem lingkungan;
- h) Meningkatnya sumber dana masyarakat, alokasi anggaran daerah, baik dari pemerintah propinsi dan pemerintah pusat yang memadai untuk perusahaan dan pengelolaan sumberdaya perkebunan secara berkesinambungan.

3.4.5 Sektor Peternakan

1) Input : Kondisi Peternakan

- a) Sektor peternakan relatif mulai berkembang di Kabupaten Penajam Paser Utara namun masih menghadapi terbatasnya penyediaan sarana produksi. Berdasarkan data tahun 2009, jumlah ternak yang terbesar adalah ternak unggas yang terdiri dari ayam buras 130.158 ekor, ayam ras 68.400 ekor, ayam pedaging 23.800 ekor dan itik 2.265 ekor. Sedangkan ternak besar antara lain sapi 8.817 ekor, kambing 3.750 ekor;
- b) Selain hewan ternak produksi telur unggas di Kabupaten Penajam Paser Utara pada umumnya juga mengalami peningkatan, namun telur ayam ras pada tahun 2009 turun sebesar 36,06%, telur ayam buras naik 279,39% dan produksi telur itik juga mengalami penurunan sebesar 88,13% dibandingkan tahun 2008.

2). Analisis Sumberdaya Peternakan

a). Proyeksi Peluang

- (1) Kondisi alam Kabupaten Penajam Paser Utara merupakan potensi yang dapat menunjang perkembangan sektor peternakan baik ternak besar, ternak kecil, hingga ternak unggas tahun 2010 mendatang. Dalam 20 tahun kedepan dalam rencana pembangunan jangka panjang perlu dikembangkan sub sektor peternakan besar seperti kerbau, sapi. Sub sektor peternakan kecil seperti rusa, kambing, dan sub sektor ternak unggas seperti ayam ras, ayam buras dan itik yang di masa depan memiliki prospek untuk komoditi ekspor memenuhi kebutuhan pasar internasional maupun komoditi pasar domestik;
- (2) Potensi yang belum dikembangkan dan dapat dikembangkan dalam 20 tahun ke depan adalah peternakan rusa dan kerbau. Meskipun, peternakan rusa masuk dalam kategori peternakan kecil, namun kabupaten Penajam Paser Utara memiliki tempat penangkaran khusus, yakni di desa Api-api kecamatan waru. Demikian pula pengolahan chain suply komoditas peternakan yang masih sangat potensial untuk dikembangkan serta pengelolaan mutu komoditas pepeternakan maupun pengolahan lanjutan yang memiliki nilai tambah untuk peningkatan pendapatan;

b). Proyeksi Ancaman

- (1) Faktor-faktor yang dewasa ini menjadi ancaman adalah perusakan lingkungan seperti maraknya perusakan hutan melalui pembalakan hutan secara liar yang ditujukan untuk mengalihkan fungsi hutan secara ilegal, penggunaan berlebihan dan penyalahgunaan insektisida yang dapat merusak kandungan dalam tanaman maupun rerumputan yg merupakan pakan dari ternak itu sendiri, perusakan lahan perkebunan oleh petani yang tidak ramah lingkungan seperti membakar lahan

perkebunan yang bertujuan baik untuk membuka lahan maupun guna menanam kembali, yang dapat menimbulkan polusi udara dan mengurangi potensi pakan ternak secara alamiah;

- (2) Masih rendahnya pengetahuan dan penguasaan teknologi di bidang peternakan maupun pengolahan hasil dan limbah yang berbasis kelestarian lingkungan bagi masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara akan menjadi ancaman bagi kelestarian lingkungan alam dan perkembangan dari sektor peternakan di masa mendatang. Demikian pula belum adanya kajian potensi di sektor peternakan yang memberikan informasi yang akurat tentang kapasitas potensi sumberdaya sektor peternakan serta daya dukung optimalnya, dan belum adanya aturan hukum yang mengatur pengelolaan sumberdaya kelautan berbasis kapasitas dan daya dukung akan menjadi ancaman arah pengelolaan yang dapat membiarkan eksploitasi yang melampaui daya dukung potensi sehingga dapat mengancam kelestarian sumberdaya alam dalam 20 tahun ke depan seiring dengan pertumbuhan penduduk.

c). Proyeksi Permasalahan

- (1) Penduduk di kawasan pedesaan dan pinggiran hutan yang merupakan kawasan pengembangan disektor peternakan (meskipun saat ini sebaran peternakan berada di seluruh kecamatan bahkan terdapat di ibu kota kabupaten) merupakan konsentrasi penduduk miskin, rendahnya tingkat pendidikan formal, dan rendahnya penguasaan pengetahuan dan teknologi yang terkait dengan pengusahaan dan pengelolaan ternak hewan yang berbasis pada kelestarian lingkungan hidup menjadi masalah sentral dalam peningkatan produktifitas dan peningkatan pendapatan masyarakatnya. Disamping itu, keterbatasan kapasitas manajemen yang profesional untuk memberikan fasilitas pada masyarakat dalam pengelolaan

hewan ternak masih menjadi kendala (karena selama ini ternak hanya dijadikan pekerjaan sambilan dari masyarakat maupun petani) yang menyertai sehingga peningkatan kesejahteraan masyarakat penyangga ketersediaan hewan ternak di kabupaten Penajam Paser utara belum dapat membebaskan dari jeratan kemiskinannya;

- (2) Dalam 20 tahun ke depan yang diwarnai dengan era globalisasi dan persaingan yang semakin meningkat diperlukan perencanaan strategis dalam 20 tahun mendatang. Kata kunci dalam pengembangan usaha sektor peternakan adalah kemampuan menemukan posisi pengembangan usaha yang dapat menghasilkan produk-produk sebagai komoditi yang memiliki daya saing kuat (positioning) di masa depan, dalam 20 tahun mendatang dibidang peternakan. Untuk itu, diperlukan riset pengembangan dalam kerangka pembuatan business plan yang memandu pengembangan usaha dalam 20 tahun ke depan agar sektor peternakan dikelola secara serius dan profesional tidak lagi menjadi pekerjaan sampingan masyarakat maupun petani. Adanya prioritas pengembangan produk-produk unggulan berdaya saing tinggi ke depan yang mendapat prioritas pengembangan 20 tahun ke depan sehingga dapat memberikan nilai tambah yang tinggi. Karena itu, warga masyarakat maupun petani yang selama ini menjadikan ternak hewan sebagai pekerjaan sambilan yang produk-produknya tidak kompetitif ke depan di dorong untuk mengalihkan usaha ke produk-produk yang kompetitif.

d). Proyeksi keberhasilan.

- (1) Keberhasilan mempertahankan dan bahkan meningkatkan hasil peternakan akan ditentukan oleh beberapa faktor berikut: ketersediaan sumberdaya manusia yang memiliki kompetensi dibidangnya; ketersediaan aturan hukum yang memadai yang

mengatur pengusahaan dan pengelolaan sub sektor peternakan yang berbasis kelestarian lingkungan; keprofesionalan aparat pemerintah yang menangani pengusahaan dan pengelolaan sumberdaya peternakan yang berbasis kelestarian ekosistem lingkungan; efektivitas penggalangan partisipasi masyarakat (ulama, usahawan, aktivis LSM lingkungan, dan pelaku usaha di sector peternakan) dalam pengusahaan dan pengelolaan sumberdaya peternakan yang berbasis pada kelestarian ekosistem lingkungan; terselenggaranya program intensifikasi dan ekstensifikasi peternakan untuk meningkatkan nilai tambah dan kapasitas produksi melalui pengembangan kapasitas manajerial pelaku usaha dan strategi pemasaran yang efektif termasuk pemanfaatan teknologi tepat guna untuk menunjang peningkatan pendapatan masyarakat; tersedianya sumber dana masyarakat, anggaran daerah, pemerintah propinsi dan pemerintah pusat yang memadai untuk pengusahaan dan pengelolaan sumberdaya peternakan secara berkesinambungan; dan Tindakan hukum yang tegas dan pengenaan sanksi yang berat atas setiap pelanggaran penelantaran dan perusakan ekosistem;

- (2) Jembatan Penajam – Balikpapan merupakan faktor kritis terkait dengan pengembangan kawasan perindustrian, perdagangan, dan pemukiman yang mengundang migrasi para peternak yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan peternak lokal karena terbukanya potensi pasar baru dan migrasi penduduk dari daerah lain yang dapat merambah ke sektor peternakan. Akan tetapi, hal ini juga dapat berdampak positif pada usaha eksentifikasi sektor peternakan mengingat masih minimnya wilayah yang mengembangkan sektor peternakan. Karena itu, kegiatan proaktif dalam mempersiapkan diri baik pemerintah, petani maupun lembaga-lembaga swadaya masyarakat untuk

membangun kesadaran bersama menanggulangi ancaman yang akan timbul merupakan faktor kunci dalam keberhasilan mempertahankan dan usaha meningkatkan pengusahaan dan pengelolaan sub sektor peternakan secara produktif dalam kurun waktu hingga 20 tahun mendatang;

- (3) Sedangkan tolok ukur keberhasilan adalah berkembangnya pola pengusahaan dan pengelolaan (ekstensifikasi, diversifikasi, dan eksentifikasi) sub sektor peternakan yang ramah lingkungan dan meningkatnya produktivitas dan daya saing serta menurunnya baik secara kuantitas maupun kualitas kegiatan eksploitasi yang merusak lingkungan alam dalam tahap pengadaan pakan ternak kedepan.

3). Output

Output yang dihasilkan dalam 20 tahun kedepan adalah sbb:

- a). Tersedianya buku panduan pemerintah yang memadai tentang pengusahaan dan pengelolaan sumberdaya sektor peternakan secara profesional;
- b). Meningkatnya sumberdaya manusia yang memiliki kompetensi profesional dibidangnya;
- c). Meningkatnya hasil produksi sektor peternakan, yang dikelola secara profesional;
- d). Terbentuknya desa binaan dalam rangka spesialisasi, ekstensifikasi, dan diversifikasi sektor peternakan yang dilakukan secara kewilayahan;
- e). Terciptanya sinergitas antara pemerintah kabupaten Penajam Paser Utara, Swasta, peternak, maupun LSM pemerhati hewan;
- f). Terbangunnya chain suply dalam sektor peternakan yang tertata dengan rapi dari hilir hingga mudik melalui pembentukan Badan Usaha Milik Daerah yang khusus menangani sumberdaya peternakan;

- g). Ketersediaan aturan hukum yang memadai yang mengatur perusahaan dan pengelolaan sumberdaya sektor peternakan yang berbasis pada kelestarian ekosistem lingkungan;
- h). Meningkatnya sumber dana masyarakat, alokasi anggaran daerah, baik dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat yang memadai untuk perusahaan dan pengelolaan sumberdaya perkebunan secara berkesinambungan.

3.4.6 Sektor Pertambangan dan Penggalan

1) Input : Kondisi Pertambangan dan penggalan

- a). Meskipun sektor pertambangan dan penggalan menyumbang PDRB paling tinggi kedua setelah sektor industri dan perdagangan, pada tahun 2009 sektor ini mengalami pertumbuhan yang relatif kecil, yaitu sebesar 1,22%. Pertumbuhan negatif ini disebabkan oleh produksi minyak mentah yang berada di Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun 2009 mengalami kenaikan dibandingkan produksi tahun 2006. Padahal Sektor Pertambangan dan penggalan dan Penggalan merupakan Sektor yang paling dominan dalam pembentukan PDRB Kabupaten Penajam Paser Utara. Ini berakibat pada rendahnya pertumbuhan PDRB jika dihitung dengan migas. Bahkan pada tahun 2009, pertumbuhan PDRB dengan migas tumbuh sebesar 3,39%. Jika dibandingkan dengan penghitungan PDRB tanpa migas, yang tumbuh sebesar 4,88%, terdapat selisih angka pertumbuhan yang signifikan.
- b). Sejak dimasukkannya produksi minyak mentah ke dalam penghitungan PDRB Kabupaten Penajam Paser Utara, Sektor Pertambangan dan penggalan merupakan PDRB Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2000 – 2009 yang paling dominan di kabupaten ini. Pada tahun 2009 sektor ini memiliki kontribusi sebesar 34,66%. Dibandingkan tahun 2008, kontribusi Sektor Pertambangan dan penggalan sedikit mengalami penurunan.

Kontribusi Sektor Pertambangan dan penggalian dan Penggalian tahun 2009 sebesar 41,85%.

2). Analisis Sumberdaya Pertambangan dan Penggalian

a). Proyeksi Peluang

- (1) Kondisi alam Kabupaten Penajam Paser Utara dibidang pertambangan dan penggalian dan penggalian merupakan potensi yang masih dapat dikembangkan tahun 2010 mendatang. Dalam 20 tahun kedepan dalam rencana pembangunan jangka panjang perlu dikembangkan komoditi migas. yang di masa depan memiliki prospek untuk komoditi ekspor memenuhi kebutuhan pasar internasional maupun komoditi pasar domestik;
- (2) Potensi yang masih dapat dikembangkan dan dioptimalkan penggalian potensinya dalam 20 tahun ke depan adalah komoditas migas. Meskipun, sektor ini mengalami pertumbuhan yg relatif kecil yaitu 1,22% pada tahun 2009. Sehingga perlu dikembangkan cara penggalian dan pengolahan komoditas migas yang masih sangat potensial untuk dikembangkan serta pengelolaan mutu komoditas migas maupun pengolahan lanjutan yang memiliki nilai tambah untuk peningkatan pendapatan;
- (3) Faktor manusia selaku penguasa dan penentu dalam eksploitasi sektor minyak dan gas, yakni masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara sendiri baik dari kalangan penambang, ulama, dan umara' (pemerintah) perlu dikembangkan adanya pembaharuan kesadaran terus-menerus untuk meluaskan wawasan, pengertian dan kemampuan kebersamaan dalam kerjasama pengelolaan kawasan pertambangan dan penggalian tidak sebatas pada memelihara kelestarian lingkungan hidup akan tetapi menempatkan program intensifikasi, ekstensifikasi dan

diversifikasi Sumber daya Alam secara berkesinambungan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dengan mengembangkan potensi disektor migas yang lebih kompetitif dalam 20 tahun pembangunan ke depan;

b). Proyeksi Ancaman

- (1) Faktor-faktor yang dewasa ini menjadi ancaman adalah perusakan lingkungan seperti maraknya perusakan hutan melalui pembalakan hutan secara liar yang ditujukan untuk mengalihkan fungsi hutan secara ilegal menjadi areal pertambangan dan penggalian, penggunaan berlebihan dan penyalahgunaan bahan peledak untuk penggalian bahan tambang yang dapat merusak unsur tanah maupun ekosistem alam lainnya.;
- (2) Masih rendahnya pengetahuan dan penguasaan teknologi di bidang pertambangan dan penggalian maupun pengolahan hasil dan limbah yang berbasis kelestarian lingkungan bagi masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara akan menjadi ancaman bagi kelestarian lingkungan alam dan perkembangan dari sektor pertambangan dan penggalian di masa mendatang. Demikian pula belum adanya kajian potensi di sektor pertambangan dan penggalian yang memberikan informasi yang akurat tentang kapasitas potensi sumberdaya sektor pertambangan dan penggalian serta daya dukung optimalnya, dan belum adanya aturan hukum yang mengatur pengelolaan sumberdaya pertambangan dan penggalian berbasis kapasitas dan daya dukung akan menjadi ancaman arah pengelolaan yang dapat membiarkan eksploitasi yang melampaui daya dukung potensi sehingga dapat mengancam kelestarian

sumberdaya alam dalam 20 tahun ke depan seiring dengan penambahan penduduk.

c). Proyeksi Permasalahan

Berdasarkan kondisi pertambangan dan penggalan Kabupaten Penajam Paser Utara di atas, maka ada beberapa proyeksi permasalahan di sektor pertambangan dan penggalan Kabupaten Penajam Paser Utara:

- (1) Permasalahan utama di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara adalah pada upaya-upaya peningkatan temuan-temuan baru atau intensifikasi dan ekstensifikasi sumberdaya alam yang meliputi sektor pertambangan dan penggalan perlu dilakukan secara berkesinambungan. Kurang optimalnya upaya-upaya intensifikasi ekstensifikasi sektor pertambangan dan penggalan akan menjadi penghambat pertumbuhan sektor ini di Kabupaten Penajam Paser Utara.
- (2) Permasalahan selanjutnya adalah strategi kebijakan dalam sektor pertambangan dan penggalan dalam peningkatan pendapatan masyarakat, seyogyanya ditujukan pada hasil dan dampak langsung yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Strategi kebijakan yang tidak langsung memberi hasil dan dampak ke masyarakat seyogyanya menjadi prioritas lanjutan.
- (3) Terbatasnya dana pengembangan sektor pertambangan dan penggalan tersebut juga akan menjadi permasalahan tersendiri. Oleh karena itu perlu dipikirkan bentuk-bentuk kerjasama kemitraan antara pemerintah daerah dengan pusat, sektor privat, masyarakat serta LSM lingkungan hidup dalam menanggulangi permasalahan ini, dan perlu strategi alokasi dan distribusi dana anggaran secara tepat dan hasil guna.

(4) Permasalahan lainnya adalah perusakan dan pencemaran lingkungan oleh sektor pertambangan dan penggalian. Perusakan dan pencemaran lingkungan seperti aktifitas pertambangan batu bara yang menciptakan lubang besar yang digenangi air, menyebabkan abrasi dan pendangkalan yang memicu banjir akibat akumulasi penggundulan hutan serta terjadinya penurunan kualitas air sungai, rawa, air dan danau mata air akibat pencemaran air tambang yang tidak dikelola dan diolah sesuai mutu air limbah yang disyaratkan.

d). Proyeksi keberhasilan.

Berdasarkan kondisi sektor pertambangan dan penggalian sebagai usaha peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat dan kemampuan keuangan Kabupaten Penajam Paser Utara di atas, maka ada beberapa proyeksi keberhasilan pembangunan disektor pertambangan dan penggalian Kabupaten Penajam Paser Utara:

- (1) Keberhasilan pembangunan sektor pertambangan dan penggalian sangat tergantung kerjasama keempat sektor meliputi pemerintah, masyarakat, swasta, serta LSM yang bergerak dalam bidang lingkungan hidup dalam kerangka kerja '*good governance*'. Masing-masing sektor merupakan mitra antara satu dengan lainnya dimana akuntabilitas dan tanggungjawab terhadap arah dan permasalahan pembangunan ditanggung secara bersama. Dialog dan kerjasama antara ketiga sektor tersebut akan menunjang keberhasilan program pembangunan sektor pertambangan dan penggalian di Kabupaten Penajam Paser Utara.
- (2) Transparansi antar ketiga sektor diatas dalam mengkomunikasikan indikator-indikator pembangunan sektor pertambangan dan penggalian di Kabupaten Penajam Paser Utara akan menambah tingkat kepercayaan ('trust') antara

ketiga sektor tersebut. Masyarakat akan memahami problem yang dihadapi pemerintah dalam upaya pembangunan sektor pertambangan dan penggalian dan begitu pula sebaliknya pemerintah akan memahami problem-problem riil di masyarakat, mulai dari dampak lingkungan akibat dari penggalian yang dilakukan pada sektor pertambangan termasuk juga hal-hal yang menghambat keberhasilan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Masyarakat dan pemerintah memahami kesulitan aktor-aktor ekonomi dalam mengembangkan usahanya diwilayah ini dan begitu pula sebaliknya. Sehingga keberhasilan ataupun kegagalan strategi dan program pembangunan merupakan aksi bersama, sehingga resistensi penolakan yang biasa diwujudkan dengan aksi-aksi unjuk rasa dan aksi ketidakpuasan lainnya bisa dieliminir, sehingga kondusifitas penambangan dapat diciptakan.

- (3) Keberhasilan pembangunan sektor ini bukan hanya keberhasilan dalam meningkatkan kontribusi sektor pertambangan dan penggalian dalam PAD ataupun kemampuan daya serap sektor ini terhadap para pencari kerja tetapi juga keberhasilan dalam mendewasakan sektor pemerintah, masyarakat dan kalangan bisnis dalam kerangka 'good governance'.
- (4) Keberhasilan pembangunan sektor pertambangan dan penggalian di Kabupaten Penajam Paser Utara dapat diindikasikan dengan terdapatnya alih teknologi modern kepada masyarakat penambang Kabupaten Penajam Paser Utara.
- (5) Keberhasilan di Kabupaten Penajam Paser Utara juga diindikasikan dengan kemampuan untuk meminimalisasikan dampak kerusakan lingkungan yang dapat diakibatkan eksploitasi pada sektor ini.

- (6) Terciptanya kesejahteraan dan keadilan sosial yang lebih merata bagi seluruh lapisan masyarakat di kota maupun di pedesaan, sesuai dengan harkat dan martabat serta nilai-nilai kemanusiaan yang beradab, meningkatkan kemampuan, kesempatan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah, serta pengembangan dan peningkatan kinerja organisasi-organisasi sosial, panti-panti sosial, karang taruna, maupun lembaga-lembaga sosial serta meningkatkan profesionalisme para pekerja sosial.

3). Output

Output yang dihasilkan dalam 20 tahun kedepan adalah sbb:

- a) Adanya buku panduan pemerintah yang memadai tentang pengelolaan sumberdaya sektor pertambangan dan penggalian secara profesional;
- b) Terwujudnya kelembagaan masyarakat mitra pemerintah dalam pengelolaan sumberdaya sektor pertambangan dan penggalian;
- c) Adanya peraturan daerah yang memadai yang mengatur pengolahan sektor pertambangan dan penggalian dan pencegahan pencemaran yang dapat ditimbulkan dari eksploitasi sektor ini;
- d) Terselenggaranya kegiatan preventif terhadap pencemaran lingkungan yang efektif yang mungkin terjadi pada saat eksploitasi dilakukan oleh perusahaan pertambangan dan galian serta kemungkinan akan dan bencana alam;
- e) Terpeliharanya sumber daya sektor pertambangan dan dengan tingkat pencemaran yang minimal.
- f) Adanya peningkatan signifikan program penghijauan yang memadai yang menyertai pengembangan kawasan pemukiman, perkantoran, perdagangan, dan industri serta penyediaan,

penataan, dan penetapan kawasan paru-paru kota yang seimbang;

3.4.7 Sektor Pariwisata

1) Input : Kondisi Pariwisata

- a) Sektor pariwisata di Kabupaten PPU dapat dikatakan belum berkembang. Obyek-obyek wisata juga masih sangat terbatas dan belum tergali. Salah satu obyek wisata yang potensial untuk dikembangkan adalah kawasan Gusung seluas 50 ha yang menyimpan potensi wisata pantai dan bahari, dimana telah ditemukan adanya keindahan taman laut di dalamnya. Disamping itu di Kabupaten PPU juga terdapat penangkaran rusa dan goa-goa yang dapat dikembangkan menjadi obyek wisata.
- b) Komitmen pemerintah dalam membuka peluang investasi baik dalam jangka pendek, menengah dan panjang

2) Analisis Sumberdaya Pariwisata

a) Proyeksi Peluang

- (1) Permintaan pasar internasional, nasional dan regional terhadap produk pertanian dan industry yang tinggi;
- (2) Penerapan perdagangan bebas regional & global. Posisi strategis Sidoarjo terhadap pasar regional

b) Proyeksi Ancaman

- (1) Minimnya daya dukung anggaran pembangunan terhadap kemajuan sektor ekonomi dan sumberdaya alam;
- (2) Minimnya investasi baik PMA maupun PMDN.
- (3) Perlunya pemantapan stabilitas politik dan keamanan;
- (4) Masih perlunya upaya pengurangan kesenjangan antar wilayah khususnya di daerah perbatasan, perkotaan dan perdesaan

c) Proyeksi Permasalahan

- (1) Masih rendahnya daya beli masyarakat terhadap hasil produk dari sektor pertanian, perikanan dan perkebunan lokal;
- (2) Terbatasnya jaringan pemasaran produk;
- (3) Masih banyaknya lahan produktif yang belum dimanfaatkan secara maksimal;
- (4) Minim penguasaan teknologi;

d) Proyeksi keberhasilan.

Berdasarkan kondisi sektor pariwisata Kabupaten Penajam Paser Utara di atas, maka ada beberapa proyeksi keberhasilan pembangunan sektor pariwisata Kabupaten Penajam Paser Utara:

- (1) Keberhasilan pembangunan sektor pariwisata sangat tergantung kerjasama ketiga sektor meliputi pemerintah, masyarakat dan swasta dalam kerangka kerja '*good governance*'. Masing-masing sektor merupakan mitra antara satu dengan lainnya dimana akuntabilitas dan tanggungjawab terhadap arah dan permasalahan pembangunan ditanggung secara bersama. Dialog dan kerjasama antara ketiga sektor tersebut akan menunjang keberhasilan program pembangunan SDM di Kabupaten Penajam Paser Utara.
- (2) Transparansi antar ketiga sektor diatas dalam mengkomunikasikan indikator-indikator pembangunan sektor pariwisata di Kabupaten Penajam Paser Utara akan menambah tingkat kepercayaan ('*trust*') antara ketiga sektor tersebut. Masyarakat akan memahami problem yang dihadapi pemerintah dalam upaya pembangunan sektor pariwisata dan begitu pula sebaliknya pemerintah

akan memahami problem-problem riil di masyarakat, termasuk hal-hal yang menghambat keberhasilan peningkatan pertumbuhan ekonomi sebagai efek domino dari keberhasilan pembangunan di sektor pariwisata. Masyarakat dan pemerintah memahami kesulitan aktor-aktor ekonomi dalam mengembangkan usahanya di wilayah ini dan begitu pula sebaliknya. Sehingga keberhasilan ataupun kegagalan strategi dan program pembangunan merupakan aksi bersama, sehingga resistensi penolakan yang bisa diwujudkan dengan aksi-aksi unjuk rasa dan aksi ketidakpuasan lainnya bisa dieliminir.

- (3) Keberhasilan pembangunan sektor ini bukan hanya keberhasilan dalam meningkatkan kontribusi sektor pariwisata dalam PAD ataupun kemampuan daya serap sektor ini terhadap para pencari kerja tetapi juga keberhasilan dalam mendewasakan sektor pemerintah, masyarakat dan kalangan bisnis dalam kerangka 'good governance'.
- (4) Keberhasilan pembangunan sektor pariwisata di Kabupaten Penajam Paser Utara dapat diindikasikan dengan meningkatnya tujuan-tujuan wisata yang berstandar modern dan internasional di Kabupaten Penajam Paser Utara.
- (5) Keberhasilan di Kabupaten Penajam Paser Utara juga diindikasikan dengan kemampuan untuk meminimalisasikan dampak infiltrasi budaya asing yang negative dari berkembangnya sektor pariwisata yg dimungkinkan dapat linier dengan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan asing.

(6) Terciptanya kesejahteraan dan keadilan sosial yang lebih merata bagi seluruh lapisan masyarakat di kota maupun di pedesaan, sesuai dengan harkat dan martabat serta nilai-nilai kemanusiaan yang beradab, meningkatkan kemampuan, kesempatan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah, serta pengembangan dan peningkatan kinerja organisasi-organisasi sosial, panti-panti sosial, karang taruna, maupun lembaga-lembaga sosial.

3). Output

Output yang dihasilkan dalam 20 tahun kedepan adalah sbb:

- a) Strategi dan program kebijakan sektor pariwisata akan menunjukkan arah yang baik apabila indikator dalam indeks pembangunan menuju kearah perbaikan. Indikator-indikator yang dimaksud adalah termasuk diantaranya indikator jumlah atau varian tujuan wisata, tingkat kunjungan wisatawan baik domestik maupun mancanegara, berkontribusi positif terhadap penyerapan angkatan kerja, bertambahnya lembaga pendidikan sektor pariwisata, dan kemampuan membeli masyarakat Kab Penajam paser Utara.
- b) Disamping beberapa aspek tersebut diatas, perlu juga diperhatikan output-output lainnya yang merupakan indikator-indikator penunjang bagi peningkatan pembangunan sektor pariwisata, seperti output yang berbentuk keamanan dan kenyamanan berusaha, berwisata, serta terbebas dari berbagai pungutan liar merupakan situasi yang mendukung output pertumbuhan ekonomi.
- c) Output jaminan status kepegawaian, berkarier dan kecukupan standar hidup merupakan daya tarik bagi para tenaga profesional untuk bekerja di sektor ini.

- d) Output kebijakan Kabupaten Penajam Paser Utara berupa pendekatan formal dan informal untuk meningkatkan kunjungan wisata di Kab Penajam Paser Utara.
- e) Terpeliharanya budaya dan kearifan lokal masyarakat Kab Penajam Paser Utara ditengah besarnya jumlah kunjungan wisatawan baik domestik maupun mancanegara yang rentan terhadap akulturasi dan infiltrasi budaya. .
- f) Output kebijakan Kabupaten Penajam Paser Utara berupa pendidikan formal dan informal di masyarakat untuk menanggulangi dampak negatif dari infiltrasi budaya asing.

3.4.8 Sektor Industri dan Perdagangan

1) Input : Kondisi Industri dan Perdagangan

- a) Sektor industri dan sektor perdagangan mempunyai peranan terbesar dalam PDRB, yaitu masing-masing sebesar 18,19% dan 15,65% tetapi peranan sektor keuangan masih rendah yaitu sebesar 2,80%, dimana ada 2 (dua) bank pemerintah dan 4 (empat) bank swasta nasional. Hal ini menunjukkan masih rendahnya pengembangan dunia usaha di Kabupaten Penajam Paser Utara.
- b) Pengusaha kecil mendominasi kegiatan usaha di kabupaten PPU, yang menyerap sekitar 65% tenaga kerja. Jumlah pasar juga masih terbatas, yakni hanya terdapat 5 pasar lokal dan 5 pasar tradisional.
- c) Di sektor perdagangan terdapat 292 unit usaha yang terdiri atas perdagangan kecil dan menengah, dimana setiap unit usaha menyerap sekitar 6 tenaga kerja. Sementara industri kecil-menengah berjumlah 45 unit usaha yang masing-masing unit usaha menyerap sekitar 2 sampai 3 tenaga kerja. Perusahaan sedang/besar terdapat 16 unit usaha, dengan rata-rata penyerapan tenaga kerja sekitar 150 tenaga kerja tiap unit usaha.

- d) Kabupaten Penajam Paser Utara juga mempunyai 1 Induk Koperasi dengan 1 Koperasi Primer, 7 Koperasi Unit Desa (KUD) dan 60 Koperasi Usaha. Dari 70 Koperasi Usaha, sekitar 35 unit (58%) tergolong aktif dan 24 unit tergolong tidak aktif.

2) Analisis Sumberdaya Industri dan Perdagangan

a). Proyeksi Peluang

- (1) Kondisi sosioekonomi Kabupaten Penajam Paser Utara dibidang industri dan perdagangan merupakan potensi yang masih dapat dikembangkan tahun 2010 mendatang. Dalam 20 tahun kedepan dalam rencana pembangunan jangka panjang perlu pengembangan sektor Industri kecil dan UMKMK. yang di masa depan memiliki prospek untuk memenuhi kebutuhan pasar internasional maupun komoditi pasar domestik;
- (2) Potensi yang masih dapat dikembangkan dan dioptimalkan adalah sektor perbankan dan koperasi dalam rangka mendukung pertumbuhan sektor industri dan perdagangan, mengingat saat ini hanya terdapat satu buah bank pemerintah dan dua buah bank swasta nasional.
- (3) Faktor manusia selaku penguasa dan penentu dalam eksploitasi sektor industri dan perdagangan, yakni masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara sendiri baik dari kalangan pengusaha, ulama, dan umara' (pemerintah) perlu dikembangkan adanya pembaharuan kesadaran terus-menerus untuk meluaskan wawasan, pengertian dan kemampuan kebersamaan dalam kerjasama pengelolaan sektor industri dan perdagangan tidak sebatas pada memelihara upaya peningkatan nilai investasi semata akan tetapi menempatkan program intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi sektor industri dan perdagangan secara berkesinambungan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dengan mengembangkan potensi sektor UMKM dan

koperasi yang lebih kompetitif dalam 20 tahun pembangunan ke depan;

b). Proyeksi Ancaman

- (1) Faktor-faktor yang dewasa ini menjadi ancaman adalah pencemaran lingkungan oleh sektor industri dan maraknya perdagangan pasar gelap. Pencemaran lingkungan seperti maraknya perusakan hutan melalui pembalakan hutan secara liar yang ditujukan untuk mengalihkan fungsi hutan secara ilegal menjadi areal kawasan industri baru, pembuangan limbah industri secara sembarangan, yang dapat merusak unsur tanah maupun ekosistem alam lainnya.;
- (2) Masih rendahnya pengetahuan dan penguasaan teknologi di bidang industri dan perdagangan maupun pengolahan hasil dan limbah industri yang berbasis kelestarian lingkungan bagi masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara akan menjadi ancaman bagi kelestarian lingkungan dan perkembangan dari sektor industri dan perdagangan di masa mendatang. Demikian pula belum adanya kajian potensi di sektor industri dan perdagangan yang memberikan informasi yang akurat tentang kapasitas potensi sumberdaya sektor industri dan perdagangan serta daya dukung optimalnya, dan belum adanya aturan hukum yang mengatur pengelolaan sumberdaya sektor industri dan perdagangan berbasis kapasitas dan daya dukung akan menjadi ancaman arah pengelolaan yang dapat membiarkan eksploitasi yang melampaui daya dukung potensi sehingga dapat mengancam kelestarian sumberdaya alam dalam 20 tahun ke depan seiring dengan penambahan penduduk.

c). Proyeksi Permasalahan

- (1) Masih rendahnya daya beli masyarakat dan pasar regional terhadap hasil produk dari sektor industri dan perdagangan,

mengingat 65% sektor industri yang ada di Kabupaten Penajam Paser Utara adalah industri kecil;

- (2) Terbatasnya jaringan pemasaran produk, yang dibuktikan dengan minimnya jumlah pasar, baik tradisional maupun modern;
- (3) Terbatasnya jumlah sarana perbankan atau lembaga keuangan, sehingga turut mempengaruhi distribusi modal di Kabupaten Penajam Paser Utara;
- (4) Minim penguasaan teknologi;

d). Proyeksi keberhasilan.

Berdasarkan kondisi sektor industri dan perdagangan Kabupaten Penajam Paser Utara di atas, maka ada beberapa proyeksi keberhasilan pembangunan sektor industri dan perdagangan Kabupaten Penajam Paser Utara:

- (1) Keberhasilan pembangunan sektor industri dan perdagangan sangat tergantung kerjasama ketiga sektor meliputi pemerintah, masyarakat dan swasta dalam kerangka kerja *'good governance'*. Masing-masing sektor merupakan mitra antara satu dengan lainnya dimana akuntabilitas dan tanggungjawab terhadap arah dan permasalahan pembangunan ditanggung secara bersama. Dialog dan kerjasama antara ketiga sektor tersebut akan menunjang keberhasilan program pembangunan Industri dan perdagangan di Kabupaten Penajam Paser Utara.
- (2) Transparansi antar ketiga sektor diatas dalam mengkomunikasikan indikator-indikator pembangunan sektor industri dan perdagangan di Kabupaten Penajam Paser Utara akan menambah tingkat kepercayaan (*'trust'*) antara ketiga sektor tersebut. Masyarakat akan memahami problem yang dihadapi pemerintah dalam upaya pembangunan sektor industri dan perdagangan dan begitu pula sebaliknya pemerintah akan

memahami problem-problem riil di masyarakat, termasuk hal-hal yang menghambat keberhasilan peningkatan pertumbuhan ekonomi sebagai efek domino dari keberhasilan pembangunan di sektor sektor industri dan perdagangan. Masyarakat dan pemerintah memahami kesulitan aktor-aktor ekonomi dalam mengembangkan usahanya di wilayah ini dan begitu pula sebaliknya. Sehingga keberhasilan ataupun kegagalan strategi dan program pembangunan merupakan aksi bersama, sehingga resistensi penolakan yang bisa diwujudkan dengan aksi-aksi unjuk rasa dan aksi ketidakpuasan lainnya bisa dieliminir.

- (3) Keberhasilan pembangunan sektor ini bukan hanya keberhasilan dalam meningkatkan kontribusi sektor industri dan perdagangan dalam PAD ataupun kemampuan daya serap sektor ini terhadap para pencari kerja tetapi juga keberhasilan dalam mendewasakan sektor pemerintah, masyarakat dan kalangan bisnis dalam kerangka 'good governance'.
- (4) Keberhasilan pembangunan sektor industri dan perdagangan di Kabupaten Penajam Paser Utara dapat diindikasikan dengan meningkatnya tujuan-tujuan jumlah industri dan bertambahnya populasi pedagang, baik pedagang besar, kecil hingga pengecer yang dapat terlihat dari bertambahnya jumlah pasar, baik pasar modern maupun pasar tradisional di Kabupaten Penajam Paser Utara.
- (5) Keberhasilan di Kabupaten Penajam Paser Utara juga diindikasikan dengan kemampuan untuk meminimalisasikan dampak infiltrasi capital atau modal asing yang dapat menghambat perkembangan pengusaha-pengusaha lokal sehingga dapat linier dengan peningkatan jumlah pengusaha lokal yang kuat.
- (6) Terciptanya kesejahteraan dan keadilan sosial yang lebih merata bagi seluruh lapisan masyarakat di kota maupun di

pedesaan, sesuai dengan harkat dan martabat serta nilai-nilai kemanusiaan yang beradab, meningkatkan kemampuan, kesempatan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah, serta pengembangan dan peningkatan kinerja sektor industri kecil, menengah atau UMKM dan koperasi

3). Output

Output yang dihasilkan dalam 20 tahun kedepan adalah sbb:

Pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya sektor industri dan perdagangan telah memberikan sumbangan nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara dengan indikator sebagai berikut:

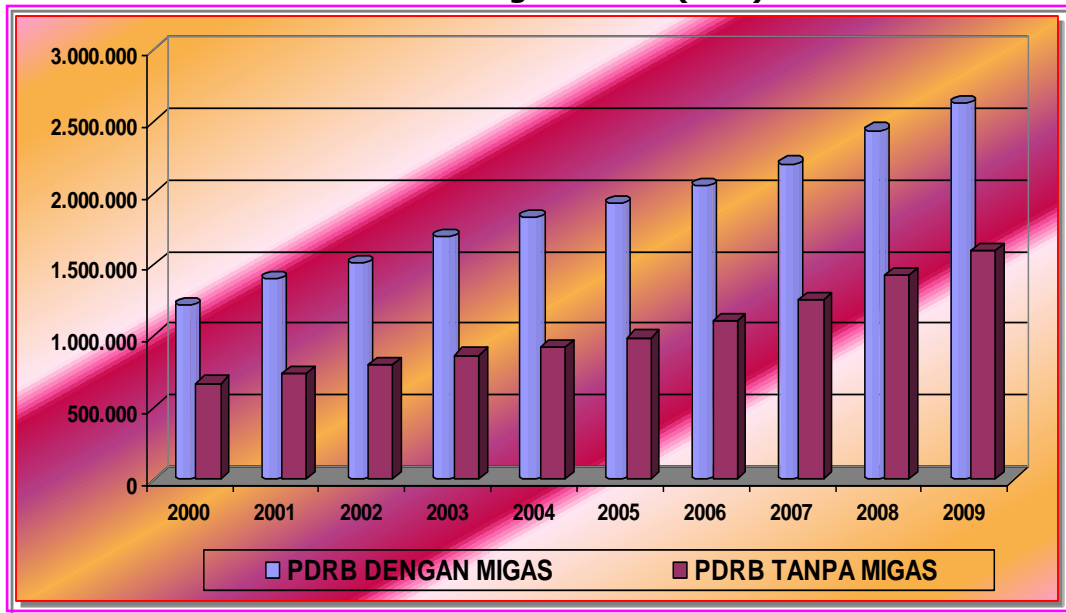
- a) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan migas atas dasar berlaku pada tahun 2007 sebesar Rp. 2,205,356.78 juta meningkat menjadi Rp. 2,438,296.03 Juta pada tahun 2008, dan diperkirakan akan meningkat menjadi Rp. 2.729.341 juta pada tahun 2010.

TABEL 3.1 PDRB Penajam Paser Utara Atas Dasar Harga Berlaku

No	Sektor	Tahun				
		2005	2006	2007	2008 r)	2009 *)
1	Pertanian	261,242.10	306,827.12	363,702.80	429,642	462,675
2	Pertambangan dan penggalian dan Penggalian	946,617.06	945,577.55	953,365.43	1,020,136	845,231
3	Industri Pengolahan	281,616.95	313,536.71	357,773.25	385,576	443,664
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	3,337.09	3,909.76	4,646.73	5,479	6,232
5	Bangunan	62,933.30	67,226.45	77,818.00	81,926	87,754
6	Perdagangan	247,569.15	266,395.20	281,999.21	324,442	381,654
7	Angkutan dan Komunikasi	24,617.51	26,622.28	28,841.41	31,329	34,000
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	44,046.40	46,932.07	52,935.45	60,603	60,603.19
9	Jasa-jasa	59,648.61	72,418.27	84,274.49	98,558	109,036
Produk Domestik Regional Bruto		1,931,628.16	2,049,445.41	2,205,356.78	2,437,691	2,438,576

- b) Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2008 yang ditunjukkan dengan laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) 2000 sebesar 4,88 persen. Pada tahun 2009 menurun menjadi 3,39 persen.
- c) Pendapatan perkapita Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2008 sebesar Rp. 18,43 juta. Sedangkan PDRB perkapita tahun 2009 sebesar Rp. 18,11 Juta
- d) Sektor yang mempunyai kontribusi terbesar adalah sector Pertambangan dan penggalian dan Penggalian dengan kontribusi sebesar 34,66 %. Peringkat kedua diduduki sektor Pertanian dengan kontribusi sebesar 18,97 % dan ketiga dari sector Industri sebesar 18,19 %.

GAMBAR 3.1 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Juta) tahun 2000-2009

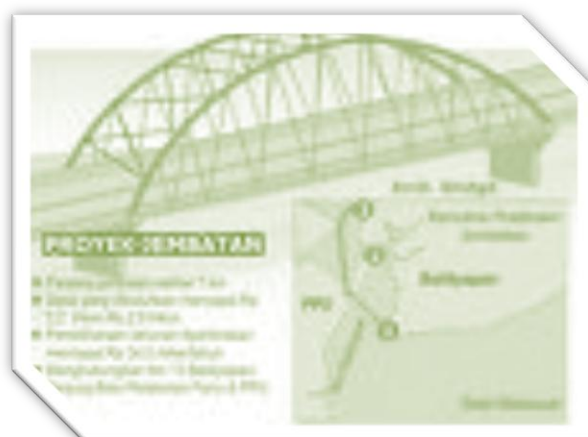


- e) Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun 2005 menduduki peringkat ke-6. Hal ini menunjukkan kinerja pembangunan daerah yang relatif tinggi terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan dan peningkatan pendapatan.

Pembangunan Kabupaten Penajam Paser Utara yang telah dilaksanakan selama ini telah menunjukkan kemajuan di berbagai bidang kehidupan masyarakat. Di samping kemajuan yang telah dicapai, masih banyak permasalahan yang belum sepenuhnya terpecahkan, dan masih banyak tantangan pembangunan Kabupaten Penajam Paser Utara yang perlu diatasi dalam 20 tahun ke depan.

BAB IV

VISI DAN MISI DAERAH



BAB IV

VISI DAN MISI DAERAH

Dalam RPJPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005 – 2025, Kabupaten Penajam Paser Utara diarahkan menjadi wilayah pengembangan pertanian agribisnis berbasis perkebunan dan perikanan dan peternakan, agropolitan; pengembangan agropolitan transportasi darat dan terminal laut yang dapat meningkatkan aksesibilitas dengan wilayah Kalimantan Selatan, Balikpapan dan Melak; pengembangan perdagangan dan jasa di perkotaan yang dapat menjadi penyangga Kota Balikpapan dan daerah sekitarnya, serta pengembangan wisata bahari.

Oleh karena itu, guna menghadapi tantangan dalam 20 tahun mendatang serta dengan memperhitungkan modal dasar yang dimiliki oleh masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara dan amanat pembangunan yang tercantum dalam Rencana Jangka Panjang Nasional 2005-2025, maka ditetapkanlah visi dan misi pembangunan Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2005-2025 sebagai berikut:

4.1. Visi Pembangunan Daerah

Berdasarkan kondisi masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara saat ini, tantangan yang dihadapi dalam 20 tahun mendatang serta dengan memperhitungkan modal dasar yang dimiliki oleh masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara dan amanat pembangunan yang tercantum dalam Rencana Jangka Panjang Nasional 2005-2025, maka Visi Pembangunan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2005-2025 adalah: **Terwujudnya Kabupaten Penajam Paser Utara yang Berakhlak Baik, Mandiri, Sehat dan Sejahtera Berbasis Pada Ekonomi Kerakyatan.**

Potensi yang ada di Penajam Paser Utara adalah potensi pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan. Potensi tersebut dapat dikelola

dalam dikelola secara agribisnis dan agroindustri. Agribisnis merupakan sebuah sistem yang lengkap dan merupakan suatu klaster industri yang terdiri dari 4 (empat) subsistem, yaitu: (1) subsistem agribisnis hulu yakni industri sarana produksi (industri benih, pupuk dan pestisida, serta industri alsintan; (2) Subsistem budidaya menghasilkan komoditas pertanian primer; (3) Subsistem agribisnis hilir yakni industri pengolahan baik menghasilkan produk antara maupun menghasilkan produk akhir; (4) Subsistem pemasaran, yaitu kegiatan distribusi dari sentra produksi ke sentra konsumsi; dan (5) Subsistem jasa penunjang yaitu dukungan sarana dan prasarana serta lingkungan yang kondusif bagi pengembangan agribisnis.

Berdasar potensi yang ada di Penajam Paser Utara subsistem agribisnis budidaya sangat layak untuk di capai pada saat ini. Untuk meningkatkan produksi perlu ditingkatkan luas lahan (ekstensifikasi) khususnya bidang pertanian, menumbuhkan kawasan-kawasan nelayan di pantai-pantai atau di pinggir-pinggir sungai dengan membangun Pangkalan Pendaratan Ikan. Subsistem yang lain dibutuhkan pengembangan seperti subsistem pemasaran dan pembangunan untuk subsistem jasa penunjang. Subsistem hilir selayaknya di prioritaskan untuk tepung tapioka dan tepung ubi jalar sedangkan subsistem hulu belum waktunya untuk dikembangkan sendiri. Subsistem hulu dapat terpenuhi dari Kota Balikpapan sebelum mampu mengembangkan sendiri, arus transportasi ke Balikpapan akan semakin lancar bila dibangun jembatan penghubung antara Balikpapan dengan Penajam Paser Utara.

Posisi strategis Penajam Paser Utara sebagai lalu lintas dan pintu masuk dari arah Samarinda ke Banjarmasin atau sebaliknya mempunyai peran penting sebagai daerah penyangga dan bisa memasok kebutuhan bidang pertanian, perkebunan dan perikanan baik lokal maupun nasional dengan memanfaatkan pelabuhan yang ada di Balikpapan. Pelabuhan di Balikpapan sudah mempunyai jalur dengan Pulau Jawa sejak dulu dan mempunyai posisi yang sangat dekat dengan Penajam Paser Utara.

Agroindustri di Penajam Paser Utara masih dalam tahap persiapan sarana dan prasarana, segera setelah seluruh proses pembangunan agrobisnis yang mempunyai keunggulan dan daya saing sudah berjalan dengan baik. Industri mengharuskan ketersediaan bahan baku yang kontinyu, sarana prasarana yang memadai seperti jalan penghubung antara pusat produksi ke tempat pemasaran serta listrik yang stabil. Ketersediaan jalan, listrik, bahan baku yang kontinyu, pelabuhan atau jembatan akan menarik investor lokal atau nasional untuk membangun agroindustri di Penajam Paser Utara.

Peningkatan kegiatan ekonomi bidang agrobisnis dan agroindustri berjalan diatas paham ekonomi kerakyatan, bahwa seluruh proses ekonomi harus dapat dinikmati oleh seluruh penduduk karena terbuka peluang kerja dalam dua bidang tersebut. *Trickle Effect Down* terbukti tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga penekanan pada ekonomi kerakyatan merupakan sebuah keniscayaan yang harus dilakukan dalam bentuk dukungan kebijakan atas UMKMK (Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi) yang didukung oleh pihak swasta dengan berbagai sistem yang ada. Sistem plasma cukup berhasil dalam membina petani kelapa sawit dengan perusahaan, sistem bapak angkat juga cukup berhasil dalam membina petani dan masih ada sistem-sistem yang lain yang dapat diterapkan sesuai dengan karakteristik daerah.

Pembangunan sarana prasarana saat ini sudah saatnya melibatkan swasta dalam bentuk *Public-Private Partnership*. Kerjasama ini menguntungkan kedua belah pihak, pihak swasta dapat memperoleh keuntungan dalam jangka waktu yang ditetapkan (10 tahun, 15 tahun atau 20 tahun) and pemerintah mampu menghemat APBD sehingga bisa digunakan untuk pembangunan yang lebih banyak dan bermanfaat bagi Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Swasta.

4.2. Misi Pembangunan Daerah

Dalam mewujudkan visi yang tercantum dalam Rencana Jangka Panjang Nasional 2005-2025 tersebut ditempuh melalui 8 (delapan) misi pembangunan Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai berikut:

1. Mewujudkan revitalisasi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan yang berkelanjutan untuk menciptakan lapangan kerja guna mendukung pertumbuhan ekonomi.

Penajam Paser Utara dikenal sebagai salah satu lumbung padi di Kalimantan Timur, oleh karenanya untuk mempertahankan dan mengembangkan potensi pertanian akan dilakukan terus menerus secara berkesinambungan. Revitalisasi pertanian, perkebunan dan perikanan dengan dukungan kebijakan pemerintah akan mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas dan menyerap tenaga kerja guna mendukung pertumbuhan ekonomi. Melalui revitalisasi pertanian, perkebunan dan pertanian, diharapkan tercipta suatu kegiatan integratif antara budidaya, penanganan pasca panen, pengolahan sampai pemasaran.

2. Meningkatkan sarana prasarana penunjang produktivitas ekonomi masyarakat.

Sebagai kabupaten baru, Penajam Paser Utara masih tertinggal dengan kabupaten lain yang lebih dulu berdiri dari sisi sarana prasarana, terutama untuk mendukung agrobisnis dan agroindustri. Sarana jalan yang memadai antara sumber-sumber produksi belum tersedia dengan baik yang menghubungkan dengan pasar, waktu yang dibutuhkan untuk menghubungkan masih terlalu lama. Posisi Penajam Paser Utara yang berhadap-hadapan dengan Balikpapan dapat dikatakan sebagai pintu masuk dari arah samarinda menuju Banjarmasin sehingga memiliki nilai strategis. Pewujudan jembatan yang menghubungkan Balikpapan dan Penajam Paser Utara sangat besar artinya bagi perkembangan peningkatan produktivitas perekonomian, mengingat Balikpapan merupakan kota penghubung melalui laut dengan Pulau Jawa. Sarana pelayanan publik merupakan

modal dasar pembangunan di suatu pemerintahan daerah dan tersedianya infrastruktur sosial dasar, perhubungan, telekomunikasi, informasi dan energi. Dalam mendukung pembangunan agrobisnis sarana penelitian bidang pertanian, perkebunan dan perikanan perlu di bangun. Sarana dalam mendukung agrobisnis yang paling penting adalah sarana yang mendukung pengembangan bidang pertanian, perkebunan dan perikanan seperti tersedianya lahan pertanian dan perkebunan dalam rangka ekstensifikasi dan tersedianya Pangkalan Pendaratan Ikan serta Tempat Pelelangan Ikan.

3. **Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, disiplin, bersih, berwibawa, professional dan bertanggungjawab, efisien dan efektif yang dapat memberikan kualitas pelayanan publik yang prima.** Mewujudkan visi Kabupaten Penajam Paser Utara dengan mengembangkan tata pemerintahan yang baik melalui peningkatan kinerja pelayanan prima di berbagai sektor publik, yang didukung perangkat daerah yang efektif dan efisien, aparatur yang bertanggung jawab dan berwibawa dalam suasana politik dan hukum yang kondusif dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Peningkatan kapasitas aparatur dilakukan secara terus menerus dengan kegiatan pendidikan dan pelatihan, penambahan *skill*, manajemen dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih secara profesional.
4. **Mewujudkan pembangunan agrobisnis subsistem budidaya dan subsistem hilir untuk meningkatkan keunggulan dan daya saing daerah serta menciptakan dasar pengembangan agroindustri berdasarkan keunggulan dan daya saing pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.** Kegiatan agroindustri adalah kegiatan yang mengandung kompleksitas sangat tinggi yang harus ditunjang oleh sarana dan prasarana yang memadai sehingga pada rencana 20 tahunan ini penting untuk meletakkan

dasar bagi pengembangan agroindustri. Sarana prasarana utama adalah ketersediaan jalan yang menghubungkan tempat produksi utama ke tempat pengolahan, irigasi yang memadai, jaminan listrik, kepastian hukum dan suasana yang kondusif. Agrobisnis merupakan suatu kegiatan integratif dari hulu hingga pemasaran yaitu subsistem hulu, subsistem budidaya, subsistem hilir dan subsistem pemasaran. Potensi yang ada dan potensial untuk dikembangkan dalam sistem agrobisnis pada saat ini adalah subsistem budidaya dan subsistem hilir beserta pemasaran. Penajam Paser Utara sangat kaya dengan budidaya dari hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan. Subsistem hilir yang dapat dikembangkan dalam bentuk produksi barang setengah jadi dan barang jadi seperti pabrik pembuatan tepung tapioka dan pabrik pembuatan tepung ubi jalar.

- 5. Menciptakan ekonomi kerakyatan yang maju dan berkesinambungan sebagai satu kesatuan dengan pembangunan agrobisnis dan agroindustri.** Keterlibatan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan koperasi (UMKMK) merupakan titik berat pembangunan agrobisnis dan agroindustri dimana secara umum UMKM merupakan penopang ekonomi nasional dan mampu menyerap tenaga kerja. Penyiapan regulasi dan skim-skim pembiayaan UMKMK perlu dipersiapkan dengan matang. Dukungan kebijakan pemerintah bagi UMKMK dan UMKMK yang partisipatif yang ditunjukkan dengan profil UMKMK yang transparan dan akuntabel akan melahirkan sinergi pembangunan ekonomi kerakyatan. Sinergi pembangunan kerakyatan ini akan semakin menunjukkan tingkat keberhasilan apabila ada dukungan sektor swasta yang bisa diwujudkan seperti dalam sistem plasma, bapak angkat maupun bekerjasama dalam menyediakan pasar bagi hasil produksi UMKMK.
- 6. Mengembangkan potensi wilayah yang berwawasan lingkungan.** Pengelolaan Lingkungan Hidup harus berwawasan lingkungan. Oleh karena itu, pencemaran lingkungan harus dicegah

baik itu pencemaran darat, laut maupun udara. Hal ini dimaksudkan untuk tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup dan terlindunginya wilayah Penajam Paser Utara sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap dampak usaha yang menyebabkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Pengembangan potensi wilayah yang tidak berwawasan lingkungan memang akan memberikan keuntungan secara besar dalam waktu singkat akan tetapi akan mengalami kerugian yang akan dialami dalam jangka waktu lama seperti pembabatan hutan sampai gundul, penggunaan pupuk secara berlebihan, penangkapan ikan dengan memakai alat peledak dan sebagainya.

7. **Mewujudkan sumber daya masyarakat Penajam Paser Utara yang maju dan berakhlak baik.** Masyarakat yang maju dan berakhlak baik diharapkan mampu mewujudkan cita-cita Kabupaten Penajam Paser Utara, hal ini diwujudkan dengan melaksanakan program-program yang berkesinambungan di bidang peningkatan pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan agama serta pelestarian kebudayaan. Sinergi dari berbagai program tersebut akan mewujudkan masyarakat Penajam Paser Utara yang maju, berakhlak baik dan memiliki daya saing.
8. **Mewujudkan jaringan infrastruktur transportasi dan presarana utility yang handal dan terintegrasi satu sama lain di Kabupaten Penajam Paser Utara.** Termasuk didalamnya tersedianya pasokan energi listrik yang cukup untuk daerah perkotaan dan pedesaan. Selain itu, tersedianya air bersih untuk kebutuhan rumah tangga maupun industri serta sistem informasi berbasis elektronik yang mampu mendorong produktifitas sektor – sektor ekonomi.

BAB V

ARAH KEBIJAKAN



BAB V

ARAH KEBIJAKAN DAN PENTAHAPAN RPJPD

5.1 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

Rencana pembangunan jangka panjang disusun untuk mencapai tujuan pembangunan yang mengacu pada arah kebijakan pembangunan sebagai berikut:

5.1.1 Mewujudkan revitalisasi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan yang berkelanjutan untuk menciptakan lapangan kerja guna mendukung pertumbuhan ekonomi.

1. Mengembangkan wilayah dengan potensi besar di bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan
2. Memberikan Penyuluhan dan Pendampingan petani dan nelayan
3. Menciptakan Lapangan kerja sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan
4. Meningkatkan ketahanan pangan melalui swasembada tanaman pangan serta mengembangkan bahan pangan alternatif.
5. Intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian untuk meningkatkan produksi pertanian dan perkebunan unggulan daerah
6. Memfasilitasi peningkatan produktivitas usaha industri skala mikro dan kecil.
7. Memfasilitasi penguatan modal dan perluasan jaringan pemasaran komoditas pertanian dan perikanan unggulan daerah.
8. Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana perekonomian daerah.
9. Memfasilitasi peningkatan produksi perikanan laut dan darat.
10. Menjaga kuantitas dan kualitas sumber daya alam yang berkelanjutan melalui rehabilitasi dan konservasi serta peningkatan peran serta masyarakat.
11. Mengoptimalkan usaha kehutanan berbasis masyarakat pinggiran hutan

5.1.2 Meningkatkan sarana prasarana penunjang produktivitas ekonomi masyarakat.

1. Sarana pelayanan publik

- a. Tersedianya tempat yang nyaman bagi masyarakat ketika meminta pelayanan dari kantor/dinas
 - b. Tersedianya standar prosedur pengurusan dan pelayanan serta informasi yang dibutuhkan
 - c. Pembangunan infrastruktur sosial dasar, perhubungan, telekomunikasi dan informasi dan energi.
 - d. Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat.
 - e. Peningkatan rasa aman dan perbaikan pelayanan kepada masyarakat
2. Sarana penelitian bidang pertanian, perkebunan dan perikanan
- a. Tersedianya badan penelitian pertanian, perkebunan dan perikanan
 - b. Tersedianya sumberdaya aparatur yang kompeten dan profesional dalam bidang pertanian, perkebunan dan perikanan
 - c. Terjalannya kerjasama dengan institusi penelitian lokal, nasional maupun internasional
 - d. Tersedianya tenaga ahli
3. Sarana pertanian dan perkebunan
- a. Terbangunnya jalan penghubung dari pusat produksi ke tempat pemasaran
 - b. Tersedianya transportasi umum dari pusat produksi ke tempat pemasaran
 - c. Tersedianya jaringan informasi terutama untuk bidang pertanian, perkebunan dan perikanan
 - d. Tersedianya lahan pertanian dan perkebunan dalam rangka ekstensifikasi
 - e. Tersedianya alat-alat produksi pertanian
4. Sarana perikanan
- a. Terbangunnya jalan penghubung dari pusat produksi ke tempat pemasaran
 - b. Terbangunnya pelabuhan sandar skala kecil pada tiap titik perkampungan sebagai kawasan kapal nelayan sebagai Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) serta Tempat Pelelangan Ikan (TPI).

- i. Pusat pengembangan masyarakat nelayan
- ii. Pusat pelayanan tambat dan labuh kapal perikanan
- iii. Tempat pendaratan ikan hasil tangkapan
- iv. Pelayanan kegiatan operasional hasil-hasil perikanan
- v. Pusat pemasaran dan distribusi hasil perikanan
- vi. Pusat pembinaan dan penanganan mutu hasil perikanan
- vii. Tempat pengembangan industri dan pelayanan pemasaran
- viii. Tempat pengawasan, penyuluhan dan pengumpulan data.

5.1.3 Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, disiplin, bersih, berwibawa, professional dan bertanggungjawab, efisien dan efektif yang dapat memberikan kualitas pelayanan publik yang prima.

- 1. Mewujudkan supremasi hukum yang konsisten serta mencerminkan ketertiban dan keadilan
- 2. Mewujudkan kinerja aparatur yang disiplin, bersih dan berwibawa
- 3. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas kelembagaan penyelenggaraan pemerintah
- 4. Mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Governance*
- 5. Memperkuat kapasitas aparat pemerintah dan penegakan tata kelola pemerintahan yang baik, professional dan inovatif.

5.1.4 Mewujudkan pembangunan agrobisnis subsistem budidaya dan subsistem hilir untuk meningkatkan keunggulan dan daya saing daerah serta menciptakan dasar pengembangan agroindustri berdasarkan keunggulan dan daya saing pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.

- 1. Pembangunan agrokomples industri masyarakat dan Usaha Kecil Menengah (UKM)
- 2. Mendorong terciptanya Agrobisnis subsistem budidaya
- 3. Membangun Agrobisnis subsistem budidaya dan hilir dengan prinsip Public-Private Partnership

4. Mendorong investor lokal maupun nasional untuk membangun agrobisnis subsistem hilir
5. Mengembangkan Agrobisnis subsistem pemasaran
6. Meningkatkan ketersediaan alat dan bahan produksi pertanian
7. Menyediakan kawasan agroindustri
8. Menciptakan nilai tambah produk dari pengelolaan bahan baku
9. Menyediakan input sumberdaya manusia yang menguasai ilmu, teknologi dan manajemen agroindustri
10. Menyediakan bahan baku yang kontinyu dan kemampuan pemanfaatan seluruh potensi bahan baku
11. Menyediakan modal pengembangan agroindustri baik modal dari pemerintah maupun swasta
12. Menciptakan suasana yang kondusif untuk pengembangan agroindustri

5.1.5 Menciptakan ekonomi kerakyatan yang maju dan berkesinambungan sebagai satu kesatuan dengan pembangunan agrobisnis dan agroindustri.

1. Menurunkan angka kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat
2. Penyiapan regulasi dan menyiapkan berbagai skim pembiayaan ekonomi produktif dan ringan dengan mengutamakan pengembangan Usaha, Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKM)
3. Mengarahkan pengelolaan UMKM yang transparan dan akuntabel
4. Mendorong swasta dalam melakukan pembinaan terhadap UMKM
5. Manajemen pembinaan manajemen usaha yang efektif dan efisien oleh praktisi
6. Menyiapkan sarana pasar baik pasar fisik maupun pasar elektronik

5.1.6 Mengembangkan potensi wilayah yang berwawasan lingkungan

1. Pengembangan sistem informasi potensi wilayah yang efektif
2. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan nilai tambah
3. Mengembangkan Potensi Pariwisata

4. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
5. Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
6. Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
7. Pengelolaan Ruang terbuka Hijau (RTH);
8. Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
9. Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam.
10. Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
11. Rehabilitasi Hutan dan Lahan
12. Pengembangan dan Pengawasan Bidang Pertambangan;
13. Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan
14. Pengembangan Perikanan Tangkap
15. Pengembangan Kawasan Budidaya Air Laut, Air Payau dan Air Tawar.

5.1.7 Mewujudkan sumber daya masyarakat Penajam Paser Utara yang maju dan berakhlak baik.

1. Mewujudkan masyarakat yang sejahtera secara material maupun spiritual
2. Meningkatkan taraf hidup, daya beli, serta kesehatan masyarakat
3. Memperbaiki dan meningkatkan fasilitas pendidikan dasar dan menengah, pendidikan agama serta pelestarian kebudayaan.
4. mewujudkan masyarakat Penajam Paser Utara yang sejahtera, santun dan berakhlak baik serta berbudaya.

5.1.8 Mewujudkan jaringan infrastruktur transportasi dan prasarana yang handal dan terintegrasi satu sama lain di Kabupaten Penajam Paser Utara.

1. Mewujudkan jaringan infrastruktur yang terintegrasi antar moda transportasi darat, sungai dan laut di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara
2. Mewujudkan pasokan energi listrik yang cukup untuk daerah perkotaan dan pedesaan. Pelayanan listrik di Kabupaten Penajam Paser Utara

menggunakan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) dan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)

3. Tersedianya air bersih untuk kebutuhan rumah tangga, industri maupun fasilitas pelayanan yang lain.
4. Terwujudnya jaringan telekomunikasi diarahkan pada pengembangan menara telekomunikasi yang melayani jaringan telepon nir kabel. Pengembangannya diarahkan untuk menjangkau seluruh wilayah di Kabupaten Penajam Paser Utara.

5.2 PENTAHAPAN RPJPD

RPJPD Kabupaten Penajam Paser Utara akan dilaksanakan secara terpadu antarbidang dan antarwilayah, dan bertahap lima tahunan dalam mewujudkan visi pembangunan sebagai berikut:

5.2.1 RPJMD Ke-1 (2005-2010)

Strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah periode 2005-2010 mengacu pada dokumen Rencana Strategis Pembangunan Daerah yang berlaku sampai dengan Tahun 2010.

Pelaksanaan pembangunan yang telah ditempuh selama ini menjadi pijakan dalam perencanaan pembangunan lima tahun pertama pada **Penetapan Kerangka AgroBisnis**. Pada tahap pertama merupakan fase yang sangat penting, karena dalam periode ini diletakkan dasar-dasar dalam upaya bersama-sama semua *stakeholders* untuk menyamakan langkah untuk menuju upaya peningkatan keunggulan dan daya saing bidang pertanian, perkebunan dan perikanan.

Penajam Paser Utara melakukan pembangunan dalam bidang agrobisnis dan agroindustri mengingat potensi alam yang sedemikian besar dalam bidang tersebut. Pengembangan agroindustri dan agroindustri merupakan pengembangan sumberdaya alam yang terbarukan dan akan dijadikan sumber pendapatan daerah pada masa mendatang. Penajam Paser Utara saat ini mendapatkan pendapatan yang besar dari sektor pertambangan dan sebelum sumberdaya alam ini habis PPU harus sudah siap dengan sumber pendapatan baru. Alternatif pembangunan tersebut

adalah pembangunan agribisnis dan agroindustri. Pembangunan ini memberikan dampak yang lebih luas bagi kemakmuran masyarakat dibandingkan dengan industri pertambangan. Industri pertambangan memang memberikan pendapatan yang besar bagi pemerintah daerah namun hasil dari industri tersebut tidak merata dimana pendapatan yang layak diperoleh dari sumberdaya manusia yang mempunyai skill tinggi dan biasanya merupakan pendatang sedangkan tenaga kasar dan satpam diambil dari daerah sekitar.

Pembangunan agribisnis dan agroindustri memberikan dampak yang lebih luas dan merata bagi penduduk PPU, dimana sebagian besar mata pencaharian PPU saat ini didominasi oleh petani dan nelayan sehingga dampaknya akan terasa. Salah satu indikator meningkatnya ekonomi masyarakat yang dapat dicapai adalah terjadinya penurunan angka kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, dampak yang sangat terasa bagi masyarakat adalah tersedianya infrastruktur sosial dasar, perhubungan, telekomunikasi, informasi dan energi sebagai infrastruktur yang mendukung pada pembangunan agribisnis dimana jalan-jalan yang dibangun terintegrasi dengan infrastruktur sosial lainnya seperti jaringan telepon, listrik dan air.

Pembangunan tersebut merupakan bentuk kerangka pembangunan agrobisnis yang didukung pula oleh pembangunan agrokomplek industri masyarakat dan UKM (termasuk IKM (Industri Kecil Menengah)). Diperkenalkannya pembangunan agrobisnis dan agroindustri harus pula didukung oleh sumberdaya manusia yang mempunyai skill. Hambatan pembangunan industri di Indonesia disebabkan oleh pengenalan teknologi yang kurang sehingga selain kualitas pendidikan masyarakat ditingkatkan perlu pula diperkenalkan bagaimana teknologi itu dimanfaatkan.

Pengenalan teknologi bisa dimulai dengan pengenalan teknologi pengolahan di tingkat petani dan nelayan, demonstrasi dan kampanye teknologi, latihan teknologi pengolahan bagi pelaku dan bantuan peralatan pengolahan sebagai percontohan. Kegiatan ini merupakan langkah dasar pengenalan teknologi untuk mempersiapkan masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan visi dan misi pembangunan PPU.

Sejalan dengan peningkatan kualitas pendidikan dan pengenalan teknologi bagi masyarakat, terbangunnya agrokomples industri masyarakat dan UKM maka pemerintah daerah harus menguatkan kapasitas aparatnya dan menegakkan tata kelola pemerintahan yang baik, profesional dan inovatif. Pembangunan agrobisnis dan agroindustri harus didukung oleh aparat yang dapat bekerja optimal dan berdaya pikir inovatif, daya pikir inovatif aparat (khususnya bidang pertanian, peternakan dan perikanan) merupakan salah satu kunci keberhasilan pemenangan dan peningkatan daya saing daerah. Tugas aparat yang tidak kalah penting adalah mampu meningkatkan rasa aman dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

5.2.2 RPJM Ke-2 (2010-2015).

Bila pada tahap pertama berbagai landasan pembangunan jangka panjang telah dilakukan berupa penetapan kerangka agrobisnis, maka program jangka menengah tahap ke-2 diarahkan pada pemantapan perubahan struktural secara sosial – ekonomi, sehingga pembangunan akan lebih diarahkan pada **pemantapan agrobisnis** dengan **memfokuskan** pada subsistem budidaya, sebagian subsistem hilir yang mempunyai keunggulan dan daya saing dan subsistem pemasaran yang tangguh. Subsistem hulu bukan merupakan prioritas sehingga untuk sementara kebutuhan subsistem hulu akan disuplai dari daerah lain seperti Kota Balikpapan.

Pada tahap ini, pengembangan pertanian berbasis agribisnis dan agroindustri mulai berjalan, pengembangan perekonomian telah mengarah pada perbaikan struktur antara produk hulu-hilir. Secara keseluruhan pembangunan telah menunjukan pada arah peningkatan kesejahteraan secara global, lingkungan mulai terkendali, dan secara umum terjadi peningkatan daya saing daerah dalam kemandirian pembangunan. Prasarana dasar pembangunan semakin memiliki peran dalam pemerataan dan mendorong pertumbuhan wilayah, pelaksanaan pembangunan makin menunjukkan peningkatan efisiensi dan efektivitas dengan partisipasi yang makin meningkat serta penataan ruang dijadikan sebagai dasar pijakan pembangunan daerah.

Prioritas pembangunan pada tahap ini adalah Mendorong terciptanya Agrobisnis subsistem budidaya. Subsistem budidaya dapat berkembang dengan baik apabila pemerintah daerah memberikan perhatian baik pemberian insentif kepada petani/nelayan, menyediakan modal siap pakai dengan persyaratan ringan, mendorong anak petani untuk bertani karena tren sekarang lebih menginginkan untuk bekerja sebagai karyawan sehingga banyak lahan terlantar, melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi lahan, menyediakan bibit unggul, kredit pemilikan perahu serta sarana sandar dan pelelangan ikan.

Agrobisnis dan agroindustri tidak hanya berbicara mengenai hasil produk tetapi juga bagaimana memberikan nilai tambah seperti kemasan hasil produk, pewarnaan, pengawetan, dan pelabelan. Intinya terletak pada pengolahan hasil pertanian sehingga tingkat kehilangan pasca produksi berkurang, mutu hasil olahan meningkat, meningkatnya efisiensi dan efektifitas hasil dan berdampak pada nilai jual yang kompetitif dan keragaan hasil yang memuaskan.

Pada tahapan ini juga dilakukan sebuah gerakan penanganan pascapanen dan pengolahan, pembentukan kelembagaan, pembentukan unit pelaksana lapangan dan melakukan kemitraan untuk membangun pemasaran serta meningkatkan ketersediaan alat dan bahan produksi pertanian.

5.2.3 RPJM ke-3 (2015-2020).

Pembangunan pada seluruh bidang yang dilakukan dengan konsisten selama dua periode telah menunjukkan pemantapan menuju masyarakat sejahtera, pemerataan hasil pembangunan telah dirasakan masyarakat. Pada tahap ketiga RPJP ini diarahkan pada **penetapan Kerangka pengembangan AgroIndustri** dimana peningkatan keunggulan dan daya saing akan tercipta bila hanya dibandingkan dengan agrobisnis semata. Pemantapan kerangka agroindustri yang kompleks merupakan tantangan yang harus dihadapi dengan mengedepankan transparansi hukum dan perijinan, sarana prasarana yang memadai seperti jalan dan listrik, pelabuhan, dan akan semakin menarik bila jembatan yang menghubungkan

Balikpapan dengan Penajam Paser Utara dan Pulau Balang dengan Penajam Paser Utara dapat terealisasi.

Tahapan ini adalah untuk **memantapkan** kesiapan infrastruktur daerah seperti ketersediaan jaringan infrastruktur yang terintegrasi antar moda transportasi darat, sungai dan laut, pasokan energi listrik yang cukup untuk daerah perkotaan dan pedesaan dengan PLTD (Pembangkit Listrik Tenaga Diesel), ketersediaan fasilitas air bersih untuk rumah tangga, industri maupun pelayanan yang lain dan jaringan telekomunikasi yang diarahkan pada pengembangan menara telekomunikasi yang melayani jaringan telepon nir kabel

Kegiatan ini difokuskan pada dasar pengembangan agorindustri dengan memprioritaskan kegiatan pada penyediaan kawasan agroindustri, penciptaan nilai tambah produk dari pengelolaan bahan baku, penyediaan sumberdaya manusia yang menguasai ilmu, teknologi dan manajemen agroindustri, penyediaan bahan baku yang kontinyu dan kemampuan pemanfaatan seluruh potensi bahan baku, adanya modal pengembangan agroindustri baik dari pemerintah maupun swasta dan suasana yang kondusif untuk pengembangan agroindustri.

Tahapan RPJM ke-tiga juga membawa misi pengembangan potensi wilayah dengan tetap berwawasan lingkungan, karena agroindustri identik dengan industri yang harus menjaga lingkungan dengan amdal sebagai acuan dasar pelaksanaan pembangunan agar kualitas lingkungan tidak terlanjur rusak. Wawasan lingkungan harus ditopang oleh supremasi hukum yang kuat agar pelaku perusakan lingkungan dapat ditindak.

5.2.4 RPJM Ke-4 (2020-2025).

Berdasarkan pencapaian pembangunan selama tiga periode yang dilaksanakan secara konsisten, maka RPJM ke-4 merupakan fase mencapai visi pembangunan Penajam Paser Utara yang Mandiri dan Sejahtera Berbasis Pada Ekonomi Kerakyatan dengan **Memantapkan agribisnis dan agroindustri**.

Tahapan ini juga merupakan tahapan evaluasi akhir dari ketiga tahapan dimana setiap capaian pembangunan pada tiga tahapan sebelumnya disesuaikan dengan perkembangan sosial, budaya, hukum, politik dan ekonomi masyarakat yang

semakin maju. Terciptanya *Good Governance* harus sudah dimulai pada tahapan pertama sehingga pada tahapan keempat ini terbentuk budaya aparatur baru yang mengedepankan pelayanan kepada publik, adil, bersih dan berwibawa.

Berhasilnya Pembangunan Penajam Paser Utara dalam bidang Agribisnis harus selalu di kawal dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang mendukung usaha masyarakat dalam bidang agribisnis. Penyediaan pupuk murah berkualitas, infrastruktur yang memadai, pasar yang jelas sehingga aliran ekonomi bidang agribisnis dapat terus berjalan dari hulu sampai hilir. Tahapan ini juga berarti bahwa **agribisnis subsistem hulu** menjadi **fokus** pembangunan dengan membangun pabrik pembenihan baik pertanian, peternakan maupun perikanan. Pembangunan pabrik pupuk harus melalui kajian akademis terlebih dahulu apakah pasar yang ada mampu menyerap hasil produksi pupuk termasuk jenis pabrik yang akan dibangun merupakan pupuk kandang maupun pupuk sintetis.

Penyiapan infrastruktur untuk pengembangan agroindustri pada tahapan ketiga dikaji ulang pada tahapan keempat pembangunan Penajaman Paser Utara. Kesiapan pembangunan agroindustri ditentukan oleh tahapan pertama sampai tahapan ketiga, jika tahapan tersebut berjalan dengan lancar pembangunan agroindustri pada tahapan keempat dapat dilakukan. Sebagai contoh, produksi ubi jalar yang mencukupi dan adanya pabrik pengolahan tepung ubi jalar dapat diinisiasi oleh pemerintah agar terbentuk menjadi agroindustri yang mengelola produksi dari hulu sampai hilir hingga mampu di ekspor ke manca negara.

Prioritas tahapan ini adalah Menciptakan ekonomi kerakyatan yang maju dan berkesinambungan sebagai satu kesatuan dengan pembangunan agrobisnis dan agroindustri dan mewujudkan masyarakat Penajam Paser Utara yang sejahtera. Prioritas ini mengandung kegiatan dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera secara material maupun spiritual, meningkatkan taraf hidup, daya beli, serta kesehatan masyarakat, memperbaiki dan meningkatkan fasilitas pendidikan dasar dan menengah, pendidikan agama serta pelestarian kebudayaan, mewujudkan masyarakat Penajam Paser Utara yang sejahtera, santun dan berbudaya. Menurunkan angka kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, menyiapkan berbagai skim pembiayaan ekonomi produktif dan ringan dengan

mengutamakan pengembangan UMKMK, mengarahkan pengelolaan UMKMK yang transparan dan akuntabel, mendorong swasta dalam melakukan pembinaan terhadap UMKMK, manajemen pembinaan manajemen usaha yang efektif dan efisien oleh praktisi, dan menyiapkan sarana pasar baik pasar fisik maupun pasar elektronik.

Pentahapan di atas merupakan suatu kerangka garis besar ketercapaian, dan langkah-langkah yang harus dilakukan pada setiap tahapan pembangunan. Kerangka pentahapan tersebut merupakan satu kesatuan yang diterjemahkan kedalam rencana jangka menengah, yang didukung dengan sasaran tahunan yang lebih kongkrit dimana pada setiap tahunan dilakukan evaluasi pembangunan. Evaluasi ini juga dilakukan pada setiap lima tahunan. Hasil evaluasi ini dijadikan dasar pada pengembangan pada tahap selanjutnya.

BAB VI

KAIDAH PELAKSANAAN



BAB VI

KAIDAH PELAKSANAAN

Rencana Pembangunan Jangka Panjang akan terlihat hasilnya setelah 20 (dua puluh) tahun mendatang karena RPJPD ini merupakan kerangka dasar yang harus diturunkan dalam RPJMD dan perencanaan di bawahnya. Konsistensi pembangunan daerah yang mengaitkan diri dari RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA DAN RENJA akan memberikan nilai tambah yang tak ternilai harganya bagi pembangunan di Penajam Paser Utara yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan visi dan misi daerah.

Pembangunan Penajam Paser Utara dalam seluruh kegiatannya harus berada dalam kerangka regulai dan kerangka anggaran, keterpaduan, sinkronisasi, integrasi dan sinergi antar kegiatan dalam satu maupun antar program, dalam SKPD maupun antar SKPD dengan tetap memperhatikan peran/tanggungjawab/tugas yang melekat pada Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mensandarkan seluruh proses pembangunan kepada RPJPD ini.

Pemerintah Kabupaten Penajama Paser Utara wajib menerapkan prinsip-prinsip tata pengelolaan pemerintahan yang baik antara lain: prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi baik masyarakat maupun swasta dalam melaksanakan kegiatan dalam rangka pencapaian visi, misi, dan arah kebijakan yang tertuang dalam RPJP Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara 2005-2025. Keterlibatan masyarakat dan swasta akan mampu menjadi pemicu akselerasi pembangunan dalam mengejar dan unggul dari pemerintah daerah lainnya.

Pelaksanaan pembangunan jangka panjang memerlukan kaidah pelaksanaan sehingga terjadi kesinambungan pembangunan dari tiap tahapan dan tiap tahun. Kaidah pelaksanaan RPJPD tersebut adalah sebagai berikut:

- 1 Pemerintah Daerah serta masyarakat termasuk dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan, dan mengacu visi, misi, dan arah pembangunan RPJPD 2005-2025 dengan sebaik-baiknya;
- 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara, Bupati, Sekretaris Daerah, Dinas-Dinas, Badan-Badan, Kantor-Kantor, dan

Kecamatan dalam jajaran organisasi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, masyarakat, dan sektor swasta berkewajiban menjamin konsistensi antara RPJP Daerah dengan RPJM Daerah, Rencana Strategis (Renstra) SKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Rencana Kerja (Renja) Kabupaten Penajam Paser Utara;

- 3 Bupati berkewajiban untuk menjabarkan visi, misi, dan arah kebijakan RPJP Daerah ke dalam RPJM Daerah yang nantinya akan menjadi pedoman bagi Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD;
- 4 Bupati pengganti berkewajiban untuk melanjutkan rencana pembangunan yang tertuang dalam RPJP Daerah dalam RPJM Daerah tahapan selanjutnya.
- 5 Tahapan-tahapan kerangka RPJM Daerah dalam rangka pelaksanaan RPJP Daerah adalah sebagai berikut:
 - a. RPJMD 1 Penetapan Kerangka Agrobisnis
 - b. RPJMD 2 Pemantapan Agrobisnis
 - c. RPJMD 3 Penetapan Kerangka Pengembangan Agroindustri
 - d. RPJMD 4 Memantapkan Agrobisnis dengan mengembangkan agrobisnis subsistem hulu dan Agroindustri
- 6 Rancangan awal RPJMD memuat visi, misi dan program kepala daerah yang berpedoman pada RPJP ini dan memperhatikan RPJM Nasional, kondisi lingkungan strategis, serta hasil evaluasi pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya untuk penyusunan RPJMD tahap kedua sampai tahap ke-empat.
- 7 Pada masa 2 tahun sebelum berakhirnya RPJP, pemerintah daerah berkewajiban untuk menyiapkan penyusunan RPJP 20 tahun mendatang

BAB VII

PENUTUP



BAB VII

P E N U T U P

Pembangunan Jangka Panjang akan mampu memberikan nilai bagi seluruh lapisan masyarakat apabila pembangunan tersebut senantiasa dan disiplin mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP). Oleh karenanya seluruh kegiatan dalam kerangka regulasi dan kerangka anggaran, keterpaduan, sinkronisasi, integrasi dan sinergi antar kegiatan, baik di antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu SKPD dan antar SKPD, dengan tetap memperhatikan peran/tanggungjawab/ tugas yang melekat pada pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2005 - 2025 berisi visi, misi, arah kebijakan dan strategi sebagai pedoman bagi Pemerintah dan masyarakat di dalam penyelenggaraan pembangunan daerah 20 (dua puluh) tahun ke depan.

Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan yang telah diprogramkan, dapat dilakukan melalui regulasi, forum koordinasi dan musyawarah pembangunan. Pemerintah Kabupaten wajib menerapkan prinsip-prinsip tata pengelolaan pemerintahan yang baik diantaranya prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam melaksanakan kegiatan dalam rangka pencapaian visi, misi dan arah pembangunan yang tertuang dalam RPJP Kabupaten Penajam Paser Utara 2005-2025.

Kabupaten Penajam Paser Utara merupakan wilayah dengan potensi yang sangat besar dan perlu dikembangkan secara terarah dengan dukungan seluruh stakeholder. Dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan, RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang) Kabupaten Penajam Paser Utara menjadi arah dan pedoman wajib kepala daerah dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) lima tahunan, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Renja SKPD). Pada

masa 2 tahun sebelum berakhirnya RPJP ini maka pemerintah daerah berkewajiban untuk menyiapkan penyusunan RPJP 20 tahun mendatang.

Dalam mewujudkan Visi yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Penajam Paser Utara yaitu **“Terwujudnya Kabupaten Penajam Paser Utara yang Berakhlak Baik, Mandiri, Sehat dan Sejahtera Berbasis Pada Ekonomi Kerakyatan”**, diperlukan adanya dukungan berupa:

1. Komitmen kepemimpinan yang kuat, adil dan demokratis;
2. Konsistensi kebijakan publik yang partisipatif;
3. Keberpihakan kepada masyarakat, serta
4. Peran aktif dunia usaha dan kemudahan dalam pengembangan investasi daerah di berbagai bidang.

ÓΥΕ/ΑΪΟΨΕΡΕΤ ΑΪΕΪΟΪΑΨΕΪΕ

Ttd

AAAAAAAAAAAA P Ę P Ö Á P Ÿ P P Ÿ